LIMITED EDITION

TEMPO EDISI KHUSUS

SOEHARTO

TEMPO EDISI KHUSUS

SOEHARTO

Daftar isi

Setelah Dia Pergi

DENGAN tujuh hari berkabung nasional, perintah pengibaran bendera setengah tiang-lain soal Anda patuh atau keberatan-Soeharto yang berpulang Ahad dua pekan lalu sudah menjadi "pahlawan". Suka atau tidak, sejak ia masuk Rumah Sakit Pertamina hingga wafat, tiga pekan kemudian, ia masih seorang master dengan kuasa penuh.

Pejabat tinggi keluar-masuk membesuknya. Turun-naik fungsi jantungnya menelan berita kematian pedagang "gorengan" Slamet, yang putus asa lalu bunuh diri akibat harga kedelai ekstra tinggi. Semua stasiun televisi-beberapa memang milik anak-anaknya-mengarahkan moncong kamera ke rumah sakit, seraya mengulang-ulang sejarah perjalanannya ketika mengemudikan negeri. Tentu saja, untuk menghormati dia yang sakit keras, sengaja dipilih berita-berita bagus saja.

Di rumah sakit, keluarga menetapkan "protokoler" ketat: hanya mereka yang mendapat perkenan boleh menghampiri. Tidak semua bekas anggota lingkaran dekat lolos seleksi. Harmoko, yang selama menjadi menteri tidak pernah lupa minta petunjuk sang bos, entah kenapa tak masuk hitungan. Juga Habibie, bekas presiden yang pernah menyebut Soeharto sebagai profesornya itu. Di tengah paduan suara politikus merapal permintaan maaf untuknya, rupanya belum tersedia maaf untuk dua bekas setiawan itu.

Ketika ia akhirnya wafat, penyiar televisi dengan mata sembap semakin bersemangat menyiarkan kebaikan dan kisah sukses. Jam tayang ditambah, rating meningkat mengalahkan sinetron mana pun-artinya iklan pasti datang berduyun-duyun. Usaha "menggoreng" perasaan rakyat lewat TV harus dikatakan berhasil.

Tiba-tiba di layar kaca orang menyaksikan sosok yang hanya boleh diberi simpati dan dikirimi doa. Mereka yang bicara lain, apalagi menyinggung dosa dan salahnya, seakan keliru, jahil, nyinyir, atau menyimpan dendam. Mungkin Asep Purnama Bahtiar benar. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu merasa yang diberitakan media massa bukan lagi sebagaimana adanya, melainkan hasil konstruksi tentang sebuah "dunia" yang diciptakan media massa dan pihak-pihak yang terlibat.

Sebentar lagi, setelah Astana Giribangun, makam keluarga yang megah itu, tidak lagi menjadi berita, yang tersisa adalah kasus perdata yayasan Soeharto, dan debat tentang status hukum ahli waris. Pemerintah jangan sampai habis waktu mengurus soal ahli waris ini. Semua aturan sudah jelas. Bila anak-anak almarhum tidak meminta penetapan menolak waris ke pengadilan, artinya hak waris jatuh ke tangan enam anaknya. Setelah apa yang diberikan Soeharto, mestinya tidak masuk akal bila ada di antara anak-anaknya yang berpikir untuk menolak waris itu. Selanjutnya, kejaksaan bisa berurusan dengan anak-anaknya dalam perkara perdata.

Kasus pidana Soeharto memang otomatis gugur dengan kematiannya, tapi para kroni yang masih hidup perlu terus dipersoalkan. Pemerintah tinggal menyatakan kebijakan zaman Soeharto yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan, melawan hukum, atau membelokkan kebijakan publik untuk keuntungan diri dan kelompok sendiri. Siapa pun yang menikmati manfaat dari kebijakan semacam itu bisa langsung ditetapkan sebagai obyek pengusutan. Dan para penikmat tak bisa menghindar. Selama ini mereka tidak melakukan usaha apa pun untuk menolak "madu" privilese yang mereka isap dengan riang.

Ada banyak cara kalau pemerintah memang mau dan punya niat. Audit semua kekayaan para kroni hanya salah satu metode itu. Harta yang bersumber dari privilese, atau yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, bisa dibawa ke pengadilan. Secara prinsip, menikmati keuntungan dari kebijakan yang melawan hukum termasuk perbuatan melawan hukum juga.

Bukti-bukti sudah sedemikian gamblang. Dokumen rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Gedung Putih bisa dipakai sebagai bukti tambahan untuk mengusut korupsi di zaman Orde Baru itu.

Publik tinggal menunggu, apakah di pengadilan para kroni akan buang badan dengan menimpakan semua kesalahan kepada Soeharto, tokoh yang kini mereka puja dan sudah begitu banyak memberikan "gula-gula" kepada mereka. Hanya pengecut tulen yang sanggup "menusuk" sang tuan yang sudah di alam baka.

Mengusut para kroni merupakan keharusan, kalau pemerintah memang ingin menegakkan keadilan ekonomi dan melaksanakan pesan konstitusi untuk menjamin persamaan kesempatan berusaha bagi warga negara. Tanpa tindakan apa-apa, fasilitas istimewa dan kenikmatan yang selama ini diduga diperoleh secara curang tidak akan pernah berakhir. Hanya kerajaan boneka yang membiarkan keadaan buruk ini terus berlangsung.

Sebaiknya pemerintah memberi prioritas mengusut para kroni-tindakan yang diamanatkan MPR itu. Menyelesaikan kasus ini lebih penting ketimbang sibuk mempertimbangkan gelar pahlawan untuk Soeharto-usul yang dipekikkan lantang Priyo Budi Santoso, orang Golkar yang pernah tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Legasi Tak Berujung

Jakarta, 1966. Soekarno yang memerintah enam tahun dengan Demokrasi Terpimpin yang gegap-gempita itu digantikan seorang tentara pendiam. Ia tampan, di tangannya ada selembar surat mandat berkuasa: Supersemar.

Sejak itu, bahkan berpuluh-puluh tahun berselang, setelah jenazahnya dikebumikan di Astana Giribangun, Karanganyar, Senin pekan lalu, jenderal pendiam itu terus mengharu biru bangsa ini. Ya, Soeharto (1921-2008) tak berhenti di situ.

Ada nostalgia yang selalu membuat orang rindu akan stabilitas yang dibangunnya dulu, manakala demokrasi menimbulkan riak-riak ketidakpastian: munculnya raja-raja kecil di daerah, kebebasan berekspresi yang berisik, dan para oportunis mendominasi panggung-panggung kekuasaan. Dan sikapnya yang tak pernah beringsut dari doktrin NKRI dan tidak toleran terhadap aspirasi daerah itu sekonyong-konyong jadi alternatif ketika separatisme mulai menggejala di Sumatera, Maluku, Papua, dan belahan lain di negeri ini.

Bagaimana ia bisa begitu merasuk ke dalam aliran darah bangsa ini?

Tiga puluh dua tahun berkuasa, Soeharto tentu saja mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat baik maupun buruk-ia melakukannya, silih berganti. Namun ada proses yang seakan terus-menerus berlangsung di masa pemerintahan yang panjangnya hanya bisa dikalahkan oleh pemimpin Kuba Fidel Castro itu, yaitu sentralisasi, bahkan kemudian personalisasi, dengan sosok Soeharto sebagai nukleus sentral seluruh negeri.

Tak aneh, para pengamat budaya sering membandingkan pemerintah Orde Baru dengan kerajaan Jawa Mataram-sistem politik dengan konsep yang menempatkan raja sebagai pusat kekuasaan yang menghimpun segenap kekuatan kosmis. Raja adalah sosok sakti, sangat sakti. Dalam tradisi Jawa, demikian Benedict Anderson dalam bukunya yang klasik The Idea of Power in Javanese Culture, legitimasi tidak datang dari manusia. Dengan kesaktiannya sang ratu bisa menaklukkan manusia lain di sekitarnya. Dan Soeharto, sadar atau tidak, tampaknya yakin dialah titik pusat itu.

Proses sentralisasi mungkin bisa tercium sejak dini. Tepatnya tatkala ia menyederhanakan partai-partai-kantong-kantong kekuasaan di luar pemerintah-peninggalan demokrasi liberal yang dibikin lumpuh Demokrasi Terpimpin-nya Soekarno. Pada Pemilu 1971, seperti ditulis Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, partai yang jumlahnya puluhan itu menjadi hanya sepuluh partai. Dan segenap aturan pemilu digiring ke satu tujuan: kemenangan Golkar.

Waktu itu, para demokrat pendukungnya, termasuk para mahasiswa Angkatan 66 yang menurunkan Soekarno sebelumnya, sama sekali tidak menaruh curiga. "Kami tahu dia tentara yang tidak senang politik," kata Arief Budiman, salah seorang aktivis.

Para pencinta demokrasi memang terpikat, menggantungkan banyak harapan pada pundaknya. Soeharto membebaskan tahanan politik dan mengizinkan surat kabar yang dibredel Soekarno terbit kembali. Orde Baru dengan cepat "menjelma" menjadi koreksi terhadap Orde Lama; dan Soeharto sendiri merupakan koreksi terhadap Soekarno. Ia terbukti mengucapkan selamat tinggal kepada model pemerintah yang gemar mengutarakan slogan-slogan, pemerintah yang sibuk berseru ganyang Malaysia dan membiarkan ekonomi negeri ini tercampak dengan inflasi sampai 600 persen. Sebuah program pembangunan direntangkan, inflasi dikendalikan, dan Indonesia mulai memasuki pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Modal asing berdatangan.

Tapi pengikisan kekuasaan di luar nukleus pemerintahan Orde Baru ternyata tidak berhenti. Sebuah kejadian pada pertengahan 1970-an lantas mengantar pengikisan selanjutnya: sepuluh partai diringkas menjadi dua partai dan satu golongan. Peristiwa Malari (1974) menghadang pemerintah yang berencana mewujudkan gagasan Tien Soeharto, Taman Mini Indonesia Indah, dan mulai diroyan korupsi. Tantangan para mahasiswa kali ini dihadapi dengan tangan besi. Wajah pemerintah yang dulu toleran dan terbuka itu pun digantikan wajah galak dan represif. Beberapa tahun kemudian, 1978-1979, tantangan yang frontal dari mahasiswa dijawab dengan NKK/BKK-larangan berpolitik bagi para mahasiswa di kampus.

Pada 1980-an, sentralisasi kekuasaan yang berjalan selama satu periode itu pun mencapai tahap yang cukup mencengangkan: nukleus itu melebar. Putra-putri Presiden Soeharto yang sudah mulai besar itu menjadi bagian dari inti sel dan terjun ke dunia bisnis berbekal "hak-hak istimewa" sebagai anak presiden. Sebuah edisi majalah Forbes memberitakan, setelah krisis moneter 1997, kekayaan Soeharto dan keluarganya mencapai US$ 16 miliar.

Dalam memoarnya yang tebal, From Third World to First, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menyebut, "Saya tidak mengerti mengapa anak-anaknya perlu menjadi begitu kaya." Dalam buku yang sama, Lee menyayangkan Soeharto telah mengabaikan nasihat mantan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Benny Moerdani pada akhir 1980-an agar ia mengekang gairah anak-anaknya untuk mendapatkan aneka privilese bisnis.

Menurut Kuntowijoyo, seperti dikutip Eriyanto dalam buku Kekuasaan Otoriter, Soeharto adalah tipe manusia yang mendasarkan diri pada an act of faith-perbuatan berdasarkan keyakinan-dan bukan tipe jenis an act of reason, perbuatan berdasarkan akal. Karena itu, banyak ucapan dan tindakan Soeharto yang mengejutkan, tapi ia tidak pernah ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak perlu pertimbangan rasional ketika membubarkan PKI, tapi karena keyakinannya sendiri. Dalam biografi yang disusun O.G. Roeder, ditunjukkan betapa yakin Soeharto ketika mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat. "Saya bertindak atas keyakinan saya sendiri."

Dan agaknya dengan keyakinan yang sama pulalah ia memutuskan untuk melancarkan operasi "petrus" alias penembakan misterius untuk membasmi preman. Sikap keras yang sama boleh jadi mendasari keputusan untuk melakukan tindakan drastis yang melahirkan banyak korban di Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Papua, dan sejumlah tempat lain. Catatan hitam pelanggaran hak asasi manusia ini sungguh tak mudah dihapuskan begitu saja.

Puncak sentralisasi yang sangat nepotistis itu akhirnya tampil dalam bentuk yang begitu transparan pada 1997: ia terpilih untuk ketujuh kalinya, dan itu berarti hampir separuh dari usianya dihabiskan sebagai presiden negeri ini. Dalam Kabinet Pembangunan VII, Siti Hardijanti Rukmana, putri sulungnya, diangkat menjadi Menteri Sosial. Dan manakala jangkauan wewenang yang diberikan kepada seorang Menteri Sosial kemudian terlihat begitu luas, orang pun mulai membayangkan sebuah suksesi yang tidak berbeda dengan peristiwa keluarga: sang putri sulung mengambil alih peran ayahnya.

Gaya Soeharto memang sentralistis, nepotistis, dan kerap kali represif. Tapi dari cara itu lahir pula program kesejahteraan yang berhasil-dan ujung-ujungnya menampilkan citranya yang populis. Indonesia in the Soeharto Years: Issues, Incidents and Images, buku yang berisi kumpulan tulisan yang membahas periode itu, menyebut keberhasilan Keluarga Berencana, program yang bermula pada 1970 dan bertumpu pada pertimbangan nilai-nilai ekonomi semata. Soeharto percaya setiap anak membutuhkan sandang, pangan, pendidikan; dan segenap kebutuhan itu tak mungkin terpenuhi jika negeri ini mengalami ledakan pertumbuhan penduduk.

Pelaksanaan program Keluarga Berencana bersifat top-down dan sama sekali tidak berasal dari aspirasi masyarakat. Dengan Tien Soeharto pada puncak organisasi, dan didukung istri pemimpin tertinggi di daerah-daerah, mesin birokrasi menggerakkan program Keluarga Berencana sampai ke desa-desa terpencil. Di dalamnya ada represi yang berbuah sejumlah kisah pedih, walau dunia melihatnya sebagai prestasi.

Kelewat lama berkuasa, Soeharto dan lingkaran kecil sahabat serta keluarga dekat tumbuh menjadi satu-satunya kalangan yang bertanggung jawab atas aneka gejala sosial ekonomi di negeri ini: represi, keberhasilan model kesejahteraan, korupsi yang demikian mengerikan, juga kehancuran ekonomi akibat krisis moneter 1997-1998.

Ahad dua pekan lalu, hidupnya yang panjang berakhir sudah, tapi lakon dan legasinya-baik yang lama maupun yang belum lagi terungkap-terus menghantui negeri ini.

Dari Istana ke Astana

SEJUMLAH petinggi negara yang tadinya asyik bersenda-gurau tiba-tiba terdiam. Suasana senyap. Jenazah Soeharto diusung masuk ke pemakaman Astana Giribangun. Setelah diletakkan, peti dibuka. Tidak cuma dilapisi kain kafan, jenazah itu juga diselimuti kain tebal warna putih.

Suwardi, pengurus pemakaman Desa Karang Bangun, cukup kesulitan membuka kain itu, pada saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat. Membuka kain itu saja memerlukan waktu sekitar tiga menit.

Keluarga memutuskan Soeharto dikubur bersama peti yang dikalungi untaian melati. Tapi tubuhnya diganjal tanah. Dimiringkan ke arah kiblat. Enam pengurus makam berpakaian sorjan perlahan memasukkan jenazah diiringi jeritan terompet militer.

Setelah itu, jasad dihujani kembang aneka rupa. Ditutup tanah. Sebiji kelapa yang sudah dibelah tengkurap di atas kubur. Menghabiskan usia 87 tahun-32 tahun di antaranya memerintah dengan penuh kontroversi-Soeharto selesai sudah.

Di perhentian terakhir itu, jasadnya dimakamkan di antara sang istri, Siti Hartinah, yang wafat pada 28 April 1996, dan sang mertua, KRA Soemoharjono. Liang lahat itu sudah digali beberapa tahun lalu tapi selama ini hanya ditimbuni pasir. Dindingnya kukuh. Dilapisi beton marmer kasar.

Makam Astana Giribangun itu didirikan pada 1974 oleh yayasan Mangadeg yang dipimpin Siti Hartinah. Cara membangunnya cukup unik. Sebuah bukit setinggi 17 meter dipotong, lalu di atasnya dibangun kompleks pemakaman setinggi bukit itu.

Arsitek pemakaman itu adalah Ali Surono, seorang dosen di Universitas Gadjah Mada. Astana artinya makam. Giri artinya gunung. Jadi, Giribangun, "Artinya gunung yang dibangun," kata Sukirno, juru kunci pemakaman.

Pada Senin pekan lalu itu, semua mata tertuju ke sana. Jumlah pelayat sekitar 20 ribu orang. Mereka berjubel hingga pertigaan Matesih, empat kilometer dari Astana.

Lima ratus juru warta, dalam dan luar negeri, bersesakan meliput jalannya prosesi pemakaman. Hampir semua stasiun televisi menyiarkan secara langsung.

Jalan macet total. Banyak pelayat yang lewat jalan tikus. Sejumlah menteri malah terjebak di pertigaan Matesih. Mereka terlihat cemas karena rombongan jenazah sudah bergerak dari Bandara Adisoemarmo. Takut terlambat, sejumlah menteri pun melompat dari mobil lalu meminta polisi mencarikan ojek.

Seorang tukang ojek bernama Parno mengaku kebagian mengangkut seorang menteri wanita. Saat itu, katanya, dia cuma mau menonton rombongan jenazah. Tiba-tiba ia dipanggil polisi untuk mengantar Ibu Menteri.

Parno agak grogi karena jalan menuju pemakaman sudah dipenuhi polisi dan tentara. Tapi si penumpang memberikan jaminan. Kalau dicegat, katanya, "Bilang saja mau mengantar Ibu Menteri," tutur Parno kepada Tempo.

Begitu turun, Parno diberi ongkos Rp 50 ribu. Dia gembira karena biasanya sewa ojek cuma lima ribu perak. Tapi yang kebagian mengantar orang asing lebih gembira daripada Parno. "Saya dan teman saya dapat Rp 100 ribu," kata Warto, tukang ojek yang mengangkut seorang tambun berkulit putih.

Petinggi lain yang menggunakan jasa ojek adalah Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita. Banyak pula yang berjalan kaki. Ali Alatas, Menteri Luar Negeri zaman Soeharto, terlihat berjalan kaki 300 meter. Karena letih, dia dipapah ajudan.

III

AREAL pelataran makam itu tidak mampu menampung semua pejabat yang datang. Di sana hanya terlihat keluarga Soeharto, keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, orang dekat Cendana, dan petugas pemakaman.

Sedangkan para menteri, mantan pejabat, dan para pengusaha kondang duduk di luar pelataran. Di sana terlihat pengusaha Prajogo Pangestu dan Tito Sulistyo, Mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, juga mantan Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita. Walau terlihat lelah, semuanya takzim mengikuti prosesi pemakaman yang ditayangkan lewat layar monitor. Mereka baru masuk melihat makam itu setelah prosesi selesai. Mantan ajudan Soeharto, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, malah memilih berdiri di luar kompleks makam. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan ini mengenakan pakaian militer.

Entah kenapa jenderal bintang tiga ini tak masuk kawasan makam. Padahal sejumlah jenderal bintang dua hilir-mudik ke sana. Ada Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal Suryo Prabowo dan Pangdam Diponegoro Mayor Jenderal Darpito Pudyastungkoro.

Selain pejabat dalam negeri, sejumlah pejabat dari luar negeri juga menghadiri acara pemakaman itu. Ada Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, dan perwakilan sejumlah negara. Dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upacara pemakaman berlangsung khidmat. Mata Yudhoyono terlihat sendu ketika jenazah Soeharto dimasukkan ke liang lahat.

Pidato Yudhoyono di pemakaman itu sangat ditunggu orang ramai. Sebab, Soeharto pergi meninggalkan setumpuk kasus, mulai dari kasus pidana korupsi, perkara tujuh yayasan yang diduga merugikan negara Rp 1,7 triliun, hingga kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Gerilya pengikut Soeharto guna menutup sejumlah perkara itu juga sudah marak sejak dia terkulai di Rumah Sakit Pusat Pertamina, 4 Januari 2008. Banyak yang mendesak agar pemerintah Yudhoyono memaafkan penguasa Orde Baru itu. Tuntutan mereka kian nyaring setelah Soeharto wafat 24 hari kemudian, Minggu dua pekan lalu.

Tapi yang menuntut agar Soeharto segera diadili juga banyak. Sejumlah kelompok berunjuk rasa di Rumah Sakit Pertamina, tempat Soeharto dirawat. Mereka berdoa agar kakek 87 tahun itu lekas sembuh, "Biar bisa diadili."

Dua pekan lalu, sebuah kelompok anak muda malah menjaring pendapat anak gaul yang lalu-lalang di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Hasilnya, lebih dari seribu orang menandatangani spanduk yang menuntut pemerintah, "Segera mengadili Soeharto."

Di Astana Giribangun, Senin pekan lalu itu, Yudhoyono memilih menjauh dari polemik ini. Soeharto, katanya, "Manusia biasa. Almarhum tidak luput dari kekurangan." Berpidato sekitar sepuluh menit, dia sama sekali tidak menyinggung soal kasus Soeharto.

III

PEMAKAMAN Soeharto adalah yang terbesar sepanjang sejarah negeri ini. Presiden menetapkan tujuh hari berkabung nasional. Semua kantor pemerintah, badan usaha negara, dan rumah warga memasang bendera setengah tiang, walau faktanya cuma sebagian yang patuh.

Prosesi pelepasan jenazah di Jakarta juga diikuti ribuan orang. Pukul enam pagi, Senin pekan lalu, sekitar 400 tentara dari tiga angkatan sibuk mengadakan gladi resik upacara pelepasan jenazah di Cendana.

Ketika hari terang tanah, sebuah pesawat Boeing 737 terbang dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur menuju Bandara Adisoemarmo di Solo. Ini pesawat khusus yang mengangkut rombongan Presiden Yudhoyono.

Jenazah dilepas dari Cendana pukul tujuh pagi. Dihadiri sekitar seribu orang dan dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono.

Sepanjang jalan orang berjubel menonton. Hampir semua stasiun televisi menyiarkan perjalanan jenazah. Sebuah stasiun televisi bahkan menyewa helikopter untuk mengambil gambar dari langit.

Sekitar 20 pesawat terbang membawa penumpang yang mengikuti pemakaman itu. Pemerintah menyiapkan tujuh pesawat dari berbagai jenis. Satu C-130 Hercules VVIP, empat C Hercules Troopseat, dan dua Fokker 28 VIP.

Tatkala jenazah Soeharto disemayamkan di rumah duka di Jalan Cendana, Minggu malam dua pekan lalu itu, sebuah pesawat yang membawa logistik pemakaman sudah terbang lebih awal ke Solo. "Pesawat itu khusus membawa kendaraan khusus," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsekal Pertama Daryatma. Keluarga Cendana sendiri mencarter sembilan pesawat guna mengangkut pelayat ke Solo. Maskapi yang dicarter antara lain Trans Wisata, Indonesian Air Service, dan Pelita Air.

Karena Bandara Adisoemarmo tidak mampu menampung banyak pesawat, ada juga yang mendarat di Madiun, Jawa Timur. Keluarga ini juga mencarter sekitar 50 mobil membawa pelayat dari bandara ke Astana Giribangun.

Berapa total biaya pemakaman itu? Pada Rabu pekan lalu, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengaku belum menghitungnya. "Belum kami rekap," katanya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, biaya perawatan dan pemakaman seorang mantan presiden memang ditanggung negara.

Pada 2007, misalnya, anggaran untuk kesehatan mantan presiden dan mantan wakil presiden di pos Sekretariat Negara adalah Rp 800 juta. Padahal, sejumlah sumber menyebutkan, selama 24 hari Soeharto dirawat, total biaya yang dikeluarkan sudah sekitar Rp 1,2 miliar. Menteri Sekretaris Negara zaman Soeharto, Moerdiono, memastikan, "Seluruh biaya rumah sakit ditanggung keluarga."

Rumah Soeharto yang Akan Datang

Nun di ketinggian 666 meter di atas laut, Soeharto sudah mendirikan rumahnya yang akan datang. Rumahnya itu nanti bernama Astana Giribangun. Inilah sebuah kompleks makam termuda leluhur dinasti Mataram Imogiri, Yogyakarta.

Astana Giribangun terletak di bawah Astana Mangadeg. Sedangkan Astana Mangadeg adalah tempat tertua di Karanganyar disusul Astana Girilayu, Astana Utara, Astana Giri, Astana Kablokan, Pesarean Mantenan, Pesarean Karangtengah, Pesarean Rangusongo, Pesarean Temuireng, Pesarean Ngendo Kerten, dan Astana Giribangun.

Di belakang atau sebelah selatan bukit Giribangun mengalir Kali Samin. Di depan pintu kompleks makam Giribangun yang selalu tertutup, terdapat dua pohon jambu mawar yang masing-masing berada di kanan-kiri pintu. "Mbak Mamiek (Siti Hutami Adiningsih, putri bungsu Soeharto) paling suka. Kalau pas berbuah, biasanya dikirim ke Jakarta," kata Paino, salah satu petugas makam.

Ini memang sebuah tempat yang teduh dan nyaman. Bahkan fasilitas di kompleks makam juga lengkap, mulai dari palereman atau bangunan khusus untuk menginap keluarga Soeharto hingga masjid. Pengurus dan pegawai Astana Giribangun juga secara berdedikasi memelihara kompleks tersebut. Kayu jati masih tampak mengkilap; sesekali dipelitur. Makam rajin dipoles, bunga peziarah selalu dibersihkan setiap pagi, dan karpet pun dicuci setiap minggu.

Semua siap di makam yang dibangun oleh 700 orang pekerja tanpa menggunakan traktor dan alat berat lainnya itu. Makam yang terletak sekitar 35 kilometer dari Solo itu dapat ditempuh dalam waktu sekitar sejam saja karena jalan menuju kompleks makam dari Matesih sangat mulus.

Astana Giribangun dibangun Yayasan Mangadeg, yayasan yang bertujuan membangun dan memperbaiki makam-makam leluhur, seperti makam Pangeran Samber Nyowo. Soeharto dan Hartinah masuk sebagai pendiri yayasan yang berdiri pada 28 Oktober 1969 itu. Dan sebenarnya makam di kompleks Giribangun tersebut digunakan untuk keluarga Yayasan Mangadeg, tidak terbatas hanya pihak keluarga Mangkunegaran.

Makam yang dibangun di atas bukit Giribangun itu-ketika dibangun, bukit dipapras-diresmikan pada Jumat Wage, 23 Juli 1976. Acara tersebut ditandai dengan dipindahkannya kerangka jenazah ayah dan ibu Hartinah, KRMTH Soemoharjomo dan KRA Soemoharjomo.

Bangunan utama makam terdiri dari bagian yang ditandai dengan trap-trap. Bagian pelataran bawah disebut Cungkup Argotuwuh. Siapa pun yang masuk ke area ini harus melepaskan alas kaki. Anggota keluarga Yayasan Mangadeg dapat dimakamkan di area

seluas 700 meter persegi ini. Trap selanjutnya adalah Argokembang dengan luas 600 meter persegi. Dan yang paling puncak adalah Argosari seluas 300 meter persegi.

Di Argosari inilah terletak makam utama keluarga Soeharto, yaitu di ruangan 80 meter persegi yang dikelilingi gebyok ukiran. Karpet empuk cokelat muda menghampar di ruangan ini. Seluruh bangunan didominasi kayu jati: mulai dari kayu untuk atap hingga tiang penyangga.

Pada bangunan utama itu, terdapat empat makam yang sudah lama terisi dan satu petak yang sengaja dikosongkan. Berurutan dari ujung paling timur terdapat makam kakak tertua Hartinah, Siti Hartini Oudang, kemudian ayah dan ibu Hartinah. Di ujung paling barat ada makam Hartinah. Nah, di antaranya itulah makam Soeharto. "Sudah dibuat liangnya sejak dulu, tapi diisi pasir dan ditutup marmer," kata Paino, salah satu pegawai makam, kepada Tempo.

Argosari memiliki emperan yang nantinya juga akan menjadi makam untuk anak-anak dan menantu Soeharto, yang semuanya sudah siap huni. "Tapi saya tidak tahu jumlahnya dan untuk siapa," kata Paino. Masih ada bagian dari Argosari yang juga digunakan untuk makam kerabat Hartinah. Beberapa di antaranya sudah terisi. Di Cungkup Argokembang tersedia 116 calon makam, sedangkan di Argotuwuh terdiri dari 156 calon makam.

Doa bagi keluarga Soeharto tak hanya berdengung saat ia sakit. Ini memang sesuatu yang rutin. Tapi tentu saja, begitu mendengar Soeharto masuk rumah sakit, Suparmi, warga Kelurahan Kalitan, Kecamatan Laweyan, Solo, termasuk salah seorang warga desa yang datang ke Astana Giribangun untuk mendoakan kesembuhan Soeharto. Suparmi hanya penduduk desa biasa, seperti halnya puluhan warga yang datang ke kompleks pemakaman keluarga Mangkunegaran di Desa Karangbangun, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu 21 Maret 2006. Dan ternyata tidak sekali atau dua kali saja perempuan 36 tahun itu secara sukarela ikut berdoa bersama untuk kesehatan Soeharto dan untuk almarhum istrinya, Siti Hartinah-biasanya setiap malam Senin Pon-baik di Kalitan maupun di Giribangun.

Sartono, 39 tahun, adalah warga Kalitan lainnya yang mengaku sering mendoakan Ibu Tien maupun Soeharto. Karena, menurut dia, pada zaman pemerintahan Soeharto, harga-harga murah, jalan-jalan jarang rusak, dan cari nafkah gampang. "Kami melakukannya dengan sukarela karena menginginkan beliau sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Yang di Atas," kata Sartono, yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit.

Warga di sekitar Astana Giribangun, terutama warga Kalitan-tempat tinggal keluarga Hartinah di Solo-memang rutin mendoakan Soeharto, terutama jika sakit. Di Giribangun sendiri, doa rutin dikumandangkan setiap usai salat magrib oleh para karyawan piket dan

tiga hari sekali selepas salat isya. Sedangkan pada hari pasaran Kliwon, sesuai dengan weton Soeharto, mereka juga melakukan doa bersama dengan tahlilan di depan makam Hartinah.

Doa-doa untuk Soeharto memang selalu akan dilantunkan dari Astana Giribangun, karena itu adalah tempat peristirahatan terakhir Soeharto. Di kompleks tersebut, tempat untuk jasad Soeharto sudah dipersiapkan sejak makam itu dibangun, pada Rabu Kliwon-sama dengan weton Soeharto-27 November 1974. Letaknya ada di antara pusara istrinya dan Raden Ayu Kanjeng Soemoharjomo, ibunda Hartinah. "Semuanya sudah ready, tinggal tunggu peluit saja," kata Sukirno, pengurus kantor Giribangun.

Giribangun memiliki dua area parkir. Satu yang cukup luas terdapat di kaki bukit dan dikitari kios-kios. Tapi, semenjak Soeharto lengser, Giribangun sepi sehingga para pedagang pun jarang berjualan. Satu lagi area parkir persis di samping kompleks makam.

Di salah satu sudut Argokembang, sebelah utara, terdapat ukiran Surat Yassin, pemberian seseorang dari Jepara. Di sudut lainnya terpampang tulisan berisi petikan Serat Wedatama, sebuah sastra Jawa klasik karya Mangkunegoro IV. Kutipannya:

Lila lamun kelangan nora gegetun Trimah yen ketaman saserik Sameng dumadi tri legawa nalangsa srahing bathara. (Ikhlas, jika kehilangan, tak akan menyesal Menerima dengan lapang jika mendapatkan kebencian dari sesama Berbesar hati dan menyerahkan segalanya kepada Yang Kuasa)

Petikan Serat Wedatama ini memang menunjukkan bahwa Giribangun adalah gerbang yang memisahkan Soeharto dari yang fana dengan keabadian.

Tanpa Muara di Jalan Hukum

Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin lalu terasa senyap. Hari itu, mestinya digelar sidang perdata perkara negara melawan Yayasan Supersemar dan mantan presiden Soeharto. Diperkirakan, ditambah dua kali sidang lagi, kasus itu bakal selesai. Tapi, apa daya, sehari sebelumnya Soeharto meninggal. "Kami minta diurus ahli waris secepatnya," kata hakim ketua Wahjono kepada tim jaksa pengacara negara dan para pengacara Soeharto.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dua yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila tergugat meninggal dunia, posisinya sebagai tergugat dapat digantikan oleh ahli warisnya. Namun, menyeret anak-anak penguasa Orde Baru yang berjumlah enam orang sebagai ahli waris tak gampang. "Pihak keluarga bisa menolak," kata Juan Felix Tampubolon, salah seorang anggota tim pengacara Soeharto.

Sidang di aula utama pengadilan itu pun ditunda sampai ada ahli waris yang diajukan. Persidangan tuntutan negara berupa ganti rugi Rp 185 miliar dan US$ 425 juta serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun itu menjadi tak keruan ujungnya. Bukan tidak mungkin, peradilan kasus perdata ini gagal diselesaikan seperti dalam kasus pidana Soeharto yang digelar pada 31 Agustus 2000.

Kasus hukum Soeharto memang cenderung menyusut. Ketika reformasi berputar pada 1998, semangat mengadili sang jenderal besar begitu berkobar. Dilandasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 11 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pemerintah berniat segera mengadili Soeharto. Kala itu, Jaksa Agung Andi M. Ghalib yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Investigasi Kekayaan Soeharto menjanjikan pengusutan penuh harapan.

Ia unjuk gigi dengan mengumumkan indikasi penyimpangan penggunaan dana di tujuh yayasan yang dipimpin Soeharto. Yayasan itu meliputi Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial, Dana Abadi Karya Bhakti, Dana Sejahtera Mandiri, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Kemanusiaan Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah, dan Yayasan Bantuan Beasiswa Yatim Piatu Tri Komando Rakyat. Dengan kekayaan mencapai Rp 4 triliun, dana tujuh yayasan itu justru mengucur ke bisnis keluarga Soeharto dan kroni.

Badan Pertanahan Nasional bahkan ikut menyetor daftar tanah Soeharto ke Kejaksaan Agung. Menurut Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional saat itu, Hasan Basri Durin, keluarga Cendana atas nama pribadi dan badan hukum menguasai 204 ribu hektare tanah bersertifikat. Bank Indonesia juga melaporkan rekening atas nama Soeharto di 72 bank dalam negeri dengan nilai deposito Rp 24 miliar, hampir semuanya disimpan di Bank BCA-ketika itu masih milik taipan Liem Swie Liong, kroni terdekat Soeharto.

Namun, harapan itu layu di tengah jalan. Jaksa Agung Andi M. Ghalib mengumumkan penyimpangan bukan pada Keputusan Presiden Soeharto, melainkan pada pelaksanaannya. Padahal, Kejaksaan baru dua kali memeriksa Soeharto dalam perkara yang masuk tahap penyidikan pada 9 Desember 1998 ini. Sejak itu juga Soeharto mulai sakit-sakitan. Perkara ini makin tak jelas setelah Jaksa Agung Ismudjoko menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) pada 8 Oktober 1999 setelah mendengar pendapat para pakar.

Saat itulah kemudian diusulkan pembentukan Komisi Negara untuk perkara Soeharto. "Komisi itu diperlukan agar perkara Soeharto tidak terkatung-katung," kata pengacara senior Adnan Buyung Nasution, salah satu pakar yang dimintai masukan. Namun, usulan ini tak berlanjut. Malahan, pada April 2000, Jaksa Agung Marzuki Darusman yang menggantikan Ismudjoko mencabut SP3 yang dikeluarkan pendahulunya.

Soeharto pun mulai diperiksa meskipun tim dokter kepresidenan dan tim dokter pribadi menyatakan Soeharto menderita kerusakan otak. Kala itu, tim Kejaksaan delapan kali mendatangi Cendana. Jawaban Soeharto hanya dua: tidak ingat dan tidak tahu. Walau begitu, tim Kejaksaan tetap melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Jakarta Selatan.

Tibalah agenda sidang yang menyedot ribuan warga masyarakat. Soeharto yang diminta hadir dalam sidang di aula Departemen Pertanian, Jakarta Selatan, tidak datang dengan alasan sakit. Ketua majelis hakim Lalu Mariyun memerintahkan terdakwa diobati sampai sembuh. Berkas perkara Soeharto pun tergeletak di Pengadilan Jakarta Selatan. Pada Mei 2006, kesehatan Soeharto kritis dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

Dimotori Partai Golkar, sejumlah tokoh politik menggagas pengampunan bagi presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut gagasan tersebut dan memerintahkan Kejaksaan Agung memberikan solusi keadilan dan kepastian hukum. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh-melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan-memilih menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan perkara (SKP3) pada 12 Mei 2006.

Kejaksaan tak bersedia mengadili Soeharto secara in absentia. "In absentia dilakukan jika terdakwa mangkir tanpa alasan sah," katanya. Selain itu, SKP3 dipilih karena sejumlah alasan. Selain menghormati kondisi Soeharto yang sakit, SKP3 bukan upaya pengampunan. "Perkara bisa dibuka kembali," Abdul Rahman menegaskan. Sampai kapan? "Sampai ditemukan alasan baru, misalnya dokter menyatakan Soeharto sembuh."

Pemberian SKP3 oleh Kejaksaan disusul gugatan perdata sebagai jalan mengembalikan kerugian negara. Mengacu kepada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gugatan perdata, kalaupun tersangkanya meninggal, perkara bisa dialihkan ke ahli warisnya. Langkah Jaksa Agung ini mengundang reaksi lembaga swadaya masyarakat dan para akademisi. Mereka menggugat ke Pengadilan Jakarta Selatan. Hakim Andi Samsan

Nganro menyatakan SKP3 tidak sah, tapi hakim pengadilan banding memenangkan Jaksa Agung.

Perkara Soeharto lain yang mencolok mata adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Nasional HAM periode 2002??2007 menangani lima perkara berat yang diduga melibatkan Soeharto. Kasus itu adalah Pulau Buru, penembakan misterius, peristiwa Tanjung Priok, kebijakan Daerah Operasi Militer di Aceh dan Papua, serta kasus 27 Juli. "Dalam kasus Pulau Buru, korbannya sangat spesifik, yakni mereka yang dituduh menjadi anggota Partai Komunis Indonesia," kata M.M. Billah, salah satu anggota Komnas HAM. Adapun tragedi Tanjung Priok, korbannya adalah kelompok Islam yang dianggap anti-Pancasila.

Tragisnya, berbagai dugaan pelanggaran ini bak pohon mati sebelum ditanam. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM 2002??2007, pengusutan pelanggaran HAM Soeharto menunggu terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Kasus itu terjadi sebelum Undang-Undang Dasar 45 diamendemen dan keluarnya Undang-Undang Peradilan HAM," katanya. Pada undang-undang tersebut diberlakukan asas larangan penerapan surut suatu undang-undang (retroaktif).

Peluang makin menguap setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada Desember 2006. "Selain bertentangan dengan konstitusi, undang-undang ini tidak memiliki konsistensi hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Keputusan tersebut dianggap melebihi tuntutan (ultra petita) karena pemohon dari kalangan LSM dan korban pelanggaran HAM hanya mengajukan pembatalan pasal yang mengatur pemberian kompensasi dan rehabilitasi korban. Itu pun jika permohonan amnesti mereka diterima presiden. "Pengungkapan masalah HAM berat di masa lalu kembali ke titik nol," kata Asmara Nababan, salah seorang pemohon yang juga anggota Komnas HAM, kesal.

Kini, Soeharto sudah meninggal. Menurut guru besar kriminologi Universitas Indonesia, Muhammad Mustofa, setelah ini kasus hukum Soeharto makin pelik. Penyelesaiannya-ia menunjukkan kuncinya-yaitu melalui pemulihan keadilan (restorative justice) untuk para korban kebijakan Soeharto. "Intinya ada perdamaian antara pelaku dan korban," katanya.

Ia menambahkan, itu bukan sekadar permintaan maaf seperti yang diucapkan Soeharto saat dipaksa meletakkan jabatannya pada 1998. Pemulihan keadilan itu harus pula diikuti kompensasi atas kerusakan dan kerugian yang diderita korban. Gagasan ini pernah diajukan ketika ada usulan pembentukan Komisi Negara pada 1999 tapi tak terwujud. Cara ini, kata Mustofa, perlu dilakukan karena hukum formal gagal menyelesaikan perkara Soeharto.

Catatan Kelam dari Gedung Putih

MEMO berklasifikasi sangat rahasia dan sensitif itu diumbar di Internet persis saat jasad Soeharto dikuburkan di Karanganyar. Isinya adalah transkrip perbincangan antara Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, dan Presiden Soeharto di Gedung Putih pada Mei 1970.

National Security Archive (NSA), lembaga penelitian di Universitas George Washington, yang memaparkan kabar tersebut. Bukan cuma dengan Nixon, disebutkan pula pertemuan Soeharto dengan sejumlah petinggi Amerika seperti Presiden Gerald Ford, Ronald Reagan, sampai George Bush. Di sana juga diungkapkan hubungan Washington dengan Soeharto dari 1966 hingga 1998.

Pandangan Amerika terhadap Soeharto saat dia mengawali kekuasaannya pada 1966 juga dibeberkan. Begitu pula perebutan Irian Barat 1969, penyerbuan ke Timor Timur 1975, serta kasus penembakan misterius sepanjang 1983-1984, tercatat secara detail.

Laporan itu dibuka berdasar akta kebebasan informasi (FOIA). Tujuannya adalah mengungkap korupsi dan kebijakan represi rezim Soeharto yang "direstui" Amerika. "Tidak sekali pun para Presiden AS pernah menggunakan pengaruh maksimumnya atas rezim (Soeharto-Red.)," kata Brad Simpson kepada AFP.

Brad adalah pimpinan proyek "Dokumentasi Arsip Indonesia/Timor-Timur" yang digarap NSA pada 2002. Lembaga ini mengumpulkannya dari National Archive (NARA) dan perpustakaan kepresidenan AS. Tebalnya sampai puluhan ribu halaman.

Salah satunya tertera dalam memo 26 Mei 1970. Di depan Nixon, Soeharto terang-terangan mengakui menumpas kekuatan Partai Komunis Indonesia. Puluhan ribu orang yang diduga anggota PKI diinterogasi dan ditahan. Presiden AS ke-37 itu meresponsnya dengan pernyataan dukungan.

Menurut NSA melalui situsnya, setelah dua hari kunjungan Soeharto ke Washington, Amerika berjanji menambah bantuan US$ 18 juta. Duit itu memungkinkan Indonesia membeli 15 ribu pucuk senapan M-16 guna mengganti senapan AK-47.

Memo lain mengungkap bagaimana rezim Soeharto memberikan berbagai konsesi kehutanan. Salah satunya, dalam memo 5 Desember 1972, diungkapkan upaya Weyerhaeuser mendapat konsesi kayu di Kalimantan. Perusahaan kayu Amerika itu mengirim surat keluhan ke Gedung Putih.

Di Indonesia, Weyerhaeuser harus membayar berbagai pungutan, baik ke militer maupun sipil di Indonesia kendati militer sudah mendapatkan bagian 35 persen saham. "Hal itu mengancam operasional perusahaan," ujar seorang pejabat perusahaan itu.

Memo lain pada 7 September 1973 mengungkap bagaimana Soeharto memberi konsesi kepada tiga perusahaan boneka milik keluarga dan kroninya. Padahal, pada saat yang sama perusahaan AS, International Paper Company, sedang merundingkan konsesi.

Namun, berita tak sedap ini ditanggapi dingin oleh Cendana. Koordinator kuasa hukum Soeharto, Otto Cornelis Kaligis, menganggap data itu tak akan menjadi berkas perkara hukum kliennya. "Dalam ranah hukum, dokumen itu tidak berlaku," ujarnya.

Jaksa Agung Hendarman Supandji sedang mempelajari data rahasia tersebut. Dokumen itu akan menjadi pertimbangan apakah masih bisa digunakan atau tidak dalam penyidikan. "Harus dilihat kedaluwarsanya. Kalau belum, ya, tentu kami tindaklanjuti," ujar Jaksa Agung.

Habis Manis Sepah Dibuang

Asvi Warman Adam
Ahli Peneliti Utama LIPI

APAKAH Soeharto terlibat dalam Gerakan 30 September? Yang pasti, Soeharto adalah orang yang paling diuntungkan dari kudeta tersebut (dan Presiden Sukarno yang sangat dirugikan). Pertemuannya dengan Kolonel Latief pada malam 30 September 1965, beberapa jam sebelum operasi militer itu dilaksanakan, menyebabkan sebagian penulis menganggap Soeharto sudah tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Namanya tidak termasuk dalam daftar perwira tinggi yang diculik. Kenyataan pula bahwa ia tidak melaporkan hal itu kepada atasannya seperti Jenderal Yani.

Keterlibatan Soeharto dalam kudeta yang terkesan "disengaja untuk gagal" diperlihatkan Subandrio dengan mengkaji peran para mantan anak buah Soeharto di Kodam Diponegoro. Ada trio untuk dikorbankan (Soeharto-Untung-Latief) dan ada trio yang dipakai untuk masa selanjutnya (Soeharto-Yoga Sugama, dan Ali Murtopo). Pandangan ini merupakan analisis post-factum yang dikeluarkan setelah peristiwa itu terjadi. Dengan melihat rangkaian kejadian itu, ditarik kesimpulan. Jadi, bukanlah sesuatu yang direncanakan secara mendetail dari awal sampai akhir.

Dari pengamatan ini terlihat bahwa proses pengambilan kekuasaan itu dilakukan secara bertahap, sehingga disebut creeping coup (kudeta merangkak). Yang merupakan paradoksal, lazimnya kudeta merupakan perebutan kekuasaan secara cepat dan tidak terduga. Namun, di sini ternyata itu dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap.

Kudeta merangkak adalah rangkaian kegiatan untuk mengambil kursi kepresidenan secara bertahap sejak 1 Oktober 1965 sampai 1966 (keluarnya Supersemar) atau 1967 (pejabat presiden) atau 1968 (menjadi presiden). Saskia Wieringa menamakan peristiwa tahun 1965 sebagai kup pertama dan tahun 1966 sebagai kup kedua. Peter Dale-Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap: pertama, Gerakan 30 September yang merupakan "kudeta gadungan"; kedua, tindakan balasan yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara massal; dan ketiga, pengikisan sisa-sisa kekuatan Soekarno.

Menurut Subandrio, kudeta merangkak Soeharto terdiri dari empat tahap. Tahap pertama, menyingkirkan pesaingnya di Angkatan Darat, seperti Yani dll. Tahap kedua, membubarkan PKI, yang merupakan rival terberat tentara sampai saat itu. Tahap ketiga, melemahkan kekuatan pendukung Bung Karno dengan menangkap 15 menteri yang loyal terhadap Soekarno, termasuk Subandrio. Tahap keempat, mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno (tahun 1967 sebagai pejabat presiden, dan tahun 1968 sebagai presiden).

Beberapa peristiwa dapat ditambahkan dalam tahapan yang disusun oleh Subandrio. Misalnya, pengembalian pasukan pengawal presiden Tjakrabirawa ke induk pasukan di daerah asal masing-masing pada akhir Maret 1966 dapat dimasukkan ke dalam tahap ketiga. Tjakrabirawa, yang terdiri dari 4 batalion dan satu detasemen (jadi sekitar 4.000-5.000 anggota pasukan), merupakan kekuatan pendukung Bung Karno.

Perlu dicatat bahwa upaya pengambilan kekuasaan memang dilakukan Soeharto secara serius. Supersemar bukan keluar secara mendadak atau bukan pula inisiatif spontan Jenderal Jusuf, Basuki Rahmad, dan Amir Machmud. Tanggal 9 Maret 1966, Soeharto melalui Jenderal Alamsyah telah mengutus dua penguasa yang dekat Bung Karno (Dasaat dan Hasyim Ning) ke Istana Bogor untuk membujuk beliau menyerahkan pemerintahan. Tidak dapat dibujuk, maka dilakukan penekanan terhadap Bung Karno, antara lain dengan demonstrasi besar-besaran mahasiswa tanggal 11 Maret 1966.

Ternyata kudeta merangkak itu bukan saja dilakukan oleh Soeharto dan kelompoknya, tetapi dilaksanakan berbarengan dengan apa yang saya sebut "kudeta merangkak" MPRS. MPRS berperan sangat besar secara yuridis untuk mengalihkan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Walaupun ironisnya, setelah kekuasaan itu diperoleh, MPRS pun "dimatikan" secara perlahan-lahan.

Uraian tentang kudeta merangkak ini tidak disebut dengan istilah demikian, namun diberikan secara gamblang oleh Prof Dr Suwoto Mulyosudarmo (alm) dalam disertasinya di Universitas Airlangga Surabaya tahun 1990 mengenai Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoretis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara. Tahap-tahap kudeta merangkak MPRS dilaksanakan secara berikut:

Pertama, Supersemar, yang dikeluarkan 11 Maret 1996, dikukuhkan menjadi Tap IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966. Menjadi pertanyaan, kenapa harus dikukuhkan dengan ketetapan MPRS? Kalau demikian, apakah segala tindakan yang diambil dengan menggunakan Supersemar itu termasuk pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966 tidak sah? Bukankah Presiden Soekarno sendiri sebetulnya menolak dan memarahi Soeharto mengenai kebijakan tersebut?

Kedua, tanggal 5 Juli 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966, yang berisi antara lain: a) Penetapan tidak perlunya jabatan wakil presiden, b) Apabila presiden berhalangan, pemegang SP 11 Maret 1966 memegang jabatan presiden.

Ketetapan MPRS ini jelas melanggar UUD 1945 karena di dalam UUD 1945 ditetapkan jabatan wakil presiden. UUD 1945 ini belum diamandemen. Jadi, ketetapan tersebut bersifat inkonstitusional. Kedua, apabila presiden berhalangan, maka wakil presiden yang menggantikannya, bukan pemegang SP 11 Maret. Lagi-lagi pasal ini melanggar UUD 1945.

Ketiga, tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan Pidato Pelengkap Nawaksara kepada Pimpinan MPRS. Pimpinan MPRS mengeluarkan Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967 tentang Penolakan Pidato Nawaksara. Keputusan MPRS berbeda dengan ketetapan MPRS karena keputusan MPRS itu hanya bersifat internal MPRS. Jadi, penolakan terhadap pidato Nawaksara itu hanya dilakukan oleh beberapa pimpinan MPRS, bukan hasil sidang paripurna lembaga itu.

Keempat, tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno/Mandataris MPRS mengeluarkan "Pengumuman tentang Penyerahan Kekuasaan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966". Penyerahan kekuasaan semacam ini tidak ada dasarnya dalam UUD 1945.

Penyerahan kekuasaan berarti mengalihkan kekuasaan dan tanggung jawab, yang secara teoretis harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi kekuasaan. Penyerahan kekuasaan itu berbeda dengan pengembalian mandat. Pengembalian mandat tidak membutuhkan persetujuan pemberi kuasa, sedangkan proses peralihan kekuasaan harus memperoleh persetujuan terlebih dulu dari pemberi kekuasaan.

Pemberi kekuasaan kepada presiden adalah MPRS. Jadi, kalau presiden, selaku mandataris MPRS, mengembalikan mandatnya kepada MPRS, ia tidak perlu meminta persetujuan dari MPRS. Tetapi, kalau presiden akan menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain, ia harus meminta persetujuan MPRS.

Ini yang tampaknya dicoba dikoreksi dengan Tap No. XXXIII/1967, yang dikeluarkan 20 hari kemudian. Waktu 20 hari itu sebetulnya dapat dikategorikan sebagai apa: kevakuman pemerintahan, atau ada pemerintahan tetapi tidak sah menurut konstitusi?

Kelima, tanggal 12 Maret 1967 MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Ketetapan ini mempunyai beberapa masalah. Pertama, mendiskreditkan Presiden Soekarno dengan mengaitkannya dengan percobaan kudeta Gerakan 30 September. Kedua, ayat-ayat dalam ketetapan ini bertentangan. Pasal 6 tap ini menyatakan "penyelesaian persoalan hukum menyangkut Dr Ir Soekarno akan dilakukan dengan ketentuan hukum, dan keadilan dan pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat presiden". Kalau mau diselesaikan secara hukum, tentu Soekarno harus diadili (niscaya beliau akan bebas karena tidak akan terbukti bersalah), jadi diproses melalui sidang pengadilan. Tetapi pelaksanaannya diserahkan pejabat presiden: ini yang kontradiktif dengan ketentuan yang pertama. (Kenyataan, sampai Bung Karno wafat tahun 1970, Presiden Soeharto membuat kasus ini mengambang tanpa keputusan hukum.)

Keenam, bersamaan dengan pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto selaku pemegang Supersemar diangkat sebagai "pejabat presiden". Lembaga

pejabat presiden adalah lembaga "ekstra-konstitusional" karena tidak dikenal dalam UUD 1945.

Ketujuh, tanggal 28 Februari 1968 muncul Pernyataan Pendapat DPRGR No. 12/DPRGR/III/1966-1967, yang isinya mendesak Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 untuk melakukan penyegaran keanggotaan MPRS dan mendesak agar Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Anggota MPRS yang loyal kepada Soekarno dikeluarkan dan diganti dengan pendukung Soeharto.

Kedelapan, tanggal 27 Maret 1968 Soeharto diangkat sebagai presiden sampai terpilihnya presiden hasil pemilihan umum.

Dalam sidang MPRS tahun 1966 ditetapkan sebetulnya pemilihan umum akan dilaksanakan pertengahan tahun 1968. Soeharto setelah terpilih jadi presiden langsung mengundurnya sampai tahun 1971.

Setelah Soeharto menjadi presiden, yang pertama dilakukannya adalah pergi ke Jepang untuk merundingkan utang luar negeri. Setelah itu, MPRS, yang telah "berjasa" menjadikannya sebagai presiden, mulai dimatikan secara perlahan-lahan. Lembaga ini dijadikan sebagai lembaga yang hanya bersidang sekali lima tahun. Kegiatan Badan Pekerja MPRS diboikot oleh Fraksi Golkar dan ABRI dengan tidak menghadiri sidang-sidangnya.

Jenderal Nasution dan juga Subchan ZE, yang sering berpidato di mana-mana dengan mengeluarkan pendapat atas nama pimpinan MPRS, dikritik pihak keamanan Orde Baru bahwa pernyataan itu tidak sah, karena suara MPRS haruslah dikeluarkan melalui sidang pleno. Setelah itu, memang MPRS tidak berfungsi lagi sampai terbentuknya MPR hasil pemilu.

Menjelang akhir tugasnya, Nasution dkk masih sempat menulis Laporan Pimpinan MPRS Tahun 1966-1972. Buku itu memuat kritik tajam terhadap berbagai kekurangan pada awal Orde Baru dan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan (misalnya otonomi daerah). Namun, laporan itu tidak boleh beredar dan konon kabarnya ribuan eksemplar dibakar oleh aparat keamanan. Untunglah ada beberapa eksemplar yang dapat diselamatkan, dan itulah yang diulas secara khusus oleh majalah Tempo edisi 22-28 Juli 2002.

Nasution telah berjasa mengantarkan Soeharto ke kursi kepresidenan, namun setelah itu ia disingkirkan. Habis manis, sepah dibuang. Tujuan menghalalkan segala cara. "Kudeta merangkak" MPRS adalah kisah tragis dan ironis tentang ketatanegaraan di Indonesia. Hukum dimanfaatkan untuk melegitimasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu sendiri berada di atas hukum.

Madu dan Racun, Sepuluh Tahun Lalu

Cendana, Setelah Keputusan Itu... Di akhir kekuasaannya, ia gamang. Prabowo dianggap mengkhianati Cendana.

Kamis, 21 Mei 1998. Raungan sirene itu menghentikan kegiatan belasan orang yang sejak siang berkumpul di ruang keluarga rumah Jalan Cendana 8, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa mobil masuk ke halaman dan seperti diberi aba-aba, para penghuni rumah serentak berdiri. Dari mobil Mercedes Benz hitam itu keluar Soeharto, tokoh yang dinanti-nanti. Bersafari lengan pendek biru gelap, wajah jenderal besar itu muram dan pucat. Ia berjalan diiringi putri sulungnya, Siti Hardijanti Rukmana, dan mantan Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursjid,

Sampai di ruang tamu, ia mengangkat kedua tangan. "Allahu Akbar. Lepas sudah beban yang terpikul di pundak saya selama berpuluh tahun," katanya. Ruangan senyap. Sesekali terdengar isak tangis dua putri Soeharto, Siti Hedijati (Titiek) dan Siti Hutami Adiningsih (Mamiek).

Satu per satu, anak, menantu, cucu dan kerabat lainnya menyalami, memeluk dan mencium tangan Soeharto. Di belakang menyusul teman keluarga, ajudan, pengawal, sopir, dan pembantu. Hari itu rumah dibekap kesedihan. "Sulit melupakan peristiwa itu. Itulah saat pertama Bapak pulang sebagai warga negara biasa," kata Tutut mengenang. Sejak Kamis pagi 21 Mei 1998, Soeharto bukan lagi presiden. Di Credentials Room, Istana Merdeka, ia menyampaikan pidato pengunduran diri setelah 32 tahun berkuasa. Pidatonya ringkas, disiarkan secara nasional dan mendapat perhatian seluruh dunia.

Soeharto terlihat rileks. "Ini adalah sejarah. Saya memutuskan mundur supaya tak jatuh korban lagi," kata Soeharto membuka percakapan. Menurut dia, jika ia tetap berkukuh, situasinya kian keruh dan akan jatuh korban. "Jelek-jelek, saya dulu naik karena didukung mahasiswa," katanya. "Sekarang sudah jatuh korban mahasiswa. Saya nggak mau ada korban lagi."

I I I

GELOMBANG demonstrasi mahasiswa berujung tragedi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Jakarta menyala. Kerusuhan, pembakaran, penjarahan. Orang-orang mengheningkan cipta. Ibu Pertiwi hamil tua.

Soeharto bagai duduk di atas bara: ia mempersingkat kunjungannya ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT Nonblok. Dari jauh ia menerima kabar: aparat tak berhasil meredam kerusuhan. Tutut mengurungkan kepergiannya ke Boston, Amerika Serikat, menghadiri wisuda putrinya. Ia memantau keadaan. "Bapak terus menerima laporan dari berbagai pihak," kata Tutut. Satu jam setelah mendarat di Jakarta, Jumat 15 Mei 1998, Soeharto

disambut cerita putra-putri dan adik tirinya, Probosutedjo, tentang Jakarta yang remuk redam. Laporan komplet dari Wakil Presiden B.J. Habibie, para menteri bidang polkam, Panglima ABRI, Kejaksaan Agung, dan Kabakin diterima Soeharto beberapa jam kemudian. Ketika itu dengan tegas Soeharto membantah kalau dia akan mundur.

Sejak hari itu, penjagaan di Cendana diperketat. Di luar, berbagai kelompok masyarakat termasuk pimpinan MPR/DPR mendesak Soeharto hengkang dari kursi kepresidenan. Sejumlah tokoh seperti Nurcholish Madjid, Amien Rais, Malik Fadjar menggodok konsep reformasi. Tekanan politik tak bisa dielakkan ketika mahasiswa menguasai gedung MPR/DPR seraya mendesak pimpinan lembaga itu menggelar Sidang Istimewa.

III

KELUARGA Soeharto sesungguhnya tak tinggal diam. Menantu Soeharto yang juga Pangkostrad, Prabowo Subianto, menceritakan pembicaraannya dengan Panglima ABRI Jenderal Wiranto saat bertemu di Cendana, Senin 18 Mei 1998 malam. Wiranto mengatakan, anak-anak Soeharto ingin melakukan perlawanan, tapi Prabowo ragu. "Bagaimana bisa? " katanya dalam Buku Putih Prabowo, 1999. Hari itu, Amien Rais mengeluarkan seruan menggelar aksi 20 Mei di Monas. Menurut Prabowo, mencegah protes akan mengakibatkan korban jatuh.

Sejumlah kawan karib anak Cendana menawarkan agar Tutut dan Bambang Trihatmodjo, dua anak Soeharto yang menjadi pengurus Golkar, melobi fraksi-fraksi di DPR dan MPR, namun Tutut skeptis. "Lo percuma. Pimpinannya saja sudah bersikap begitu," kata Tutut seperti ditirukan salah satu sahabatnya.

Sebenarnya upaya pendekatan ke fraksi-fraksi DPR dan MPR juga sudah dilakukan. Saat pertemuan digelar di Cendana, malam itu Probo meminta bantuan tokoh Golkar, AA Baramuli. Tapi Baramuli mengaku tak bisa menolong karena para politisi itu sudah berubah sikap.

Malam itu, Soeharto bertemu dengan Nurcholish Madjid di Cendana. Menurut Nurcholish, ia menyampaikan gagasan reformasi termasuk mendesak Soeharto mundur serta menggelar pemilu yang dipercepat. Namun, Soeharto minta bertemu sejumlah tokoh esok harinya.

III

TAK ingin Jakarta lebih remuk, Soeharto berniat membentuk Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional (Pangkopkkn), lembaga semacam Kopkamtib. Rencana itu disampaikannya Sabtu pagi, 16 Mei 1998, kepada Wiranto, Saadilah Mursjid, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo H.S. Rencananya, kata Subagyo, peresmian lembaga ini akan dilakukan Senin 18 Mei. Subagyo ditunjuk sebagai wakil,

Wiranto sebagai panglima. Tapi semuanya berubah ketika Subagyo diminta merapat ke Cendana, Minggu petang, untuk sebuah pertemuan empat mata.

Kepada mantan pengawalnya itu, Soeharto menanyakan peta situasi pengamanan pascakerusuhan. "Menurut isu, ada dua kelompok. Kelompok Pak Wiranto dan kelompok Prabowo. Sedangkan saya di tengah-tengah. Kondisi keamanan secara umum membaik," kata Subagyo.

Belakangan, Soeharto menawari Subagyo jabatan Pangkopkamtib, namun Subagyo menolak. " Sejak awal sudah disepakati, posisi Pangkopkamtib dijabat Panglima ABRI, sedangkan Wakil Pangkopkamtib oleh KSAD," kata Subagyo dalam biografinya, KSAD dari Piyungan, Jakarta 2004 . Mendengar jawaban itu, Soeharto meminta ajudannya, Kolonel (Pol.) Sutanto-kini Kepala Polri-mengirimkan pembatalan undangan pelantikan Pangkopkkn yang rencananya digelar 18 Mei. Perubahan sikap Soeharto itu, menurut salah satu kerabat Cendana, disebabkan oleh keraguannya atas loyalitas Wiranto dan Prabowo. Lama terdengar kabar kedua jenderal bersaing pengaruh.

Tersebutlah sebuah pernyataan pers yang mengatasnamakan Mabes ABRI yang menyebutkan ABRI mendukung sikap Nahdlatul Ulama yang meminta Soeharto turun. Salinan pernyataan itu diantar Prabowo kepada mertuanya. "Ini artinya militer meminta Bapak turun," katanya. Soeharto tak langsung percaya. Prabowo diminta mengecek soal itu ke KSAD. Sebaliknya, secara diam-diam, menurut seorang kerabat Cendana, Soeharto juga mengutus putranya, Bambang Trihatmodjo untuk mengkonfirmasikan soal ini ke Wiranto. Bambang memang dikenal dekat dengan Wiranto. Prabowo yang malam ini membawa Subagyo ke Cendana malah mengusulkan agar Wiranto digantikan Subagyo saja. Mendengar usul itu, Soeharto tersenyum datar.

Minggu subuh, Wiranto menemui Soeharto di Cendana dan mengklarifikasi masalah ini. Ia meminta Soeharto memecatnya jika tak percaya lagi. Soeharto menggeleng. "Teruskan saja tugasmu," katanya.

Sebetulnya, desakan tentang penggantian Wiranto juga pernah disampaikan Prabowo kepada Tutut ketika mahasiswa mulai menguasai DPR. Saat itu, Tutut mempertanyakan, apa yang harus dilakukan mengatasi keadaan? Prabowo menyarankan, Pak Harto mengganti Wiranto dan membuat dekrit darurat. Namun, Tutut mengatakan, ayahnya tak mau melakukan saran itu. Karena itu, jalan lain, menurut Prabowo, adalah Soeharto mundur. Tutut bertanya, apa yang terjadi kalau ayahnya turun. "Sesuai konstitusi, Habibie menjadi presiden," jawab Prabowo.

III

DI Istana Negara, saat bertemu dengan sembilan tokoh reformasi, Soeharto mengatakan siap mundur. "Hanya, apakah dengan mundur keadaan bisa diatasi?" Dari pertemuan itu, Soeharto memutuskan membentuk komite reformasi, merombak kabinet,

dan melakukan pemilu secepatnya. Ia menegaskan tak mau dicalonkan sebagai presiden. "Saya sudah kapok."

Di ruangan lain di Istana, sambil menunggu pertemuan Soeharto dengan sembilan tokoh, sejumlah orang berkumpul. Tampak hadir Prabowo Subianto, Mendagri R. Hartono, KSAD Subagyo, Panglima ABRI Wiranto, Probosutedjo, dan Tutut. Probo lalu bertanya kepada Wiranto, kenapa mahasiswa malah digerakkan ke Senayan. "Mereka kan tambah kuat dan seenaknya. Disuplai makanan lagi, " kata Probo. Wiranto menjawab, kalau tidak dikumpulkan, mereka bisa melakukan kekerasan di jalanan dan itu membuat situasi tambah kacau.

Tekanan massa dan mahasiswa tak bisa dibendung lagi. Gedung DPR seperti pasar malam: orang-orang berteriak, berpidato, memanjat atap gedung. Pimpinan MPR/DPR, yang biasanya tak bergigi, mendadak berubah haluan: mereka ikut mendesak Soeharto mundur dan meminta waktu bertemu Presiden. Tapi Soeharto sibuk menyusun daftar komite reformasi. Ada 45 orang yang disiapkan: politisi, rektor, agamawan, cendekiawan.

Dalam pertemuan keluarga malam itu, Tutut menanyakan perkembangan terakhir. Menurut Prabowo, ia sempat melaporkan situasi terakhir. Desakan agar Soeharto mundur tak tertahankan. Saat itu, Soeharto juga mengatakan akan mundur setelah kabinet reformasi dan komite reformasi terbentuk. Pertanyaannya, siapa yang akan menggantikannya. Sesuai UUD, memang Habibie. "Tapi Habibie tak akan sanggup memegang kekuasaan dan akan terjadi chaos. Jika sudah begitu, tentara bisa mengambil alih," ujar Soeharto.

Seorang kerabat keluarga itu mengatakan, malam itu Soeharto menyampaikan keraguannya jika wakil presiden bisa mengatasi keadaan. "Pak Harto sebenarnya meragukan kemampuan Habibie," ujar sumber itu. Soeharto menyadari posisinya di tubir jurang. Rabu 20 Mei menjelang malam ia menyampaikan kepada Habibie rencananya berhenti pada 23 Mei. Namun, sesudah Habibie pulang, Soeharto harus menemui fakta banyak tokoh menolak bergabung dalam komite yang ditawarkannya.

Yang membuat jenderal besar itu terpukul, 14 menteri dari kabinetnya mengirimkan surat pengunduran diri. Padahal, mayoritas dari mereka sebenarnya sudah diminta duduk lagi dalam kabinet reformasi. Soeharto tak punya pilihan.

Malam itu, ketika konsep pidato pengunduran dirinya disusun, Soeharto mengumpulkan anak-anak dan kerabat. "Apa pun risikonya, saya akan pertanggungjawabkan," katanya. Saat itu, Probo menanyakan siapa yang bakal jadi pengganti. Soeharto menjawab, "Habibie sudah mengatakan bersedia menjadi presiden". Probo tak percaya. "Yakin dia sanggup, Mas?" Soeharto tersenyum datar. "Ya, sanggup. Mudah-mudahan."

Sesaat ruangan itu senyap. Salah satu kerabat bercerita, saat itu Bambang Tri sempat bertanya, "Kenapa tidak tanggal 23 Mei saja? Bukankah sudah diputuskan hari itu?" Soeharto diam saja. Malah Tutut yang menjawab. "Mau lusa atau besok, toh sama saja. Bapak memang harus mundur." Hening. Sayup-sayup terdengar isak Titiek dan Mamiek. Seseorang menyentil: situasi ini disebabkan aparat membiarkan mahasiswa menguasai DPR.

Tak berapa lama, Prabowo masuk. Belum lagi ia duduk, Mamiek bangkit seraya menudingkan telunjuk. "Pengkhianat! Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi! Keluar!" Malam itu, Prabowo mengaku sebenarnya enggan keluar. Ia melihat Titiek, istrinya, menangis. Tapi bertahan di ruangan itu dianggapnya tidak menyelesaikan masalah.

I I I

SUDAH lama terdengar hubungan Soeharto dan anak-anaknya dengan Prabowo tak harmonis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, semua anak Soeharto dendam kepada Bowo. "Cuma Sigit yang agak netral," kata Sumitro dalam Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, 2000.

Soeharto memendam syak wasangka bahwa Prabowo dan Habibie sedang menggalang persekongkolan untuk menumbangkannya. Salah satunya adalah soal kedekatan Bowo dengan sejumlah tokoh yang saat itu menjadi lawan politik Soeharto. Dari istrinya, Prabowo mengetahui ia dianggap pengkhianat setelah bertemu Amien Rais, Gus Dur, dan Habibie.

Tapi Prabowo punya pandangan lain soal mengapa ia dibenci. Menurut dia, selama ini ia selalu mengatakan keadaan semakin memburuk jika Soeharto bertanya tentang kondisi keamanan. "Pak Harto mulai tak suka kepada saya. Ia berbicara serius dengan semuanya, kecuali saya. Saya sama sekali tak dihiraukan," kata Prabowo dalam buku putihnya, Maret 2000.

Dua hari sebelum Soeharto lengser, Prabowo memang terlibat pertengkaran sengit dengan Tutut dan Mamiek. Keduanya menggugat Bowo yang tidak optimal membela Soeharto. "Kamu ke mana saja? Mengapa kamu membiarkan mahasiswa menduduki DPR?" Prabowo dengan sengit balik membalas." Apakah saya harus menembaki mereka? Ini sama saja bikin chaos."

I I I

UPACARA serah-terima jabatan itu berlangsung singkat. Selesai berpidato, Soeharto berdiri menunggu hakim agung mengambil sumpah B.J. Habibie. Begitu selesai, Soeharto menyalami Habibie, juga para hakim agung yang hadir. Tak sepatah kata pun terucap, ia langsung balik badan menuju Ruang Jepara tempat menunggu pimpinan MPR/DPR.

Syarwan Hamid, salah satu Wakil Ketua DPR waktu itu, melukiskan Soeharto hanya bicara semenit. Berdiri setengah membungkuk dengan tangan bersilang di perut, mantan

penguasa itu berpamitan. "Saudara-saudara, saya tak menjadi presiden lagi. Tadi sudah saya umumkan kepada rakyat. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, Habibie sudah mengucapkan sumpah di depan MA. Saya harap MPR dan DPR bisa menjaga bangsa ini. Terima kasih," kata Soeharto. Ketua MPR/DPR Harmoko dan wakilnya, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, Ismail Hassan Metareum, serta Syarwan Hamid hanya mengangguk.

Soeharto keluar ruangan. Menggamit lengan Tutut, mantan presiden itu menuruni tangga Istana. Menyunggingkan senyum tipis, ia melambaikan tangan kepada juru foto. Sesaat kemudian, dikawal pengamanan ketat ia melesat kembali ke Cendana.

Itulah pertemuan terakhir Soeharto dengan bekas anak buahnya. Setelah lengser, meski masih banyak petinggi militer dan para pejabat yang datang menjenguk, Soeharto memilih menarik diri. Satu-satunya saat ia menerima tamu adalah ketika Lebaran dan perayaan ulang tahunnya. Tapi pernah, sehari setelah lengser, sejumlah orang datang dan meminta Soeharto menengahi konflik di tubuh ABRI, tapi Soeharto tak mau. "Lho kalian yang menginginkan seperti ini. Kenapa harus meminta saya lagi?" kata Soeharto seperti ditirukan seorang petinggi militer.

Probosoetedjo juga emoh ketika Nurcholish Madjid menitipkan pesan padanya. Saat itu Cak Nur meminta Soeharto mengingatkan Habibie bahwa posisinya sebagai pejabat presiden hanya sementara. "Jangan sampai dia menganggap dirinya sebagai presiden definitif," kata Cak Nur seperti ditirukan Probo. Namun, Probo menggeleng. "Nggak ah. Saya tak mau berhubungan dengan orang itu," kata Probo. Belakangan, keluarga ini memilih menutup diri. Apalagi rumah mereka belakangan dibanjiri demonstran yang menuding Soeharto korupsi. "Semua keluarga terganggu," ujar Tutut.

Agaknya, karena itu pula, Juli 1998, dua bulan setelah lengser, Soeharto mengumpulkan keluarganya di Puri Retno, Anyer, Banten. Seusai makan malam di pinggir pantai, Soeharto minta anak-anak, menantu, dan cucu menerima kondisi pahit ini dan tabah melaluinya.

Menurut dia, ini adalah konsekuensi dari keputusannya untuk mundur. Dan begitu mundur, hujatan bukannya reda, justru malah bertubi-tubi. Karenanya, ia minta anak-anaknya tak bereaksi. Katanya, "Biarlah sejarah yang mencatat, dengan hati bersih saya sudah memimpin dan memajukan negeri ini. Kalau masih ada hujatan, mari diterima dengan ikhlas. Mudah-mudahan, ini mengurangi beban saya di akhirat."

Kelompok 14 dari Taman Surapati

MENJELANG isya, surat itu tiba di kediaman Presiden Soeharto, Jalan Cendana 10, Jakarta. Adalah ajudan presiden, Kolonel Sumardjono, yang menerimanya dari utusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita.

Rabu, 20 Mei 1998, langit Jakarta kusut masai. Ratusan ribu warga dan mahasiswa menyemut di depan gedung DPR, Senayan, menuntut Soeharto turun dari kekuasaannya. Di Cendana, Soeharto punya firasat tak enak. Surat dari Ginandjar itu tak langsung dibuka, melainkan dibawanya masuk kamar. Tak lama kemudian, jenderal besar itu keluar dengan raut sekusut kertas diremas.

Pesan dari Ginandjar itu memang tidak biasa. Terdiri dari dua lembar, surat itu ditandatangani 14 menteri yang diurutkan sesuai dengan abjad: Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S. Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, Tanri Abeng

Isinya membuat Soeharto terkesiap. Pada alinea pertama, para menteri meminta Soeharto mundur-meski dengan bahasa yang dihaluskan. "Kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari satu minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada Selasa, 19 Mei 1998," begitu petikan surat tersebut. Sehari sebelum rapat di parlemen, pemimpin DPR meminta Soeharto mundur "secara arif dan bijaksana".

Keempat belas pembantu Presiden yang baru menjabat dua bulan itu juga menolak bergabung dalam kabinet baru hasil reshuffle. Saat itu, Soeharto memang berencana merombak kabinetnya dengan membentuk Kabinet Reformasi.

Menurut Probosutedjo, adik tiri Soeharto, yang saat itu berada di Cendana, sang kakak terlihat gugup setelah membaca pesan itu. Ia tak menyangka menerima surat itu, kata Probo. Sehari sebelumnya, penguasa Orde Baru itu masih berbincang dengan Ginandjar untuk membahas susunan kabinet baru. Ginandjar bahkan mengusulkan beberapa nama menteri yang perlu diganti dicopot dan menyebutkan penggantinya. "Pak Harto memutuskan mundur setelah membaca surat itu," kata Probo beberapa hari setelah Soeharto meletakkan kekuasaannya, 21 Mei 1998.

Bagaimana surat itu disusun? Menurut Theo Sambuaga, surat itu dibuat di ruang rapat kecil gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di kawasan

Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat. Di gedung ini pula Ginandjar berkantor sebagai Ketua Bappenas merangkap menteri koordinator.

Awalnya, Ginandjar mengundang para menteri bidang ekonomi melakukan rapat koordinasi. Ada 15 menteri yang hadir: Ginandjar, Akbar, Hendropriyono, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro, Rachmadi, Rahardi, Subiakto, Sanyoto, Sumahadi, Theo Sambuaga, Tanri Abeng, dan Ary Mardjono. Hadir pula Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin.

Tiga menteri absen. Menteri Keuangan Fuad Bawazier tak ada kabar, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Bob Hassan mengaku tidak bisa datang karena penjagaan tentara di Jakarta yang berlapis-lapis. Adapun Menteri Lingkungan Hidup Juwono Sudarsono sedang sakit.

Dalam rapat, para menteri melaporkan terus memburuknya perekonomian. Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, misalnya, melaporkan berkurangnya cadangan bahan bakar minyak. "Rapat menyimpulkan perekonomian terus merosot," kata Theo, yang saat ini Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Tempo. Ginandjar, menurut Tanri Abeng, lalu meminta para menteri ekonomi memusatkan perhatian lebih dulu pada situasi politik. "Juga bagaimana mengontrolnya," ujarnya.

Sesaat sebelum menutup rapat pada setengah tiga siang, Ginandjar meminta para menteri tak pulang dulu. Ia mengajak mereka bertemu lagi di ruang rapat kecil, tanpa dihadiri pejabat di bawahnya. "Kami bicara dari hati ke hati," kata Theo. "Pertemuan hanya diikuti para menteri karena itu diskusi informal."

Para menteri itu lalu membahas perkembangan politik. Sesekali, mereka memelototi layar televisi di ruangan itu yang sedang menayangkan situasi di gedung DPR. Dua hari sebelum rapat itu digelar, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat, Harmoko, terang-terangan meminta Soeharto mundur. Suasana tegang. Beberapa menteri berdiri sambil menarik napas panjang. Menjelang sore, semua sepakat posisi Soeharto seperti di tubir jurang. Menurut Theo, tak ada perdebatan dalam pertemuan itu. Sebagian besar sepakat Presiden sebaiknya menuruti permintaan rakyat, yakni mundur dari jabatannya.

Para pembantu itu lalu merumuskan sikap. Semula digagas untuk membuat pernyataan mundur dari kabinet. Namun, kata Theo, peserta pertemuan menganggap sikap itu tidak tepat. Menjelang magrib, disepakati bahwa mereka hanya menyatakan menolak bergabung dalam Kabinet Reformasi yang sedianya akan diumumkan Presiden esok harinya.

Setelah kesepakatan tercapai, rapat diskors. Ginandjar mengaku meminta Akbar Tandjung membuat konsep surat ke Soeharto. "Konsep surat yang sudah selesai lalu dibacakan. Setelah disepakati, baru ditandatangani," katanya.

Dari 15 menteri plus Gubernur BI yang hadir, 14 menteri menandatangani kertas itu sesuai dengan urutan abjad. Syahril menolak meneken karena menganggap Gubernur BI adalah posisi independen. "Siapa pun presidennya, Pak Syahril akan tetap pada jabatannya," kata Theo lagi.

Satu lagi yang menolak adalah Ary Mardjono, orang yang dikenal dekat dengan keluarga Cendana. Masih menurut Theo, Sekretaris Jenderal Golongan Karya itu merasa mengkhianati Soeharto bila ikut menolak bergabung dalam kabinet baru. "Tapi Pak Ary diam saja selama pertemuan, ia hanya berbisik-bisik dengan saya," kata Theo.

Menurut Tanri Abeng, Ary menolak tanda tangan karena ingin berkonsultasi dulu dengan sejumlah partai. Tanri sendiri mengaku ikut tanda tangan karena Soeharto tak lagi bisa efektif sebagai presiden. "Dengan demikian, kami juga tak bisa lagi bekerja," katanya.

Suara mencibir datang dari Fuad Bawazier. Katanya, para menteri yang menandatangani surat itu hanya mencari selamat. "Biar mereka bisa terpilih di kabinet berikutnya." Tanri sendiri tak menjawab tegas. "Saya bukan politisi. Sampai saat ini saya tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi," kata pria yang kini menjadi Komisaris Utama PT Telkom itu. Theo juga tak merasa mengkhianati Soeharto. "Kami tak memukul dari belakang. Pak Ginandjar waktu itu bilang bahwa pertemuan itu hanya diikuti pribadi-pribadi," kata Theo.

Apa pun, surat itu akhirnya diteken. Semula mereka berencana menyampaikan hasil pertemuan itu langsung kepada Soeharto. Namun, akhirnya diputuskan untuk menyampaikannya melalui surat.

Menurut Theo, Ginandjar dan Akbar ditunjuk sebagai wakil. "Mereka berdua menteri paling senior dalam pertemuan itu," katanya. Namun, kepada Tempo, Akbar mengaku tak pergi ke Cendana mengantar surat itu. "Saya tak pernah mengantar surat itu ke Cendana," kata bekas Ketua Umum Partai Golkar itu. Adapun Ginandjar mengakui mengirim orang untuk mengantar surat bersejarah itu. Yang jelas, para peserta pertemuan meninggalkan Bappenas selepas magrib.

Tanri bercerita, sekitar pukul 8 malam ia ditelepon Wakil Presiden B.J. Habibie yang memintanya datang ke rumah dinas Wakil Presiden di Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Di sana, sejumlah menteri yang lain sudah hadir, di antaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Feisal Tanjung dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Haryono Suyono. Menurut Theo, Habibie lalu menjelaskan hasil pertemuannya dengan Soeharto, beberapa jam sebelumnya.

Di situ Habibie bercerita bahwa Soeharto telah memutuskan membentuk Komite Reformasi dan merombak kabinetnya. Soeharto, kata dia, juga berencana mempercepat pemilu. Dalam pemilihan itu, Soeharto menyatakan tak akan mencalonkan diri lagi.

Namun, menjelang tengah malam, Habibie menerima telepon dari Saadilah Mursyid. Menteri Sekretaris Negara itu memberitahukan bahwa Soeharto memutuskan untuk mundur. Saadilah juga menyampaikan pesan Soeharto agar Habibie bersiap diambil sumpahnya sebagai presiden.

Theo menuturkan, para menteri yang hadir di Patra Kuningan langsung memberi selamat kepada mantan Menteri Riset dan Teknologi itu.

Soeharto merasa ditinggalkan oleh para menterinya. Dalam tulisan yang dimuat di situs Internet Soehartocenter.com, "Deklarasi Surapati" disebut sebagai bagian dari pengkhianatan beberapa menteri yang dibesarkan Soeharto. Habibie juga dianggap ikut bertanggung jawab dalam peristiwa itu.

Beberapa mantan menteri mencoba menjalin silaturahmi lagi dengan keluarga Cendana. Akbar, misalnya, datang ke rumah Soeharto, saat Lebaran. Theo juga selalu datang ketika Lebaran dan saat Soeharto sakit. Tak jelas bagaimana sikap Soeharto terhadap kunjungan tersebut. Boleh jadi, di matanya, ke-14 menteri adalah Brutus yang menikam pada hari terakhir ia berkuasa.

Di Ujung Kekuasaan Soeharto

Awal dan akhir kekuasaan Soeharto ditandai dengan dua hal: kecemasan dan darah. Demonstrasi besar-besaran, penembakan mahasiswa, dan aksi massa yang memakan korban terjadi sesaat sebelum Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, 1996.

Hal yang sama terjadi ketika ia dipaksa turun dari jabatannya. Di ujung 32 tahun pemerintahannya, keadaan ekonomi negara juga hancur. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terjerembap sangat cepat.

Terjungkalnya Rupiah

2/1/1998	5985
8/1/1998	10676.8
14/1/1998	7287.2
23/1/1998	14555
28/1/1998	11041.8
3/2/1998	10011.2
10/2/1998	7287.9
16/2/1998	9699.3
19/2/1998	8566.5
23/2/1998	9429.5
27/2/1998	8569.5

10/3/1998 10477.8 SU MPR menerima pidato pertanggungjawaban Soeharto periode 1993-1998.

25/3/1998	8290.8
13/4/1998	7375.3 Kerusuhan massal pecah di sekitar kampus Universitas Trisakti
5/5/1998	8042.4
9/5/1998	12281.4
19/5/1998	12281.4 Soeharto bertemu sejumlah ulama dan tokoh masyarakat, di istana.
26/5/1998	10165.5
29/5/1998	11117.7

Akhir Kekuasaan

Penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti dan kerusuhan massal setelahnya memicu kejatuhan Soeharto. Namun, berbagai rentetan peristiwa sebelumnya juga menunjukkan "tanda-tanda" pudarnya pengaruh sang jenderal besar itu.

1997 Juli

Krisis ekonomi mulai menghantam Indonesia. Ditandai dengan nilai tukar rupiah yang terus merosot.

Aksi demonstrasi besar-besaran mulai muncul di kampus Institut Teknologi Bandung. Mereka menyuarakan reformasi. Aksi ini menjalar ke seluruh Indonesia. Mereka mencoba keluar dari kampus, sesuatu yang dilarang saat itu. Bentrokan mahasiswa dengan aparat keamanan pun terjadi di mana-mana.

1998 Februari-Maret

Sejumlah aktivis demokrasi diculik selama berhari-hari. Penculikan ini diyakini sebagai usaha meredam gerakan mereka. Belakangan diketahui penculikan dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus, yang saat itu dipimpin Komandan Jenderal Mayjen Prabowo Subianto.

Mereka yang diculik adalah Nezar Patria, Andi Arif, Desmon J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, Herman Hendrawan, Rahardjo Waluyo Djati, Faisal Riza, dan Mugianto. Sebagian di antara mereka tak ketahuan nasibnya hingga kini.

10 Maret

Sidang Umum MPR menyatakan menerima pidato pertanggungjawaban Soeharto sebagai presiden periode 1993-1998. Pada saat yang sama, para mahasiswa menggelar "Sidang Umum Tandingan" yang menyatakan menolak pidato pertanggungjawaban presiden.

11 Maret

MPR memilih kembali Soeharto sebagai presiden. Ini adalah periode ketujuh pemerintahannya, dan kali ini ia didampingi Wakil Presiden B.J. Habibie.

14 Maret

Presiden Soeharto mengumumkan Kabinet Pembangunan VII. Kabinet ini disorot karena menyertakan putri Presiden, Siti Hardijanti (Tutut), sebagai Menteri Sosial, dan salah satu kroninya, Bob Hasan, sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

12 Mei

Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam unjuk rasa di kampus itu. Mereka adalah Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hertanto, dan Hendriawan Sie.

13 Mei

Kerusuhan massal pecah di sekitar kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Presiden Soeharto, yang sedang melawat ke Kairo, Mesir, mengatakan siap mundur secara konstitusional bila rakyat menghendaki. Ia menyatakan akan "mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan keluarga, anak-anak, serta cucu-cucu".

14 Mei

Kerusuhan meluas di Jakarta. Aksi serupa muncul di Solo, yang disertai penjarahan. Sejumlah gedung, pertokoan, dan rumah terbakar, ratusan orang tewas.

15 Mei

Ratusan korban tewas terbakar ditemukan di Toserba Yogya, Klender, Jakarta Timur.

16 Mei

Ratusan lagi korban tewas terbakar di Ciledug Plaza, Ciledug, Tangerang.

17 Mei

Angka resmi menunjukkan 499 korban tewas dan lebih dari 4.000 gedung hancur atau terbakar akibat kerusuhan.

18 Mei

Ribuan mahasiswa di berbagai daerah menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Di Jakarta, mereka menduduki kompleks DPR/MPR, Senayan.

Ketua MPR/DPR, Harmoko, menyampaikan hasil rapat pimpinan MPR yang meminta Soeharto mundur dari jabatannya secara arif dan bijaksana. Tapi Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengatakan permintaan Harmoko itu tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

19 Mei

Di Istana Merdeka, Presiden Soeharto bertemu sejumlah ulama dan tokoh

Tak Roboh Diterpa Badai

PERTEMUAN dua generasi itu terjadi September 2005. Disaksikan ratusan pasang mata, ketiga putri Soeharto menjabat erat tangan Liem Sioe Liong yang gemetar dimakan usia. Siti Hardijanti Rukmana, Siti Hediati Harijadi, dan Siti Hutami Endang Adiningsih bergiliran menjura takzim kepada konco lawas ayahnya itu.

Taipan nomor wahid di zaman Orde Baru itu pun membalasnya hangat. Meski sambil duduk, tak lupa ia mengumbar senyum. Ketiga putri itu tentulah mengingatkannya pada masa-masa keemasan selama berpuluh tahun yang telah dirajutnya bersama kekuasaan Soeharto.

Soeharto, yang saat itu sudah divonis "sakit permanen" oleh tim dokter, memang tak bisa lagi hadir di hajatan kolega lamanya ini. Padahal, Liem, yang juga beken dengan nama Soedono Salim, sedang menggelar pesta ulang tahunnya ke-90.

Pesta megah dua malam dengan ongkos Rp 20 miliar itu digelar di Hotel Shangri-La, Singapura. Sekitar 2.500 tamu menyesaki The Island Ballroom Hotel yang disulap bak istana kekaisaran Cina di masa dinasti Ming dan Ching. Meski dipenuhi konglomerat dan sejumlah pejabat Orde Baru, kehadiran tiga putri Soeharto tampaknya punya tempat tersendiri di hati Om Liem.

Itu sebabnya, ketiga putri Presiden RI ke-2 ini pun selalu mendapat perhatian istimewa penyelenggara pesta. Begitu pula ketika mereka mengha-diri pesta perkawinan berlian Liem dengan Lie Shu Zen, gadis asal Lasem, Jawa Tengah, April 2004 lalu, di Singapura juga.

III

PERSAHABATAN Soeharto dengan Liem merupakan bagian dari cerita panjang sejarah Orde Baru. Bersama Mohamad "Bob" Hasan, ketiganya menjadi pusat pusaran arus ekonomi-politik negeri ini, hingga Orde Baru runtuh pada 1998 berbarengan dengan lengsernya Soeharto.

Pertalian ketiganya memang terbukti punya "hoki" bagus. Berkat imperium bisnis mereka yang menjalar ke segala penjuru negeri, majalah Forbes edisi 28 Juli 1997 bahkan pernah menobatkan ketiganya menjadi bagian dari orang terkaya di muka bumi ini.

Jika dirunut ke belakang, persahabatan Soeharto dengan Liem terbuhul sejak lima dekade silam. Bermula dari kedatangan Liem muda di Kudus, Jawa Tengah, pada 1938. Ketika meninggalkan tanah kelahirannya di Fujian, Cina, usia Liem baru 22 tahun.

Bersama saudara-saudaranya, di Kudus, Liem membuka toko kelontong sembari membantu perjuangan RI lewat perkumpulan pedagang Cina, Cong Siang Hwee.

Perkenalannya dengan ayah Fatmawati, mertua Bung Karno, kian melempangkan bisnisnya memasok kebutuhan tentara.

Demikianlah hingga Soeharto menjabat Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah, pada 1950-an. Atas saran Soeharto, Liem kemudian menggabungkan usahanya dengan kelompok bisnis Djuhar Sutanto alias Liem Oen Kian, yang juga sama-sama kelahiran Fujian.

Ketika itu, lewat bendera Four Seas, Djuhar menjadi pemasok TNI Angkatan Laut. Belakangan, Four Seas berganti nama menjadi Five Stars, dengan masuknya Lim Chin Song, yang membawa dua pegawainya, termasuk Ibrahim Risjad.

Singkat cerita, Liem dan Djuhar sepakat mendirikan PT Waringin Kentjana. Inilah cikal-bakal imperium bisnis Grup Salim. Risjad, yang juga bergabung di perusahaan itu, mengajak saudara sepupu Soeharto, Sudwikatmono, yang kala itu masih berjualan karung goni. Empat serangkai inilah yang di kemudian hari dijuluki The Gang of Four-empat pilar bisnis Grup Salim.

George J. Aditjondro, yang rajin menelisik harta keluarga Cendana, menyebutkan awal 1950-an sebagai titik awal dibangunnya kerajaan bisnis keluarga Cendana. Ketika itu Soeharto menjabat Pangdam Diponegoro.

Berkat dukungan Soeharto, Liem dan Bob Hasan saat itu banyak memenangi kontrak pasokan berbagai kebutuhan prajurit Kodam Diponegoro. Mulai dari nasi, pakaian seragam, hingga obat-obatan.

Hubungan segi tiga itu makin kompak setelah Soeharto pindah ke Jakarta dan diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada awal 1960-an. Ia segera mendirikan Yayasan Dharma Putera Kostrad, satu dari puluhan yayasan Soeharto yang kerap dijadikan instrumen bisnis keluarga Cendana.

Setelah Soeharto menjadi presiden, ia pun mengajak Liem, sahabat lamanya, ke puncak kekuasaan. Pada 1971-1972, keduanya sepakat membangun pabrik tepung terigu raksasa, PT Bogasari Flour Mills-cikal-bakal Indofood-di Jakarta dan Surabaya

Sebagai bentuk proteksi, kata George, pesaingnya dari Singapura hanya diizinkan beroperasi di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dan menggarap pasar Indonesia bagian timur. Pasar utama di Indonesia bagian barat-dengan pangsa 80 persen-khusus digarap Bogasari. "Inilah tambang uang utama yang pertama mereka bangun," kata George.

Penguasaan Soeharto di perusahaan ini tentu tak langsung. Selain ada Sudwikatmono di sana, kontrol dilakukan lewat salah satu yayasan yang didirikannya.

Sedikitnya ada 40 yayasan di bawah kendali keluarga Cendana yang punya saham di berbagai perusahaan besar. Selain Bogasari, berbagai sektor bisnis dimasukinya, mulai dari

pabrik semen, pupuk, jalan tol, hingga perkebunan kelapa sawit. Kebanyakan perusahaan itu terkait dengan Liem dan Bob Hasan.

III

SOAL Bob Hasan, kedekatannya dengan keluarga Cendana tak bisa dilepaskan dari bisnisnya dengan anak-anak Soeharto. Bersama Sigit Harjojudanto, ia membangun Nusantara Ampera Bhakti (Nusamba), salah satu mesin uang Cendana.

Sekitar 80 persen saham perusahaan di bidang pertambangan dan telekomunikasi ini dimiliki tiga yayasan Soeharto: Supersemar, Dakab, dan Dharmais. Sisanya dibagi di antara Bob dan Sigit.

Teman main golf dan memancing Soeharto ini juga menggandeng Tommy Soeharto di Sempati. Sedangkan Bambang Trihatmodjo dan Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat dirangkulnya di International Timber Corp. Berkat kepiawaiannya inilah, PT Kiani Kertas yang dibangun Bob mendapat kucuran dana ratusan miliar rupiah dari yayasan Soeharto.

Perkenalannya dengan Soeharto bermula dari nasib baik Bob, yang sejak terlahir di Ngadirejo, Jawa Tengah, pada 24 Februari 1931, dibesarkan oleh Jenderal Gatot Subroto. Sang Jenderal adalah sahabat karib ayahnya, Soetedjo, pria Jawa dari keluarga juragan tembakau yang memperistri perempuan Tionghoa.

III

BERKOLABORASI dengan kedua pilar bisnisnya itulah, keluarga Cendana lambat-laun menancapkan kukunya di jagat bisnis nasional. Lewat keenam anaknya, menurut majalah Time edisi 24 Mei 1999, imperium bisnisnya menjalar di 18 sektor. Mulai dari pertambangan, kehutanan, bank, telekomunikasi, jalan tol, transportasi udara, hingga media.

Michael Backman, peneliti bisnis dan perusahaan di Asia, pernah berhitung: jumlah perusahaan keluarga Cendana lebih dari 1.247. Dalam tulisannya di harian The Asian Wall Street Journal, 26 Mei 1998, disebutkan perusahaan-perusahaan itu setidaknya tersebar pada 20 konglomerat.

Padahal itu belum memperhitungkan perusahaan di luar negeri. Belum juga termasuk perusahaan di luar keluarga inti, seperti Grup Hanurata, yang dibangun Sudwikatmono bersama Sigit dan Indra Rukmana (suami Siti Hardijanti).

Menurut taksiran majalah Time dan Forbes, total kekayaan Soeharto saat lengser mencapai US$ 15 miliar, atau sekitar Rp 150 triliun (dengan kurs Rp 10 ribu per dolar). Angka lebih fantastis pernah diungkap majalah Newsweek (Januari 1998) dan AWSJ (Januari 1999), yang menyebut US$ 40 miliar.

Betapapun digdayanya, kerajaan bisnis Cendana akhirnya koyak-moyak saat badai krisis ekonomi menerpa Asia pada 1997-1998. Putra-putri Soeharto, yang dulu tak tersentuh aparat, pun terjerat utang raksasa ke negara.

Nasib tak berbeda dialami Salim dan Bob Hasan, dua kroni Soeharto. Tapi, benarkah imperium bisnis ketiganya telah ambruk? Sulit mempercayainya. Sebab, bagaimanapun, ketiga konglomerasi yang menggurita puluhan tahun ini telah menjadi pilar ekonomi Indonesia. Jika roboh, bangunan ekonomi nasional pun runtuh seketika.

Kisah Dua Prajurit

Biar jenderal atau menteri, yang bertindak inkonstitusional akan saya gebuk!" Kata-kata itu meluncur dari mulut Soeharto di atas pesawat kepresidenan, pertengahan 1989. Ketika itu dia dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke Beograd, Yugoslavia.

Soeharto tak menyebut nama tapi publik tahu siapa yang dimaksud. Leonardus Benyamin Moerdani. Di akhir 1980-an sang Presiden memang sedang sengit-sengitnya kepada Benny. Bawahan yang paling dia percaya itu berani menganjurkan dia untuk tidak lagi menjadi presiden serta menentang anak-anaknya.

Itulah isu yang berkembang. Mayjen (Pur) Kivlan Zen, bekas Kepala Staf Kostrad, malah mengatakan Benny ingin melakukan kudeta. Informasi ini yang menurut Kivlan dilaporkan Prabowo Subianto kepada mertuanya yang berujung pemecatan Benny dari jabatan Panglima ABRI seminggu sebelum Sidang Umum MPR 1988.

Benny tegas-tegas membantahnya. "Bagi saya seorang prajurit yang pernah melawan pemimpin tertingginya berarti sudah cacat seumur hidupnya," katanya kepada Brigjen (Pur) FX Bachtiar yang menanyakan hal itu.

Kata-kata Benny itu dikutip Bachtiar dalam artikelnya di biografi "LB Moerdani Pengabdian Tanpa Akhir" yang terbit Desember 2004. Puluhan sahabat dan kenalan yang ikut menuliskan pengalaman mereka mengatakan Benny seorang loyalis. Ucapan Benny kepada Letjen (pur) Sofian Effendy menggambarkan hal itu: "Soeharto adalah guru saya. Dia yang membesarkan saya."

Membesarkan? Ya. Mereka berkenalan dalam Operasi Mandala untuk merebut Irian Barat pada 1961. Soeharto, sang Komandan, mengagumi keberanian Kapten Benny yang ketika itu memimpin Pasukan Naga. Mereka kembali bertemu pada 1965 kala Benny ditempatkan di satuan intelijen Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang dipimpin Soeharto.

Hubungan mereka kian dekat. Setelah berkuasa, pada 1974 Soeharto mengangkat Benny menjadi Kepala Perwakilan RI di Seoul, Korea Selatan. Tapi Benny sering meninggalkan posnya karena punya tugas "sampingan": mengawal Soeharto dalam berbagai lawatan ke luar negeri. Lakon pengawal tak resmi ini dia jalankan hingga bertahun-tahun.

Saking percayanya, Pada 1975 Soeharto menunjuk Benny memimpin Operasi Seroja ke Timor Timur. Dan Benny sukses. Enam tahun kemudian, dia ditugaskan memimpin pasukan Kopasandha membebaskan pesawat GadudaWoyla DC-9 yang dibajak di Bandar Udara Don Muang, Thailand. Ada yang mengatakan itu rekayasa Soeharto agar bisa mendongkrak pangkat Benny.

Benar atau tidak, yang pasti sejak itu karir Benny maju pesat. Puncaknya ketika Soeharto menunjuk Benny sebagai Panglima ABRI dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988). Tapi, laporan Prabowo membuat Soeharto marah dan "memensiunkan" anak emasnya itu lebih awal.

Mantan dokter tentara dalam Operasi Mandala Ben Mboi, bercerita, Soeharto sudah lama jengkel pada Benny. Soalnya, dia berani meminta si Bos "menjauhkan" anak-anaknya dari kekuasaan. Itu dia sampaikan ketika keduanya bermain bilyar, sendirian, di Cendana. Saat itu Benny sudah menjadi Pangab. "Ketika saya angkat masalah anak-anak itu, Pak Harto berhenti bermain, masuk kamar tidur dan tinggalkan saya di kamar bilyar," ujar Benny kepada Ben.

Anehnya, Soeharto seperti tak bisa benar-benar membenci Benny. Ketika menyusun kabinetnya pada 1988, Benny mendapatkan pos menteri pertahanan dan keamanan. Keputusan tak terduga itu membuat Benny kalah taruhan dan harus membayar Laksamana (Pur) Sudomo satu set golf plus 2.000 bola.

Padahal ketika bertemu Sudomo beberapa waktu sebelum pengumunan kabinet, Soeharto masih amat marah pada Benny. Itu karena Benny mengusulkan penguasa Orde Baru untuk mundur dari pentas politik setelah 1993. Benny khawatir, kalau diteruskan nasib Soeharto akan seperti Presiden Soekarno: diturunkan dengan paksa.

Soeharto akhirnya diturunkan setelah huru-hara pada 1998. Tapi itu justru berkah bagi kedua "sahabat" yang hampir sepuluh tahun marahan. Pada ulang tahun Soeharto pertama setelah lengser-8 Juni 1998- Benny datang. Keduanya kembali saling mengunjungi dan berkirim kartu ucapan hingga Benny berpulang pada 29 Agustus 2004.

Enam dari Generasi Ketiga

IBARAT beringin yang rimbun, pohon keluarga Pak Harto dipenuhi banyak cabang dan ranting. Dari enam anak terus berpinak menjadi 13 cucu, masing-masing tiga cucu dari Siti Hardijanti Hastuti (dengan Indra Rukmana), Sigit Harjojudanto (Ilsje Anneke Ratnawati), dan Bambang Trihatmodjo (Halimah Augustina). Dua cucu dari Hutomo Mandala Putra (dengan Tata), dan masing-masing satu cucu dari Siti Hediyati Hariadi (Prabowo Subianto), serta Siti Hutami Endang Adiningsih (Pratikto Prayitno Singgih).

Namun, jumlah itu masih bisa bertambah, bergantung pada sisi mana melihatnya. Misalnya, apakah anak Bambang dengan penyanyi Mayangsari, yang lahir bulan lalu, mau dihitung dengan cara yang sama? Atau, anak perempuan Sandy Harun, yang tahun lalu diklaimnya sebagai benih dari Tommy Soeharto, misalnya, itu bagaimana pula? Yang jelas, beberapa cucu kesayangan Pak Harto sudah melanjutkan kelanggengan trah mereka dengan memberikan cicit kepada sang eyang. Misalnya seperti kakak-adik Ari dan Eno Sigit. Beberapa cucu Soeharto baru saja memasuki mahligai pernikahan, seperti Danty Rukmana ataupun Gendis Trihatmodjo.

Ketika generasi ketiga keluarga Cendana ini masih kanak-kanak atau bahkan menginjak remaja, mereka praktis hanya dikenal oleh para kerabat dan segelintir pejabat Orde Baru. Namun, memasuki 1990-an, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa cucu Pak Harto mulai berbisnis dan memasuki ruang publik sehingga dikenal oleh masyarakat.

Ari Sigit

SAMPAI saat jatuhnya Pak Harto dari tampuk pemerintahan pada 1998, jika terdengar kata "cucu", yang dimaksud pastilah Haryo Wibowo Sigit Harjojudanto, yang lebih dikenal sebagai Ari. Bukan hanya karena ia putra pertama pasangan Sigit-Ilsje, melainkan karena Ari juga cucu tertua keluarga Cendana.

Saat para sepupunya masih kecil, Ari sudah menggegerkan dunia bisnis nasional persis satu dekade silam. Waktu itu ia berkongsi dengan Emir Baramuli dan Ichdar Kuneng Bau Masseppe membentuk PT Arbamass Multi Invesco. Bukan karena akronim nama ketiganya membentuk kata "Arbamass" yang membuat heboh, melainkan cara mereka menjadikan perusahaan itu sebagai pemasok tunggal minuman keras di Bali yang membuat orang geleng-geleng kepala. Apalagi, Arbamass berniat mengatur penjualan minuman keras di Pulau Dewata itu lewat penjualan stiker. Kontroversi baru reda setelah Soeharto menyatakan tak boleh ada "tata niaga" untuk minuman keras.

Sisi lainnya, gemerlap dunia hiburan. Ia pernah meluncurkan album rekaman di pertengahan 1990-an dengan bantuan mentornya di bidang musik, penabuh drum Jelly Tobing. Mantan istri pertamanya, Annisa Tri Banowati, dan istri ketiganya sekarang, Rika

Callebout, adalah bintang sinetron. Hanya bekas istri kedua, Gusti Maya Firanti Noor, yang tak berasal dari dunia hiburan. Meski begitu, gosip terus saja menerpa kehidupan Ari.

Belakangan, Ari dikabarkan mulai aktif mendalami agama. Ia menjadi murid Abah Ijai (Guru Sekumpul)-nama panggilan KH Zaini Abdul Ghani, ulama karismatis Banjarmasin. Fakta ini terungkap ketika Ari menghadiri pelantikan Rudy Ariffin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Agustus 2005. Seolah mengetahui keheranan para anggota Dewan, Ari menjelaskan kehadirannya itu sebagai teman. "Saya dan Pak Rudy Ariffin sama-sama murid Abah Ijai," katanya.

Eno Sigit

LAHIR sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Sigit-Ilsje, alumnus sekolah mode London dengan nama lengkap Retnosari Widowati Harjojudanto ini untuk beberapa saat menambah panjang daftar perancang busana di Tanah Air. Namun, sekarang ia lebih menikmati peran sebagai panitia penyelenggara (event organizer) acara anak-anak seperti Barney dan Holiday On Ice. "Saya sedang menikmati peran sebagai ibu," ujar ibu dua balita dari pernikahannya dengan Fahmi David ini.

Setelah sembilan tahun tinggal di London (1987?1996), Eno balik ke Jakarta dengan menyalurkan hobinya yang lain: menyanyi. Ia membuat album rekaman bersama komedian Harry de Fretes, yang saat itu sedang populer sebagai pimpinan Lenong Rumpi, kelompok yang menyajikan seni tradisional lenong dengan cita rasa lebih metropolitan. Sama seperti nasib rekaman abangnya, nama besar sebagai cucu orang nomor satu-waktu itu-di Indonesia pun tak bisa mendongkrak popularitas dan penjualan album. Selera memang tak bisa dipaksa.

Di dunia bisnis, Eno dikenal lewat bendera PT Mahardika Bangun Pratama, yang mengerjakan proyek pengembangan pelabuhan terpadu Tanjung Perak-Gresik di Teluk Kali Lamong, Gresik. Proyek ini dimulai sejak 1992, dan seharusnya selesai akhir 1998 sebelum ikut gonjang-ganjing dihantam badai krisis moneter.

Dandy Rukmana

BERBEDA dengan Ari sepupunya, pemilik nama lengkap Dandy Nugroho Hendro Maryanto ini malah nyaris tak pernah dikaitkan dengan dunia hiburan. Padahal, ia justru pernah mengawaki Televisi Pendidikan Indonesia yang didirikan oleh ibunya. Anak pertama pasangan Siti Hardijanti Hastuti dengan Indra Rukmana ini lebih dikenal dengan kiprahnya di dunia olahraga otomotif. Ia banyak mengikuti reli, baik nasional maupun internasional, antara lain dengan navigator tingkat dunia seperti mendiang Roger Freeman.

Dandy, yang lama di Boston, memiliki pembawaan bisnis yang paling menjanjikan dari generasi ketiga Cendana. Sebagai contoh, ia dan sang paman, Bambang Trihatmodjo,

bisa sama-sama menjadi komisaris PT Bimantara Citra Tbk. berdasarkan RUPSLB pada 2004, dengan jabatan direktur utama diduduki oleh Bambang I. Tanoesoedibjo.

Meski begitu, Dandy termasuk irit bicara kepada pers. Tak mengherankan jika akhir tahun lalu namanya kerap dipertukarkan publik dengan adik bungsunya, Danny Rukmana, ketika pecah berita tentang pernikahan artis Lulu Tobing dengan seorang cucu keluarga Cendana. Cukup banyak media massa yang awalnya memberitakan hal itu sebagai kabar pernikahan Dandy, bukan Danny. Akibatnya, seorang tokoh keluarga Cendana terkekeh mendengar kisah simpang-siur itu. "Mas Dandy kan sudah menikah. Mana mungkin kawin lagi," katanya ketika dimintai konfirmasi akhir tahun lalu.

Danty Rukmana

SELASA 23 Mei 2006, pernikahan Danty Rukmana dengan Adrianto Supoyo genap berumur empat tahun. Saat upacara pernikahan itu berlangsung di rumah orang tuanya di Cendana, terjadi sebuah peristiwa yang menggegerkan Indonesia. Bukan karena itu pernikahan kedua Danty setelah pernikahan pertamanya dengan Triyono yang berlangsung 28 Maret 2000 kandas tak sampai dua tahun, melainkan karena munculnya laporan seorang wartawan Bali Post, Heru B. Arifin, yang menyaksikan di acara itu bahwa Pak Harto, yang selalu dikabarkan sakit, ternyata segar bugar dan bisa berjalan tegap tanpa ada yang menuntun atau memegangi tangannya.

Heru bisa menyelinap masuk sebagai tamu tanpa diketahui petugas keamanan yang melakukan sensor ketat atas setiap tamu. Setelah kejadian ini, semua pesta pernikahan cucu keluarga Cendana berlangsung dengan penjagaan superketat, tanpa tamu dari kalangan wartawan, seperti pada pernikahan Gendis Trihatmodjo bulan lalu.

Romansa Danty dengan Adrianto terbilang menarik karena dicomblangi secara khusus oleh sang kakak, Dandy Rukmana. Bibit-bibit cinta itu disemai keduanya di Negeri Abang Sam, tempat Dandy dan Danty lebih sering menghabiskan waktu. Namun, Danty dan Adri sebenarnya sudah berkenalan lama sekali ketika mereka masih menjadi murid di sebuah TK dan SD di Menteng.

Dalam bidang bisnis, Danty terkesan lebih low profile, tidak seperti kakaknya atau sepupunya, Eno Sigit.

Gendis & Panji Trihatmodjo

NAMA Gendis Tri Hatmanti dan Panji Adhi Kumoro, anak pertama dan kedua pasangan Bambang-Halimah, baru santer terdengar setelah mereka membagikan 2.000 paket sembako (sembilan bahan pokok) kepada masyarakat Pe-tamburan, Oktober 2005. "Setiap tahun keluarga kami selalu membagikan sembako, tapi memang baru sekarang ini kami yang membagikan," ujar Gendis. Panji menambahkan, "Pemberian sembako ini untuk memperingati ulang tahun pernikahan orangtua kami ke-24."

23 April 2006, Gendis menikah dengan Arif Putra Wicaksono di Masjid At-Tiin, Taman Mini Indonesia Indah. Yang unik, dalam resepsi yang digelar keesokan harinya di Ballroom Hotel Grand Hyatt, para tamu mendapat hadiah sepotong kue tart putih di dalam kotak plastik transparan. Jika kotak dibuka dan tak terjadi perubahan warna, berarti kue bisa langsung dimakan. Tapi jika terjadi perubahan warna, tunggu dulu, sibak kue dengan hati-hati, dan hup! temukan sebentuk cincin berlian yang bisa membuat hati para tamu semakin berbunga.

Berbeda dengan Gendis, tampang kalem Panji semakin dikenal setelah ia "go public" sebagai pacar pemain film Laudya Cynthia Bella (Virgin). "Orangnya memang pendiam, nggak pecicilan. Perhatian dan enak diajak ngobrol," ujar Bella yang memanggil Panji dengan sebutan mesra: Miu.

Tapi seberapa seringkah para cucu ini bertemu Pak Harto? Menurut Gendis, sebelum menikah, hampir setiap malam Minggu mereka berkumpul dengan Eyang. Apakah soal politik termasuk yang dibicarakan? "Tidak pernah," Gendis menukas cepat. "Biasanya cuma nonton TV bareng."

Soeharto dan Rezim Anti-Partai

Saiful Mujani
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI)/Peneliti Freedom Institute

Bagaimana mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat ke dalam sistem besar yang disebut negara-bangsa seperti Indonesia? Bagaimana keinginan masyarakat dikomunikasikan kepada elite pemerintah dan sebaliknya kebijakan dari pemerintah disampaikan kepada masyarakat dalam negara yang kompleks pada zaman modern ini? Partai politik, walaupun bukan satu-satunya, adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan besar tersebut.

Selain berfungsi mengartikulasikan kepentingan rakyat dalam politik nasional, partai politik juga berfungsi mengintegrasikan kelompok masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dengan kata lain, partai politik, dalam studi Bill Liddle tahun 1960-an, punya fungsi untuk integrasi nasional. Individu-individu, kelompok suku, agama, kelas sosial, dan sentimen kedaerahan yang begitu besar di negeri kita, dimediasi dan dipertemukan dalam unit-unit lebih besar dalam partai politik. Partai politik juga mendekatkan jarak politik dari pusat kekuasaan kepada rakyat.

Fungsi integratif dan artikulatif partai politik inilah yang diabaikan sepanjang sejarah kekuasaan Soeharto. Kebutuhan rezim Orde Baru Soeharto untuk integrasi nasional dan untuk memperantarai rakyat dengan elite pemerintahan dipenuhi terutama lewat kekuatan angkatan bersenjata dan oleh Golongan Karya (Golkar)-kelompok fungsional yang diciptakan elite tentara sendiri.

Sifat dasar partai adalah refleksi dari pembelahan sosiologis masyarakat-apakah itu karena perbedaan ideologis, kelas sosial, ataupun perbedaan primordial (agama, suku, atau kedaerahan). Karena itu, sejak awal, oleh para pendirinya, Golkar didefinisikan bukan sebagai partai politik, tapi sebagai kelompok fungsional lintas sosiologis. Karena itu Golkar tidak berideologi, tidak merepresentasikan kelompok primordial atau kelas sosial tertentu. Ia berpretensi mewakili semuanya. Kalaupun mau disebut berideologi politik, ideologi yang dimaksud adalah Pancasila. Ia diciptakan bagi lintas golongan ataupun lintas kelompok sosial. Golkar seperti negara; negara dalam negara, atau bentuk lain dari negara.

Akar dari gagasan Golongan Karya, sebagai organisasi non-partai, ini dapat ditarik jauh ke belakang. Setidaknya sampai pada gagasan Soekarno tahun 1920-an yang menghendaki adanya kelompok nasional yang mencerminkan lintas golongan dan kelompok, bukan partai politik yang beragam sebagai cerminan dari keragaman golongan atau kelompok masyarakat.

Setelah merdeka, elite politik lain seperti Mohammad Hatta menolak gagasan semacam itu. Yang mengisi pentas politik adalah partai-partai politik dengan ideologi yang

berwarna-warni seperti umumnya ditemukan di negara demokrasi. Tapi setelah Soekarno "mengubur partai-partai politik" lewat pidatonya, bersamaan dengan berakhirnya Demokrasi Parlementer, tahun 1958, gagasan tersebut direalisasikan. Rekrutmen terhadap golongan-golongan ini (buruh, tani, pegawai pemerintah, guru agama, kelompok profesional, dan TNI) dilakukan lewat apa yang oleh Soekarno disebut Front Nasional. Golongan-golongan ini mendapat kursi di MPR Demokrasi Terpimpin Soekarno. Lewat wadah inilah TNI secara formal masuk politik. Keinginan Jenderal Nasution agar tentara juga berperan dalam politik nasional tertampung di sana. Sebelumnya TNI, dan presiden sendiri, di luar arena politik karena sistem parlementer yang dianut dalam demokrasi waktu itu tidak memberikan tempat politik pada presiden sebagai kepala negara dan TNI sebagai pengawal keamanan negara. Akibatnya, Soekarno dan tentara sama-sama anti-partai politik.

Pada zaman Demokrasi Terpimpin, tentara juga membentuk organisasi-organisasi di berbagai sektor untuk menyaingi PKI, yang waktu itu sangat berpengaruh. Yang paling menonjol di antara organisasi ini adalah Sarekat Pekerja, yang terdiri dari organisasi pekerja di perusahaan perkebunan pemerintah. Organisasi bikinan tentara inilah kemudian yang menjadi cikal-bakal Golongan Karya.

Secara historis, Golkar lahir sebagai wujud dari sentimen anti-partai. Berkat kerja tentara atas instruksi Soeharto, organisasi-organisasi yang bernaung di bawah Golkar ini bertambah dalam waktu singkat: dari 64 pada 1965 menjadi 252 pada 1967. Sekretariat bersama Golkar yang mengkoordinasi kekuatan-kekuatan golongan ini sepenuhnya di bawah kendali tentara.

Sentimen anti-partai politik di kalangan petinggi tentara waktu itu mengemuka dengan jelas dalam seminar yang diselenggarakan di Seskoad Bandung pada 1966. Dalam seminar itu diusulkan agar sistem pemilu diubah dari proporsional menjadi distrik. Motif di balik usul ini: mencegah partai yang ada kembali mendominasi dan agar tokoh-tokoh partai nasional tidak punya pengaruh terhadap perolehan suara. Usul tentang perubahan sistem pemilu oleh Angkatan Darat ini ditolak DPR tapi Soeharto mencari jalan tengah: sistem proporsional dipertahankan tapi tentara dikasih jatah kursi lewat pengangkatan. Di samping itu juga ada kursi di MPR yang mewakili golongan. Yang terakhir ini juga diangkat oleh presiden.

Sentimen anti-partai pada masa awal kekuasaan Soeharto terlihat misalnya dari peraturan Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud pada 1969, yang melarang pegawai pemerintah berafiliasi dengan partai politik tapi boleh menjadi anggota Golkar, karena Golkar bukan partai politik. Ini kemudian menjadi tradisi sepanjang sejarah politik Indonesia di bawah Soeharto.

Pemilihan umum pertama terselenggara pada 1971. Sebanyak 10 partai politik ikut serta. Masjumi dan Partai Sosialis yang dibubarkan Soekarno tidak direhabilitasi. Tapi Soeharto mempersilakan membentuk partai baru sebagai wadah bagi keluarga besar

Masjumi: Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dengan catatan pemimpin Masjumi, Muhammad Natsir, tidak boleh kembali terjun di gelanggang politik.

Hasil pemilihan umum pertama Orde Baru 1971 menunjukkan kemenangan mutlak kekuatan golongan anti-partai politik, yang diorganisasi di dalam Golkar, dengan perolehan suara 65 persen. Untuk sukses besar ini, serangkaian rekayasa politik dilakukan. Di antaranya dengan kebijakan agar partai politik tidak punya hubungan langsung dengan konstituen mereka. Pengurus partai dan kantornya hanya sampai tingkat kabupaten. Tidak boleh sampai kecamatan apalagi desa-desa. Sedangkan Golkar, sebagai kekuatan bukan partai politik, dapat memobilisasi massa langsung lewat birokrasi pemerintah hingga tingkat desa, dan bahkan RW/RT.

Hasil akhir dari politik pemilu ini adalah tergerusnya kekuatan partai politik. Penggerusan terhadap partai ini tidak berhenti sampai di situ. Menjelang Pemilihan Umum 1977, Soeharto melakukan penyederhanaan sistem kepartaian, dari sistem dengan sepuluh menjadi hanya tiga partai. Penyederhanaan dilakukan bukan secara lazim, misalnya dengan diserahkan pada hasil pemilu dan peningkatan electoral threshold, tapi dengan cara sewenang-wenang.

Partai yang berlatar belakang Islam seperti Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlatar belakang nasionalis seperti PNI, dan non-Islam seperti Partai Kristen Indonesia (Parkindo), disatukan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dua kelompok partai ini bersaing menghadapi kekuatan "negara", yakni Golkar. Mereka selalu kalah selama enam kali pemilu Orde Baru.

Soeharto lalu membuat keputusan baru bahwa semua organisasi politik, seperti partai politik, harus berasas sama, yakni Pancasila. Jika sebelumnya masih sedikit ada aroma partai di partai politik tersebut, dengan keputusan politik baru tersebut partai-partai itu menjadi kurang lebih sama dengan Golkar sebagai kekuatan bukan partai politik, melainkan bentuk lain dari negara.

Deparpolisasi oleh rezim Soeharto ini berlanjut dengan mengontrol partai-partai yang sudah tidak berbentuk itu dengan mendukung figur-figur yang bisa dipercaya oleh pemerintah. Biasanya figur yang kurang punya akar kuat di masyarakat, atau yang cenderung independen dari pengaruh pemerintah.

Di PPP, misalnya, pemerintah lebih cenderung pada orang Muslimin Indonesia karena dukungan massa terhadap tokoh-tokoh ini umumnya sudah mulai pudar berkat sukses pemerintah mencegah rehabilitasi Masjumi dan tokoh-tokohnya. Juga berkat sukses Golkar menggerogoti massa konstituennya.

Kalaupun tokoh dari unsur NU yang didukung, biasanya bukan dari NU Jawa Timur yang punya hubungan sangat kuat dengan massa yang lebih besar. Akibatnya, PB NU yang didominasi para kiai Jawa Timur, termasuk Gus Dur, menyatakan tidak lagi mendukung PPP.

Bagi Soeharto ini adalah bentuk pembangkangan, dan kita tahu Gus Dur adalah tokoh NU yang dikucilkan Soeharto. Demikian juga untuk kepemimpinan PDI: Megawati tidak didukung karena punya hubungan langsung dengan Soekarno.

Secara umum retorika yang membenarkan deparpolisasi politik Indonesia pada zaman Soeharto tersebut adalah untuk menciptakan politik nasional lebih stabil dan terbebas dari konflik dan kekerasan. Meski bertujuan luhur, deparpolisasi ternyata bukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Stabilitas politik tidak bisa diciptakan dengan depluralisasi politik.

Buktinya sangat nyata. Rezim Soeharto yang dibangun di atas sentimen dan program politik anti-partai ternyata berujung rusuh bahkan tumbang secara tidak hormat. Begitu Soeharto tumbang, ratusan partai politik muncul. Golkar yang begitu perkasa menciut menjadi partai yang kurang lebih seimbang dengan partai-partai lain. Setidaknya ia tidak bisa memerintah sendiri. Munculnya tiga pemilu yang bebas plus ratusan partai pasca-deparpolisasi Soeharto ternyata tidak menciptakan instabilitas politik dan konflik sosial. Ini menunjukkan bahwa retorika deparpolisasi Orde Baru Soeharto palsu.

Kepalsuan yang tak boleh terulang. Itu juga pelajaran bagi siapa pun yang kurang peduli terhadap partai. Tak terbayangkan sebuah negara yang besar dan kompleks, apalagi kalau harus demokratis, tanpa kehadiran partai politik yang kuat.

Para Saksi Bercerita...

Jabatan mereka memang bukan jabatan tinggi, glamor, megah, seperti seorang panglima atau menteri. Mereka adalah orang yang berada begitu dekat dengan Soeharto selama menjabat presiden; yang bisa meraba suasana hatinya hingga memahami geraman suaranya atau senyum bahagianya. Ada ajudan, ada wartawan Istana, ada teman memancing, dan ada fotografer. Dari mereka, kita kemudian mengenal Soeharto sebagai manusia.

Soerjadi

Ajudan Presiden 1981-1986

Pengalaman pertama Letnan Kolonel Soerjadi bertemu dengan Soeharto sungguh mendebarkan. Sebelum ia berada satu mobil dengan Presiden, dia sudah mendapat tips dari para pendahulunya: Soeharto hanya mau mendapat laporan yang baik-baik saja.

Hari itu Soerjadi ingin membuktikan. Duduk di sebelah pengemudi, tepat di depan Soeharto, dia membuka pembicaraan di sela-sela alunan klenengan (musik Jawa) dari tape mobil.

"Mohon maaf, Pak," kata Soerjadi.

"Hmm," Soeharto menanggapi dengan suara berat.

"Mohon izin, mungkin suatu saat nanti saya memberi laporan yang kurang berkenan bagi Bapak," katanya.

Soerjadi menunggu jawaban dengan hati berdebar. Di belakang, Soeharto mengisap cerutunya dalam-dalam. Tiba-tiba...whuz...! Soeharto menyemburkan asap cerutunya menghantam tengkuk Soerjadi. Soerjadi kaget dan langsung merinding. "Itu pertama kali saya mencium bau asap cerutu, dan saya langsung terdiam sepanjang perjalanan," katanya. Masih di mobil dalam perjalanan pulang ke rumah Presiden di Jalan Cendana, Jakarta, Soeharto memecah kebisuan. "Soer, di sini tempatnya belajar," kata Soeharto.

Peristiwa 27 tahun lalu itu tak terlupakan bagi Soerjadi selama lima tahun menjadi ajudan presiden sejak 1981. Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, 61 tahun lalu ini hanyalah satu dari belasan perwira yang pernah mendampingi Presiden. Tetapi selama Soerjadi menjadi ajudan-kemudian ia juga dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (1993-1997)-Soeharto mengalami beberapa peristiwa penting. Di antaranya peristiwa berdarah Tanjung Priok dan pembajakan pesawat Garuda.

Soerjadi masih ingat persis suasana Cendana saat peristiwa pembajakan pesawat DC-9 Woyla milik Garuda di Bandara Don Muang, Thailand, Maret 1981. Dia menjadi

penghubung antara Soeharto dan pasukan di lapangan yang dipimpin Kepala Badan Koordinasi Intelijen (Bakin) Jenderal Yoga Sugomo dan Asisten Intelijen Hankam Letjen Benny Moerdani.

Menjelang sore hari, pasukan elite antiteroris sudah siap menyerbu pesawat. Yoga menghubungi Cendana. "Kita mau nyerang, mohon petunjuk Bapak (Soeharto), jam berapa baiknya?" pesan Yoga ke Soerjadi agar ditanyakan kepada Soeharto. Soerjadi menemui Soeharto, yang sedang membaca koran di ruang kerjanya. "Wis, Benny wis ngerti," kata Soeharto setelah mendengar laporan Soerjadi. Soerjadi kemudian melaporkan kepada Yoga.

"Lapor, Pak," kata Soerjadi.

"Apa dhawuhe?" tanya Yoga.

"Bapak tidak bicara apa-apa. Kata bapak, Benny wis ngerti," kata Soerjadi.

"Opo maksude?" Yoga bertanya lagi.

"Saya juga nggak tahu, Pak," jawab Soerjadi.

Sekitar pukul tiga dini hari, operasi pembebasan berhasil menewaskan lima pembajak dan membebaskan seluruh penumpang dengan selamat. Hanya Kapten Pilot Herman Rante dan Letnan Satu Achmad Kirang dari pasukan antiteroris yang tewas ditembus peluru pembajak.

Jenderal Yoga melaporkan ke Presiden melalui Soerjadi. Membawa berita baik, Soerjadi memberanikan diri mengetuk kamar tidur Presiden. Dari dalam kamar, terdengar Ibu Negara bertanya dengan suara lantang. "Ono opo bengi-bengi bapake kok ditangek-ke (ada apa malam-malam membangunkan bapak)?" tanya Ibu Tien Soeharto sambil membuka pintu. "Mau melapor, Bu," jawab Soerjadi. Dari dalam kamar, Soeharto menyusul. "Sudah selesai, Pak," Soerjadi melanjutkan. Soeharto menjawab singkat, "Yo wis." Dan pintu kembali ditutup.

Selain urusan kenegaraan, ada tugas plus yang harus dikerjakan Soerjadi. Setiap Jumat dan Sabtu malam, Soeharto selalu memanggilnya dan bertanya, "Soer, Mas Tommy neng endi?" Dan Soerjadi harus bisa menjawab saat itu juga, di mana Hutomo Mandala Putra (Tommy), putra bungsu Soeharto, menghabiskan malam. Melalui para telik sandi, Soerjadi memang terus memantau pergerakan putra kesayangan Soeharto ini. Bagaimana dengan anak Soeharto yang lain? "Bapak hampir tidak pernah bertanya," kata Soerjadi.

Husni Wirajaya

Teman Memancing

"Entuk maneh..., entuk maneh... (Dapat lagi.., dapat lagi...)." Soeharto mendendangkan kalimat pendek itu berulang-ulang sambil tangannya mengangkat kenur

yang berat digondol ikan. Nada dendangnya seirama suara klenengan (gamelan Jawa) dari radio tape kecil di sampingnya. Senyuman tak lepas dari wajah Presiden Soeharto.

Hanya dalam tempo dua jam, delapan orang yang berada di perahu sebesar minibus itu mengail 224 ikan. Hampir separuhnya hasil pancingan Soeharto.

Dari jarak sekitar 10 meter di atas kapal pengawal sebesar truk peti kemas, Husni Wirajaya tersenyum lega. "Saat itu saya ikut gembira sekali," kata Husni yang masih ingat persis peristiwa 22 Maret 1984 itu. Husni bukanlah pengawal. Pengusaha perlengkapan listrik itu menjadi kawan memancing Soeharto sejak 1980.

Kedekatan Husni berawal dari ajakan almarhum Satiri, nelayan yang biasa melayani Soeharto saat memancing. Husni, yang memang punya kegemaran memancing, dikenal pandai mencari lokasi berkumpulnya ikan. Tetapi selama tiga tahun pertama, Husni hanya bisa berada di lingkar ketiga pengamanan. Setelah beberapa kali lokasi yang ditunjukkannya memuaskan Soeharto, baru dia bisa berada satu perahu dengan Soeharto.

Saat paling sibuk terjadi dua hari menjelang jadwal memancing. "Saya harus melakukan survei beberapa lokasi dan mencobanya untuk memastikan di sana banyak ikan," kata pria yang biasa dipanggil Kwik itu. Tidak jarang, meski sudah diyakini lokasinya bagus, hasil tangkapan kurang memuaskan. Dia menolak sebuah gosip yang mengatakan ada sepasukan amfibi yang menyelam dan memasang ikan di kail Soeharto. "Yang penting lokasinya harus bagus," kata Husni.

Jika hasil pancingan memuaskan Soeharto, esok harinya Husni akan mendapat telepon dari pengawal presiden, "Pak Harto nggak ngemut permen (cemberut)." Suasana hati itu membuat para pengawal pun bisa merasa tenang bekerja.

Peristiwa yang tak bisa terlupakan terjadi Jumat, 26 Maret 1996. Pagi hari Husni bersama wakil komandan pasukan pengawal presiden sudah memastikan lokasi memancing yang strategis di Kepulauan Seribu. Mereka kemudian mencoba dengan melempar umpan. "Kebetulan kami belum sarapan," kata Husni, yang kini berusia 61 tahun. Berdua mereka mendapat 20 ikan hanya dalam beberapa menit. "Cukup, jangan kita habiskan!" sang pengawal mencegah.

Siang hari, Soeharto datang bersama rombongan. Meski sudah memancing hampir empat jam, mereka hanya memperoleh dua ekor ikan. "Saya merasa bersalah, padahal arusnya memang tiba-tiba menjadi lebih kuat," kata Husni. Jemu tak mendapat ikan, Soeharto kembali ke kapal utama tanpa banyak bicara dan langsung mandi. Suasana tegang.

Saat ia masih berlumuran sabun, air tawar yang dipakai mandi habis. Soeharto keluar dan menanyakan hal itu pada pengawal. Benar saja, air ternyata habis. "Mungkin ada yang membuka keran dan lupa menutupnya," kata Husni. Meski Soeharto tidak menunjukkan amarah, suasana makin tegang saja. Sesampai di pelabuhan, Soeharto turun kapal dengan

murung. Husni memburunya. "Maaf, Pak, lain waktu saya akan survei lebih baik lagi," katanya memohon. "Ndak apa-apa, sudah baik, kok," Soeharto menghibur. Soeharto memerintahkan rombongan melanjutkan memancing.

Esok harinya semua anggota rombongan dipanggil menghadap ke rumah Soeharto di Cendana, sambil membawa hasil pancingan mereka. Mereka bertanya-tanya dan agak gemetar. "Kami sudah siap dengan keadaan yang terburuk," kata Husni. Ternyata Soeharto bukannya mau memarahi, melainkan dia lupa memberi uang tips kepada rombongan kemarin. Hari itu mereka mendapat tips. Namun, ikan hasil tangkapan mereka diminta Soeharto untuk diserahkan kepada Ibu Negara. "Kami semua lega," kata pria kelahiran Pasar Minggu, Jakarta ini.

Hanya dua hari setelah hari memancing yang nahas itu atau sehari usai mereka menghadap ke Cendana, Ibu Negara Tien Soeharto meninggal.

Toeti Kakiailatu

Wartawan Istana

Lima Oktober 1965. Saat itu, Toeti Kakiailatu ingat. Dia masih bekerja sebagai wartawan Sankei Shimbun, sebuah harian Jepang. Orang berduyun-duyun menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hari itu adalah hari ulang tahun ABRI yang ke-20, bertepatan dengan dimakamkannya lima pahlawan revolusi.

Toeti melihat beberapa perwira tinggi hadir, di antaranya Jenderal Nasution, yang sudah bertongkat. Tak jauh dari Nasution, ada pria berbaju loreng berkacamata hitam. Di ketiaknya terapit tongkat komando. "Itu Pak Harto dari Kostrad," bisik seorang istri tentara kepada Toeti. "Gambaran lelaki itulah yang membayangi pemikiran saya terhadap Soeharto," kata Toeti.

Tahun berikutnya, Juni 1966, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden dalam Sidang Umum IV MPRS. Soeharto berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat. Akibatnya, wartawan Istana selalu wira-wiri antara Istana Merdeka dan Medan Merdeka Barat 15. Kemudian, muncul kebijakan melarang wartawan me-ngunjungi Soekarno di Istana Merdeka.

Setiap hari, Soeharto ke kantor mengendarai jip. Dia tetap berbaju loreng dan berkacamata hitam. Suatu hari pada April 1967, dia mengajak wartawan piknik ke Kepulauan Seribu. Di sinilah dia pertama kali menanggalkan seragam tempurnya itu, berganti setelan safari dan peci.

Di tempat piknik, para wartawan bersantap siang bersama Soeharto. Menu utamanya: ikan bakar dan sambal yang diulek oleh Tien Soeharto. Kendati berakrab-akrab, Soeharto menolak diwawancarai, apalagi menyangkut masalah politik.

Secara resmi, Soeharto menggantikan Soekarno pada Maret 1968. "Kami masih bebas berkunjung ke Jalan Cendana (kediaman Soeharto)," kata Tuti. Istrinya, Tien Soeharto, juga sangat perhatian kepada wartawan. Jika ada wartawan yang tak dilihatnya muncul ke Cendana, Tien Soeharto pasti akan bertanya.

Ketika Toeti, yang tak bertugas selama beberapa pekan, muncul, Tien Soeharto langsung menghampirinya. "Mengapa sudah lama tak tampak?" dia bertanya. "Saya melahirkan, Bu," jawab Tuti. Sembari tersenyum, Tien berkata: "Tunggu ya, Toeti." Dia mengambil kain batik dan beberapa baju bayi sebagai hadiah.

Setiap Idul Fitri, banyak wartawan yang berkunjung ke rumah Soeharto, termasuk Toeti. "Anak saya yang bungsu bebas ke sana kemari, tanpa ada yang melarang," katanya. Toeti rikuh, mencoba melarang. "Biarkan saja," kata Tien.

Ketika pamitan pulang, Tien memanggil anak Toeti. Dia dihadiahi apel dan buah anggur. "Ayo, bilang apa?" kata Ibu Tien. "Terima kasih, Tante," jawabnya. "Eh, jangan bilang tante. Ini eyang," Tien menyergah. "Terima kasih, Eyang." Soeharto tertawa melihat adegan ini.

Kendati begitu akrab, menurut Toeti, para wartawan tak pernah bisa bertanya langsung kepada Presiden. Segala kebijakan pemerintah selalu diterangkan Menteri Penerangan B.M. Diah. "Pernah suatu hari Pak Harto membuka wawancara langsung dengan wartawan Istana, yang saya lupa tanggalnya," kata Toeti.

Tetapi apa yang terjadi? Semua pertanyaan wartawan dikumpulkan jadi satu dan dijawabnya sekaligus. Setelah itu tak ada lagi pertanyaan tahap kedua, dan wawancara selesai.

Sedangkan dengan Ibu Negara, Toeti bisa mewawancarainya secara khusus suatu kali untuk Radio Australia. Dalam wawancara, Tien berkata: "Saya hanya bersekolah Ongko Loro. Karena orang tua saya kurang mampu, saya harus memberi kesempatan bersekolah kepada adik saya laki-laki. Kemudian saya les mengetik dan membatik. Ketika zaman revolusi, saya dilamar bapak," demikian tutur Tien Soeharto. Mereka menikah tahun 1947. Tien waktu itu usianya 25 tahun dan Soeharto, yang masih berpangkat letnan kolonel, 26 tahun.

Wawancara kedua untuk majalah Tempo, April 1971. "Semula, saya hanya diberi waktu dua jam," kata Toeti. Ketika wawancara, Toeti mengawali pertanyaannya tentang masa remaja. Saat itu Tien berkata lulus SMA. "Kendati berbeda dengan isi wawancara pertama, saya tak menyangkal," kata Toeti.

Tien Soeharto menjawab pertanyaan Toeti sambil duduk bersila di atas sofa. Kakinya terlihat berbalut stocking. Sembari wawancara, Tien melirik tape recorder. Toeti mencoba menghidupkan alat perekam tersebut, tetapi gagal. Hingga Tien bertanya: "Tahu enggak, sih, kamu dengan tape itu?" Toeti terdiam sebentar. "Maaf Bu, saya kurang paham," jawabnya.

"Ya sudah, ndak usah pakai rekaman. Saya juga ndak tahu tentang alat itu. Ngobrol sajalah, enakan."

Wawancara yang semula dimulai pukul 10.00, belum berakhir sampai pukul 14.00. "Kami masih ngobrol terus ketika Pak Harto pulang dari Bina Graha. Pak Harto hanya memberi salam, tertawa, terus naik ke ruang atas," kata Toeti.

Wawancara ketiga, saat Toeti menjadi wartawan majalah Femina. Tak banyak pertanyaan diajukannya. Ketika itu Tien menganjurkan bagaimana seharusnya perilaku seorang istri dan bagaimana membantu karier suami. "Jangan lupa, minumlah jamu," pesan Tien.

Saidi

Fotografer Istana

"Saya Ini Diajak Ikut, itu kepanjangan nama saya, Saidi," kata Saidi, bergurau. Pria yang kini berusia 65 tahun ini menjadi juru foto di Sekretariat Negara sejak Soeharto menjadi pejabat presiden. Perkenalannya dengan Soeharto dimulai sejak sang Jenderal memimpin Operasi Mandala membebaskan Irian Barat, 1963.

Saidi mengabadikan pertempuran itu karena tugasnya sebagai staf penerangan di Angkatan Darat. Ketika Soeharto menggantikan presiden pertama Soekarno, dia dipanggil menjadi juru foto Istana. "Setelah itu, ke mana saja Pak Harto ke luar negeri, saya diajak," kata bapak empat anak dan kakek sembilan cucu ini.

Selama 32 tahun menjadi juru foto di Istana, dia telah merekam puluhan ribu bahkan mungkin seratusan ribu gambar.

Ia mengaku jarang sekali berbicara dengan Presiden. "Saya ini hanya pion, tak banyak bicara dengan bapak," katanya. Selain mengabadikan berbagai acara kenegaraan, Saidi juga selalu diminta menjadi juru foto acara keluarga. Kameranya tak pernah ketinggalan zaman. Sebab, jika bukan kantor yang memperbarui perlengkapannya, anak-anak Soeharto sering kali membelikannya kamera jenis terbaru.

Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, ini mengaku Soeharto tidak pernah membatasi mana peristiwa yang boleh difoto dan mana yang haram. Dia sendiri yang harus tahu batasannya. "Kalau bapak menerima tamu pribadi, saya tahu tidak akan saya foto," katanya. Meski dia menolak siapa yang dimaksud sebagai tamu pribadi itu.

Sebuah peristiwa yang membuatnya tidak enak hati adalah ketika mengiringi Soeharto bertemu Klompencapir (kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa) di Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto berniat meneruskan perjalanan ke Pacitan, Jawa Timur, menggunakan helikopter. Heli kecil itu hanya muat empat orang, Soeharto bersama tiga jenderal TNI.

Sebelum heli berangkat, tiba-tiba Soeharto bertanya. "Saidi mana?" Pilot menjawab, "Helinya tidak cukup, Pak." Soeharto kemudian memerintahkan salah seorang mayor jenderal turun untuk mencari Saidi. Saat Saidi menghadap, Soeharto memerintahkannya naik. Terpaksa sang mayor jenderal yang memanggil Saidi batal ikut.

Tetapi masa yang paling dikenang Saidi adalah ketika Soeharto lengser. Dialah satu-satunya fotografer yang mengabadikan Soeharto turun tangga Istana diiringi putri sulungnya, Siti Hardijanti Indra Rukmana. Saidi bahkan mengiringi Soeharto hingga pulang ke rumahnya di Jalan Cendana.

Saat itu suasananya murung sekali. Anak-anak dan menantunya sudah menunggu di rumah. Soeharto tak banyak bicara. Keriangan cucu-cucunya pun tak mampu menghibur. Pesan terakhir yang diingat Saidi menjelang pulang dari Cendana: "Wis, Di, kamu ikut Habibie." Itulah saat terakhir pengabdiannya.

Tentang Pasar dan Ekonomi Soeharto

M. Sadli
Ekonom, kolom ini ditulis dua tahun sebelum M. Sadli wafat.

Selama 30 tahun, Soeharto berhasil membangun ekonomi Indonesia dari keadaan yang morat-marit pada 1965/6 menjadi salah satu Macan Asia yang pertumbuhannya menakjubkan. Tetapi Indonesia tetap negara yang paling miskin di antara negara-negara itu karena dasar permulaannya juga yang paling rendah. Pada 1996/7 pendapatan per kapita Indonesia menurut Bank Dunia sudah sedikit melebihi US$ 1.000 setahun, tetapi Malaysia sudah tiga kali lebih tinggi dan Thailand 1,6 kali lebih tinggi. Ekspor Indonesia yang juga tumbuh cepat dan mencapai sekitar US$ 55 miliar setahun, tetapi masih lebih rendah daripada Malaysia (sekitar US$ 75 miliar) dan Thailand (sekitar US$ 60 miliar tanpa minyak bumi) walaupun kedua negara itu penduduknya (jauh) lebih kecil.

Yang membuat Indonesia ketinggalan adalah, selain angka awal (starting base)-nya rendah, kualitas sumber daya manusia serta pendidikan jauh terbelakang oleh karena sejak kemerdekaan tidak banyak dikucurkan dana dan daya kepada sektor yang sangat strategis ini. Karena SDM Indonesia kekurangan dasar, maka industrialisasi di Indonesia juga tidak bisa bersifat "mandiri" (kurang tergantung dari impor) seperti di Taiwan dan Korea Selatan. Kedua negara itu mewarisi kultur yang lebih pro-pendidikan (dasar) dari penjajah Jepangnya sebelum Perang Dunia Kedua.

Selama sekitar 30 tahun itu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,7 persen setahun. Ini berarti bahwa selama 30 tahun itu PDB tumbuh 8?10 kali dan PDB per kapita sekitar 4 kali, dari US$ 250 menjadi US$ 1.000 per tahun. Karena golongan mayoritas yang bawah tidak menikmati kenaikan pendapatan empat kali itu, maka golongan "kelas menengah" di kota-kota, baik di Jakarta maupun di daerah, mengalami kemajuan pendapatan yang jauh lebih besar. Lepas dari adil atau tidaknya, kemakmuran serta purchasing power (daya beli) inilah yang pada dirinya menjadi sumber pertumbuhan lebih lanjut.

Krisis tahun 1997/8 mengguncang sendi-sendi itu dan sampai sekarang tingkat kehidupan tahun 1996/7 untuk sebagian besar masyarakat belum bisa diraih kembali. Kalau para ekonom yang "populis" seperti Dr. Mubyarto mengatakan bahwa krisis ekonomi tidak pernah memukul daerah di luar Jawa dan di luar kota, maka itu sebagian saja benar. Sejak 1997, penduduk tetap tumbuh dan penduduk muda yang keluar sekolah bertambah banyak pula. Tetapi, dengan krisis dan pertumbuhan ekonomi rendah, kesempatan kerja menjadi sangat terbatas. Maka, masalah sosial yang sekarang pun mengganggu kehidupan sosial di daerah-daerah yang lebih rural adalah kegelisahan di antara penduduk yang muda yang kurang punya harapan akan mendapat pekerjaan serta pendapatan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Masalah inilah yang dialami oleh berbagai proyek pertambangan, perkebunan, dan lain-lain agribisnis, terutama proyek besar yang PMA, seperti di bidang

migas (contoh Caltex di Riau) dan pertambangan (contoh-contoh: Freeport, Newmont Mining, Kaltim Prima, PT KEM, PT Inco, dan sebagainya) yang semuanya mengalami masalah-masalah dengan masyarakat sekitarnya. Perusahaan-perusahaan itu menjadi tumpuan harapan penduduk setempat untuk mendapat pekerjaan dan status sosial (sebagai karyawan). Mereka benci tenaga kerja pendatang yang lebih mahir dan sering menang dalam rekrutmen. Orang-orang asing yang memimpin perusahaan-perusahaan pertambangan itu di daerah (yang agak terpencil itu) yang mencemaskan kemungkinan meletusnya pergolakan sosial karena pemerintah, baik pusat maupun daerah, sekarang tidak mampu, mungkin tidak berani, menegakkan law and order, ketertiban sosial, dan perlindungan keamanan kepada perusahaan besar.

Keberuntungan Soeharto pada 1966 adalah bahwa ia bisa menggaet kelompok "teknokrat", kebanyakan dosen ekonomi di Universitas Indonesia, sebagai pembantu dan yang berangsur-angsur menjadi menterinya. Di bidang hukum dan politik juga tersedia dosen-dosen dari Gadjah Mada dan Padjadjaran, yang semuanya mengejar di Seskoad (sekolah jenderal di Bandung) sejak 1957. Kolonel (almarhum) Suwarto yang menjadi Wakil Kepala Seskoad memainkan peran penting meletakkan dasar strategic alliance antara TNI dan kaum teknokrat ini, sedangkan Pak Harto menjadi siswa/peserta pada 1958. Maka, para jenderal itu cukup mengenal para dosen dari UI, Gadjah Mada dan Padjadjaran itu. Yang mendukung keberhasilan di bidang ekonomi adalah para dosen dari FE UI, dengan Prof. Widjojo Nitisastro sebagai primus interparis-nya, ketua tim yang berhasil memimpin kelompoknya lebih dari 30 tahun tanpa adanya keretakan atau persaingan yang keras. Dasar dari kerja sama yang erat sekali ini diletakkan di University of California, Berkeley, ketika kelompok Widjojo ini bersama-sama mengikuti program S3 dari 1957 sampai 1962. Mereka ini menggunakan malam minggu untuk berkumpul dan membicarakan "masalah-masalah ekonomi dan pembangunan" tanah airnya.

Kaidah-kaidah ekonomi dan politik yang berlaku di zaman Soekarno, 1957?1966, dijungkirbalikkan oleh Soeharto karena dianggap gagal menyusun landasan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa. Kaidah pertama zaman Soekarno itu adalah ekonomi terpimpin, bahwa kekuatan pasar tidak diizinkan melakukan fungsinya. Maka, di zaman Orde Baru, pasar dan harga diberi kesempatan jauh lebih banyak untuk melakukan fungsi alokasinya.

Kedua, pemerintah Orde Lama tidak ramah terhadap dunia Barat dan lebih berpihak kepada poros antiimperialis. Bantuan ekonomi lebih banyak datang dari Uni Soviet, tetapi proyek-proyeknya kurang mampu meningkatkan produksi dan kemakmuran, juga oleh karena banyak proyek tidak bisa diselesaikan. Contohnya adalah pabrik baja Krakatau. Stadion besar Senayan banyak manfaatnya, akan tetapi bukan proyek ekonomi.

Orde Baru mengubah orientasi politik luar negeri menjadi "bebas aktif" untuk menerima bantuan dari Barat dan tidak menolak bantuan dari blok Timur asal diberikan

dengan syarat-syarat yang sama. Kesamaan syarat ini juga diberlakukan pada rescheduling utang, yang dirundingkan lebih dulu dengan blok Barat lewat Paris Club.

Ekonomi Orde Baru tidak identik dengan ekonomi liberal ataupun kapitalistis yang murni. Walaupun Prof. Widjojo dkk menjadi perumus utama banyak kebijakan ekonomi tahap pertama Orde Baru itu (1966?1973), Orde Baru lebih merupakan rezim TNI dengan Jenderal Soeharto sebagai panglimanya. Kaum militer tidak terkenal sebagai "demokratis", "liberal", terbuka, dan sebagainya. Nalurinya lebih banyak otoritarian, sentralistis, intervensionis, top-down atau mengikuti sistem komando.

Bahwa Soeharto dan para jenderal bisa mengikuti, bahkan mendukung, resep-resep kebijakan ekonomi yang disarankan oleh kelompok Widjojo, ini memang tidak alamiah, dan harus bisa dijelaskan. Mungkin karena di tahun-tahun pertama (1966?1968) mereka tidak melihat alternatif yang lebih baik. Banyak perwira telah mendapat didikan di Amerika Serikat dan menjadi kagum atas keberhasilan sistem ekonomi di situ. Lagi pula, Widjojo cs juga tidak merupakan ancaman ataupun persaingan bagi mereka. Widjojo dan timnya lebih memusatkan perhatian kepada penataan makroekonomi, bukan mikroekonomi. Bagi-bagi rezeki, misalnya HPH kehutanan, penunjukan kontraktor, dan sebagainya ada di bidang mikroekonomi yang tidak dijamah oleh Widjojo cs. Widjojo dan kawan-kawannya puas menguasai Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, Perdagangan dan Penanaman Modal, yang menjadi benteng-benteng para ekonom teknokrat. Departemen Industri, Kehutanan, Pekerjaan Umum, Bulog, Pertamina, bukan daerah jajahannya. Lagi pula, budaya KKN belum terlalu menjamur pada 1966?1973. Putra-putri Soeharto masih kecil, konglomerat kroni belum besar juga.

Salah suatu kebijakan utama pemerintah yang baru adalah promosi penanaman modal asing dan dalam negeri. Motifnya lebih banyak kebutuhan daripada ideologi. Ekonomi yang berantakan memerlukan modal banyak untuk membangun. Sebagian diusahakan dari bantuan internasional. Maka, IGGI digalang dan arus tahunan yang diperoleh semakin besar, dari beberapa ratus juta dolar pada 1967 sampai beberapa miliar setahun akhir-akhirnya. Sebagian besar dana ini dipakai untuk anggaran belanja pembangunan, untuk membangun infrastruktur fisik dan sosial, termasuk di bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan, listrik, dan sebagainya.

Maka, untuk sektor industri dan jasa-jasa diharapkan masuknya PMA dan PMDN, dan dua undang-undang diterbitkan untuk memberikan insentif dan jaminan. Kebijakan ini berhasil sekali. Modal Amerika dan Barat masuk di bidang migas dan pertambangan umum, dan modal Jepang masuk antara lain ke bidang industri. PMDN ramai masuk di industri, kehutanan, real estate.

Tahap 1966?1973 adalah tahap ekonomi bebas, artinya belum banyak pembatasannya. Rizal Mallarangeng di bukunya, Mendobrak Sentralisme Ekonomi, menyebut tahap ini tahap liberalisasi yang pertama. Ekonomi rata-rata tumbuh di atas 7

persen setahun karena sifatnya rehabilitasi dan sektor pertanian masih bisa tumbuh banyak karena tersedianya teknologi baru produksi padi.

Tetapi, pada 1973?1974 timbul reaksi (Malari) dalam bentuk demonstrasi mahasiswa besar-besaran. Dampak kesenjangan dari ekonomi pasar, yang pada dirinya berhasil meningkatkan laju pertumbuhan, menampakkan dirinya. Amarah mahasiswa ditujukan kepada PMA Jepang, dicetuskan oleh kunjungan Perdana Menteri Jepang. Tetapi, gejala protes mahasiswa ini juga terjadi di Bangkok sehingga merupakan gejala regional. Maka, dilema ekonomi pembangunan yang klasik muncul: laju pertumbuhan yang pesat lewat pasar yang bebas juga menimbulkan kesenjangan. Sebagian masyarakat mulai menolak kapitalisme, pasar bebas, PMA, menguatnya ekonomi nonpribumi.

Maka, sejak 1974 meningkatlah proteksionisme, dirigisme, penjatahan, pemberdayaan usaha pribumi. Rizal Mallarangeng melihat periode 1973?1983 sebagai sentralisme yang kembali. Kelompok Widjojo masih berkuasa dan mencari akomodasi kepada kecenderungan politik ini sambil berusaha agar ekonomi masih berjalan cukup efisien dan terbuka. Antara lain mereka berhasil menangani krisis Pertamina dengan restu Soeharto.

Kebetulan periode ini dikurniai rezeki minyak bumi, sehingga jumlah dana yang tersedia bagi pemerintah lebih dari cukup. Industrialisasi masih bisa berjalan berdasarkan pasar dalam negeri, yang daya belinya disirami oleh rezeki minyak. Biasanya tahap import substitution industrialization hanya berlangsung 10 tahun. Di Indonesia bisa berlangsung sampai 1983, karena ada semacam tahap kedua, dimungkinkan oleh rezeki minyak. Baru pada 1983 produksi tekstil dalam negeri mulai menumpuk karena tidak mampu dijual di luar negeri. Baru setelah devaluasi ekspor naik sangat besar.

Sementara itu, harga minyak bumi jatuh di permulaan dasawarsa delapan puluhan. Masa pancaroba keuangan ini melahirkan kesempatan, dan keharusan, untuk banting setir dalam kebijakan ekonomi umum. Maka, sejak 1983 ada kesempatan menjalankan deregulasi di berbagai bidang. Widjojo (yang bukan lagi Menko Perekonomian di tahun itu tetapi masih berkantor di Bappenas dan tetap "Pak Lurah" bagi kelompoknya), Ali Wardhana, Saleh Afiff, Radius, Sumarlin mencanangkan deregulasi (tahap pertama) di bidang perbankan, perdagangan luar negeri (SGS dari Swiss menggantikan peran Bea-Cukai), memangkas perizinan di bidang industri dan investasi. Deregulasi ini dijalankan secara bergelombang, artinya tidak dalam satu kali pukul, dan tuntas sekitar 1989. Sebetulnya, deregulasi masih berjalan terus, tetapi tambah lama tambah sukar untuk mendapat dukungan Presiden Soeharto. Di masa boom, kesediaan Pak Harto meneruskan deregulasi berkurang karena memerlukan pengorbanan.

Laju pertumbuhan PDB pada dasawarsa delapan puluhan secara rata-rata hanya mencapai 6,1 persen setahun. Ini disebabkan sektor pertanian dan pertambangan mulai jenuh tumbuh (setelah swasembada beras dicapai pada 1983?1984), tetapi laju

pertumbuhan di sektor industri manufaktur mencapai rekor 12 persen setahun, tertinggi di Asia Tenggara. Berkat berbagai deregulasi, maka laju pertumbuhan PDB 1990?1996 mencapai 7,7 persen setahun.

Dua kali terjadi bahwa paket kebijakan yang cocok untuk zamannya dan menghasilkan laju pertumbuhan tinggi pada dirinya menyimpan benih kegagalannya. Pasar bebas 1966?1973 sangat berhasil menumbuhkan ekonomi, tetapi tidak berhasil memperkecil jurang kesenjangan yang bisa dilihat di Jakarta. Deregulasi 1986?1996 melahirkan boom ekonomi, tetapi berakhir dengan krisis dahsyat karena tidak disertai landasan institusional dan lembaga serta sistem pengawasan yang kukuh. Maka, di era Reformasi, institution building dan rebuilding menjadi penting. Pedoman-pedoman yang baru adalah transparency, accountability & good governance.

Bakti Sepanjang Jalan

KABAR dari kawasan Bintaro itu cepat mencapai Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Pemilik rumah langsung menggelar rapat keluarga. Ia mengumpulkan keempat adiknya, kecuali Hutomo Mandala Putra.

Justru Hutomo, alias Tommy, yang jadi pusat keprihatinan. Adik laki-laki bungsu itu diberitakan tertangkap di Bintaro pada 28 November 2001. Elza Syarief, pengacara Tommy yang ikut dalam rapat keluarga itu, mencatat peran Siti Hardijanti Rukmana-biasa disebut Tutut-si pemilik rumah.

Setelah menyimak semua saran, putri sulung Soeharto itu memutuskan agar tim pengacara Tommy diperkuat. "Tim pengacara Pak Harto jadi ikut membantu kami," kata Elza kepada Ami Afriatni dari Tempo.

Tommy, yang didakwa membunuh Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita dan memiliki senjata, lalu diadili. "Sampai berbulan-bulan Mbak Tutut sulit tidur ngurusin kasus Mas Tommy," kata Elza. Tommy jadi buronan selama setahun dan 22 hari.

Tutut ibarat ganjal bagi keluarga Soeharto. Ia mengurusi mulai dari tuntutan pengadilan sampai soal kesehatan ayahnya. Ringkas kata, perempuan yang menikah dengan Indra Rukmana pada 29 Januari 1972 itu selalu tampil di depan membela trah Soeharto.

Orang tuanya memang telah lama memberikan kepercayaan kepada emak tiga anak ini. Ketika ayahnya masih presiden, Tutut mengakui kurangnya waktu Pak Harto dan Ibu Tien memperhatikan anak-anaknya. "Karena itu, sejak di SMA saya telah menjadi ibu sekaligus bapak untuk adik-adik saya," kata Tutut, yang tidak menamatkan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Trisakti, Jakarta, kepada Kompas.

Soeharto selalu mendorong Tutut bergiat di lapangan sosial dan politik. Dalam Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, orang kuat Orde Baru itu memuji aktivitas sosial Tutut. "Itu ajaran yang kami berikan kepadanya, agar tidak hidup sendirian, tapi bermasyarakat."

Tutut lahir pada 23 Januari 1949 di Yogyakarta, ketika Soeharto sedang menyiapkan Serangan Umum 1 Maret. Kelahiran Tutut, kata Soeharto dalam otobiografinya, "Ternyata menambah semangat saya untuk berjuang."

Pada awal 1990-an, Tutut mendirikan Yayasan Tiara Indah, yang menggelar Kirab Remaja Nasional. Ia juga menjadi orang nomor satu di Himpunan Pekerja Sosial Indonesia, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Organisasi Federasi Perhimpunan Donor Darah Internasional, dan Palang Merah Indonesia.

Di dunia bisnis, nama Tutut berkilau pada 1990, ketika perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada, berhasil membangun jalan tol Cawang-Tanjungpriok. Ini perusahaan swasta pertama yang membangun dan mengoperasikan jalan tol.

Kemudian dia melenggang ke bisnis media dengan mendirikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dan beberapa stasiun radio. Dunia politik? Jangan tanya. Dalam Musyawarah Nasional Golkar 1993, dia terpilih menjadi salah satu ketua dewan pimpinan pusat.

Menjelang Pemilihan Umum 1997, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama ketika itu, Abdurrahman Wahid, menggandeng Tutut ke sejumlah pesantren. Kepada para kiai dan santri, Gus Dur menyebut Tutut tokoh masa depan.

Dalam Sidang Umum MPR 1998, Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Tutut masuk kabinet sebagai Menteri Sosial. Ikut masuk kabinet sejumlah orang dekat Tutut di Golkar: Jenderal (Purn.) Hartono, Theo Sambuaga, Ary Mardjono, dan Muladi.

Tapi, apa daya, kabinet itu hanya bertahan dua bulan. Soeharto lengser karena gelombang unjuk rasa mahasiswa. Redupkah ambisi politik Tutut? Ternyata tidak. Menjelang Pemilu 2004, ia mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa, yang dipimpin Hartono dan Ary Mardjono.

Partai itu, yang menggadang-gadangnya sebagai calon RI-1, memang tak digubris pemilih. Tapi Tutut tak kekurangan pekerjaan, terutama merawat ayahnya, yang sejak lengser sering sakit-sakitan-sampai akhirnya menutup mata.

Petualang yang Kini Menyendiri

SIGIT Harjojudanto sekarang sudah berubah. Putra kedua Soeharto ini gemar menyepi. Terkadang berminggu-minggu mengurung diri di salah satu hotel di Bali. Bila pulang ke rumahnya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat, pria 57 tahun ini lebih senang di dalam kamar.

Sebelum Soeharto meninggal, ayah tiga anak itu jarang kumpul bersama kerabatnya di Jalan Cendana. Ia juga renggang dengan istrinya, Elsje Anneke Ratnawati. Misalnya, Sigit tak terlihat dalam pengajian keluarga. Kalaupun ia keluar rumah, ia hanya berjalan kaki di dekat kediamannya. Lidahnya juga tak asing dengan makanan murahan kaki lima.

Cerita yang disampaikan oleh orang dekat Sigit ini memang bertolak belakang dengan kehidupannya pada masa ayahnya berkuasa. Menurut seorang partner bisnisnya, Sigit gemar berjudi. Hobinya itu, konon, pernah membuat Soeharto jengkel sehingga melarang Sigit ke luar negeri.

Soal uang tak jadi masalah baginya. Lelaki yang cuma mengecap pendidikan di sekolah lanjutan atas ini memiliki saham di puluhan perusahaan.

Sigit adalah tipikal putra Soeharto yang pendiam. Dia cenderung menutup diri dari hiruk-pikuk media massa. Cuma satu kegiatannya yang membuatnya tak menghindar dari wartawan, yaitu menyangkut aktivitasnya di bidang olahraga. Di sini dia menorehkan "nama baik".

Sigit mendirikan klub sepak bola Arseto pada 1978. Sigit memang penggemar bola. "Ketika di SMP, saya adalah penyerang," katanya waktu itu. Peran di klub bola inilah yang kemudian mengantar Sigit menjadi Ketua Harian Liga Sepak Bola Utama pada 1980-an.

Dia pula yang merintis PSSI Garuda. Di tangannya, tim PSSI mencatat prestasi yang bagus, yaitu menempati posisi kedua perebutan Piala Raja di Thailand, 1983. Pada tahun yang sama, dia ditabalkan menjadi Pembina Olahraga Terbaik 1983.

Di dunia usaha, ia pernah berbisnis dengan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Sigit adalah salah seorang pemegang saham di PT Victor Jaya Raya (VJR) yang berkantor di Medan, Sumatera Utara. Perusahaan pengembang ini membangun hunian mewah lengkap dengan lapangan golf di Pancur Batu, Sumatera Utara. Berdiri pada 1991, VJR mengandalkan kucuran kredit dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU).

Mula-mula kredit mengalir ke VJR Rp 18 miliar, hingga 1996 tercatat utang VJR di BPDSU mencapai Rp 200 miliar. Perusahaan ini gampang memperoleh kredit karena pengaruh Sigit dan Raja Inal. Kendati macet, tak ada yang mempersoalkannya kala itu. Raja

Inal sendiri tak lagi bisa dimintai konfirmasi. Pada September 2005 ia tewas dalam kecelakaan pesawat Mandala Airlines di Bandar Udara Polonia, Medan.

Setelah Soeharto lengser dari tampuk kekuasaan, kasus Sigit muncul ke permukaan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pernah mempersoalkan pada 1998. Hanya, kredit macetnya tetap tak tersentuh. Dia tak pernah memenuhi panggilan jaksa di Medan itu.

Bukan hanya Sigit, bahkan istrinya, Elsje, juga berurusan dengan penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya, Maret 2002. Seorang pria bernama Stephanus Setiawan membuat laporan ke Polda Metro Jaya, isinya: Elsje menipunya Rp 20 miliar. Laporan itu kandas di tengah jalan. Baik Sigit dan Elsje tak bisa dimintai konfirmasi. Tapi, kata Juan Felix Tampubolon, kuasa hukum keluarga Soeharto. "Semua itu hanya omong kosong belaka."

Bagai Menunggu Jam Pasir

LEBIH dari 10 tahun namanya tenggelam bak ditelan bumi, pada akhir tahun lalu ia kembali menjulang. Nama Bambang Trihatmodjo mendadak masuk jajaran superkaya versi Forbes Asia edisi 13 Desember. Berada di urutan ke-33, ia menjadi satu-satunya anak Soeharto di deretan orang tajir di Indonesia. Lulusan Polytechnic Institute of Virginia, Amerika Serikat, 1979 ini memiliki kekayaan US$ 200 juta atau Rp 1,9 triliun. Sebagian besar berasal dari hampir 13 persen saham Asriland di Global Mediacom-nama baru Bimantara-konglomerasi yang dirintisnya sejak ia masih berusia 28 tahun.

Sejarah Bimantara memang fenomenal. Awalnya, grup bisnis ini hanya bergerak di bidang perdagangan, tapi dengan cepat mereka menggurita. Asuransi, rumah mewah, konstruksi, televisi, perhotelan, transportasi, perkebunan, perikanan, otomotif, makanan, kimia, dan pariwisata dirambah dengan mudah. Di puncak kejayaan, ada 56 perusahaan yang bernaung di bawah beberapa induk perusahaan dengan Bimantara sebagai bintangnya.

Analis GSH Consulting, Goei Siaw Hong, mengatakan bisnis Bimantara melejit karena mendapat banyak perlakuan istimewa. Mereka yang pertama mendapat lisensi jaringan seluler GSM melalui Satelindo, kemudian dijual ke Indosat. Mereka juga yang paling dulu mendapat izin mendirikan stasiun televisi swasta di Indonesia, RCTI.

Bambang pernah memonopoli perdagangan jeruk di Kalimantan melalui PT Bima Citra miliknya. Pada 1993, dia melepasnya setelah dikritik keras karena merugikan petani. "Memang keistimewaannya tak sebanyak yang didapat Tutut dan Tommy," kata Hong.

Mendapat banyak kesempatan, kemudahan, dan pinjaman bank, membuat bisnis mereka melaju tanpa hambatan. Boleh dikatakan, tak ada saingan berarti. Itu membuat untung datang berlipat-lipat. Rezekinya terus melimpah bagai menunggu jam pasir. "Ini sebenarnya tipikal konglomerat di Indonesia, bukan hanya Bambang," kata Hong.

Gerakan melambat ketika krisis ekonomi terjadi pada 1997. Turunnya Soeharto setahun kemudian membuat sejumlah perusahaan mereka mulai limbung. Bisnis tanpa fondasi kuat itu satu per satu ambruk. Utang yang menumpuk akibat ekspansi tanpa perhitungan matang makin membuat jalannya terseret-seret.

Catatan BPPN pada 1999 menunjukkan Bambang Trihatmodjo menjadi peminjam terbesar Bank Mandiri di antara 50 debitor kakap lainnya. Utangnya di atas Rp 20 triliun. Tempat kedua diduduki adiknya, Hutomo Mandala Putra, dengan kredit hampir Rp 5 triliun. Uang itu sebagian besar disalurkan Bambang ke Chandra Asri, yang dirancang dengan investasi US$ 2,25 miliar. Kredit kedua terbesar dikucurkan ke Apac Centertex sebesar Rp 865,4 miliar.

Contoh keistimewaan lainnya adalah ketika Bank Andromeda miliknya dilikuidasi pada 1997. Dua minggu kemudian, ia mendapat izin membeli 99 persen saham Bank Alfa. Izin turun karena dia lolos dari daftar orang tercela Bank Indonesia. Memang, tak semua pemilik dan direksi bank likuidasi menjadi orang tercela. Bambang beruntung, tak termasuk salah satu di antaranya.

Suami artis Mayangsari ini juga satu-satunya yang dibolehkan membayar sendiri deposannya. Bankir lain, yang banknya dilikuidasi bersamaan, tidak mendapat kesempatan itu. Pembayaran deposan mereka dialihkan ke bank yang ditunjuk pemerintah.

Angin bisnis berbalik arah. Chandra Asri sudah lama dilepas kepada Prajogo Pangestu, sebagai bagian dari restrukturisasi utang. Peter Gontha mengatakan Bambang memang menjual saham di sebagian perusahaan. "Kita tidak tahu strategi apa yang ia jalankan," kata Peter, yang masih sering bertemu sobat lamanya itu. Peter tak mau bicara soal geliat bisnis di masa lalu.

Lewat Global Mediacom, pria 53 tahun ini, kini masih memiliki belasan perusahaan, seperti televisi, radio, koran, telekomunikasi hingga Plaza Indonesia. Meski tak sampai habis-habisan dan masih kaya raya, kehilangan mayoritas saham Bimantara, cikal-bakal bisnisnya yang sudah berusia setengah abad itu, mengundang tanda tanya. Apa yang tengah dipikirkan pecandu olahraga menembak ini?

Balik ke Kancah Bisnis

SEPOI-sepoi, nama Siti Hediati Harijadi berembus lagi di kancah bisnis nasional. Anak keempat mantan presiden Soeharto ini sejak Juli 2005 diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Surya Citra Media Tbk.

Pengangkatan Titiek-nama panggilan perempuan 49 tahun itu-tak lepas dari kepemilikan sahamnya di perusahaan induk pengelola stasiun televisi SCTV itu. Bahkan, kabarnya, janda bekas Panglima Kostrad Letjen (Purn.) TNI Prabowo Subianto ini pun diam-diam terus menambah pundi-pundi sahamnya di sana.

Di dunia bisnis, Titiek memang tak seheboh saudara-saudaranya. Meski begitu, jangan bilang jumlah perusahaan dan kekayaannya "sekuku" doang. Menurut laporan majalah Time edisi 24 Mei 1999, kekayaannya diperkirakan US$ 75 juta atau kini setara dengan Rp 700 miliar. Jumlah itu memang jauh lebih kecil dibanding kekayaan saudara-saudaranya.

Masih menurut Time, kekayaan Siti Hardijanti Rukmana mencapai US$ 700 juta, Sigit Harjojudanto US$ 800 juta, Bambang Trihatmodjo US$ 3 miliar, dan Tommy Soeharto US$ 800 juta. Namun nilai kekayaan Titiek masih di atas Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek yang ditaksir "cuma" US$ 30 juta.

Pada masa kekuasaan ayahnya, Titiek berkibar lewat bendera Grup Daya Tata Matra (Datam) dan Grup Maharani. Di bawah dua perusahaan induk itu, sekitar sembilan sektor bisnis pernah dirambahnya.

Salah satu tulang punggung bisnisnya, antara lain, bergerak di sektor perdagangan. Sedikitnya lima perusahaan tercatat punya kaitan dengan dirinya, yaitu PT Aditya Nusa Bakti, PT Agung Concern, PT Dasa Mitra Upaya, PT Redjo Sari Bumi, dan PT Wahana Datam Tiara.

Sektor lain yang juga menjadi tumpuan kerajaan bisnis Titiek ialah sektor jasa keuangan dan investasi. Di sini bernaung delapan perusahaan, termasuk PT Aditya Matra Leasing, PT Maharani Intifinance, dan tiga di antaranya bergerak di bisnis perbankan: PT Bank Industri, PT Bank Putra Sukapura, dan PT Bank Universal.

Di sektor keuangan ini pula, Titiek dulu pernah "mesra" berkongsi bisnis dengan dua sejawatnya, yaitu Tito Sulistyo dan Hary Tanoesoedibjo-kini menjabat Presiden Direktur PT Bimantara Citra. Bersama Tito yang kini juga bergabung di Bimantara, Titiek mendirikan PT Pentasena Arthasentosa, yang bergerak di bidang jasa keuangan dan investasi.

Dengan Hary, Titiek pernah bersinggungan ketika menjadi pemegang saham PT Bhakti Investama pada 1997, yang saat itu menjadi satu-satunya kendaraan bisnis keluarga

Tanoesoedibjo. Yang menarik, Hary kini justru berseteru dengan Siti Hardijanti Rukmana, alias Tutut, dalam urusan kepemilikan saham stasiun televisi TPI.

Di luar sektor perdagangan dan jasa keuangan, enam sektor lain yang dirambah Titiek adalah sektor perkebunan, kehutanan, kimia dan semen, konstruksi, properti-perkantoran-perbelanjaan, transportasi, dan media.

Salah satu proyek bisnisnya yang hingga kini masih berjalan adalah Mal Taman Anggrek. Pusat belanja di kawasan Slipi, Jakarta Barat, ini dibangunnya bersama Grup Mulia. Proyek lainnya yang hingga kini juga masih menghasilkan duit adalah Plaza Senayan, hasil kongsinya dengan Hashim Djojohadikusumo.

Berbeda dengan saudara-saudaranya, Titiek banyak berkecimpung dalam urusan seni lukis bersama Susrinah Sanyoto Sastrowardoyo, Ketua Umum Yayasan Seni Rupa Indonesia. Ketika yayasan ini menyelenggarakan bursa seni lukis Indonesia pada 1997, Titiek bahkan menjadi ketua pelaksananya.

Kecintaannya pada dunia seni lukis membuat pemilik rumah di Grosvenor Square, London, ini rajin mengoleksi lukisan yang, menurut Time, nilainya sekitar US$ 5 juta. Titiek juga dikenal pemuja bintang-bintang film tersohor. Tak mengherankan bila dalam salah satu pesta keluarga Soeharto di Bali pada 1994, ia asyik berdansa menghabiskan malam dengan bintang laga Hollywood Steven Seagal.

Tetap Mumpuni Walau di Bui

Dari enam anak Soeharto, garis hidup Hutomo Mandala Putra alias Tommy boleh dibilang paling berliku. Keluar-masuk ruang pengadilan, diburu polisi ke mana-mana, mendekam di penjara Nusakambangan, dan kini masih terus "berkelahi" dengan pemerintah dalam sejumlah kasus di pengadilan.

Tommy ditangkap pada November 2001 dengan tuduhan menjadi otak pembunuhan Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita. Sang hakim menyambut ajal di ujung peluru, Juli 2001. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memvonis Tommy 15 tahun penjara. Dia terbukti melakukan empat tindak pidana: kepemilikan senjata api, kepemilikan amunisi, pembunuhan Syafiudin, serta melarikan diri.

Putra kesayangan Soeharto itu dihukum kurung di Cipinang, Jakarta Timur. Berbeda dengan narapidana pembunuhan lain, Tommy punya ruang pribadi berfasilitas komplet. Ada kamar mandi dalam dan mesin pengatur suhu. Hampir setiap hari istri, anak, kawan, dan kerabat datang membesuk ke penjara.

Dari Cipinang dia dipindahkan ke Nusakambangan, 16 Agustus 2002. Di sana dia menghuni salah satu sel Admisi dan Orientasi bersama "Paman Bob" alias Mohammad Hasan, kawan bapaknya. Di ruang tersebut ada televisi dan koran baru setiap pagi. Setumpuk buku, dari soal wirid dan tahlil hingga agroindustri melengkapi isi kamar. Perkakas untuk aneka keperluan juga tersedia.

Saat berada di Nusakambangan, Tommy beberapa kali ke Jakarta menjenguk sang ayah yang ketika itu sedang sakit maupun untuk berobat. Narapidana lain belum tentu beroleh izin bahkan bila ada kerabat yang meninggal. Pada Juni 2005, Mahkamah Agung mengkorting hukumannya dari 15 tahun menjadi 10 tahun.

Tommy datang lagi ke Jakarta menjelang ulang tahunnya yang ke-43, Juli 2005. Kali ini untuk mengobati kepalanya yang sakit. Tapi sejumlah media memberitakan Tommy terlihat di sebuah vila di Puncak. Seorang kerabat dekat keluarga Cendana membisikkan kepada Tempo: "Ulang tahun Mas Tommy dirayakan di Puncak. Bapak sepuh dan seluruh keluarga, kecuali Mas Bambang Tri, turut hadir."

Sementara itu, menurut dokter, Tommy menderita vertigo. Di belakang mata kirinya ada benjolan tumor. Karena itu, ia memerlukan perawatan rutin. "Pemeriksaan sebulan sekali. Bila ada masalah mendadak, kami langsung diberi tahu," kata Robert Hutauruk, koordinator pemeriksa kesehatan Tommy di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, ketika itu.

Pria yang gemar balap mobil ini tetap mampu mengendalikan bisnis dari penjara saat menjalani hukuman bui. Tatkala Tempo mengunjunginya di Nusakambangan pada

pertengahan 2005, serombongan pengusaha dipandu bekas Sekretaris Jenderal Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh-lembaga yang dulu dipimpin Tommy-Yance Woworican, antre di luar selnya menunggu giliran sowan. "Semua masih saya pantau dan arahkan," kata Tommy kepada Tempo ketika itu.

Salah satu sisi kehidupan mantan pembalap ini adalah dia seolah tak pernah jauh dari perempuan. Sewaktu buron, dia ditemani perempuan muda asal Aceh bernama Lany Banjaranti. Seorang bocah laki-laki lahir dari hubungan mereka. Lalu mantan model Sandy Harun yang mengaku di sejumlah media bahwa dia sering bertandang ke sana. Sandy juga mengatakan memiliki anak perempuan dari Tommy.

Pada Oktober 2006, Tommy dihadiahi remisi 31 bulan. Remisi besar itu diprotes sejumlah kalangan tapi Tommy tetap melenggang ke dunia bebas. Dia kembali bertempur dengan pemerintah dalam sejumlah kasus, di antaranya perebutan duit Rp 650 miliar di Bank Paribas Cabang Guernsey, Inggris. Dana jumbo itu dibekukan atas perintah dinas intelijen ekonomi Inggris. Lembaga itu menduga uang tersebut "terkait dengan Soeharto" dan hasil money laundering.

Tommy kemudian menggugat Paribas ke Pengadilan Guernsey, tapi bank itu meminta pemerintah Indonesia ikut serta dalam kasus ini. Pemerintah mengklaim berhak atas dana itu karena "diduga diperoleh dari bisnis tidak halal di Indonesia".

Otto Cornelis Kaligis, kuasa hukum Tommy, membantah keras. Uang itu, katanya, "Hasil bisnis Pak Tommy di luar negeri." Selain kekayaan di Guernsey, Tommy dan pemerintah kini tengah memperebutkan duit Rp 1,3 triliun di Bank Mandiri. Hingga ayahnya berpulang dua pekan lalu, perseteruan Tommy dengan pemerintah di pengadilan belum juga usai.

Si Bungsu yang Enggan Tampil

DARI keenam anak Soeharto, si bungsu Siti Hutami Endang Adiningsih-lah yang paling jarang disorot media. Berwajah Jawa, dengan rambut ikal, Mamiek-begitu ia biasa disapa-44 tahun, biasanya hanya tersenyum di belakang kakak-kakaknya saat mereka diwawancarai wartawan. Baru belakangan ia mulai disorot ketika mulai terjun dalam bisnis saat memperkenalkan Taman Buah Mekarsari yang dikelola perusahaannya, PT Unggul Mekar Sari.

Tapi seandainya Pak Harto tidak lengser pada 21 Mei 1998, akankah Mamiek tetap memelihara sikap low profile itu, terutama dalam bisnis?

Pertanyaan hipotesis yang mungkin tak pernah tebersit di benak banyak orang ini dijawab George Junus Aditjondro. "Seandainya ayahnya tidak dipaksa turun takhta, perusahaan milik Mamiek rencananya akan mengimpor pesawat terbang Sukhoi 30K serta helikopter Mi-17 dari Rusia untuk keperluan Angkatan Udara," tulis Aditjondro dalam artikelnya "Suharto Has Gone, but the Regime Has Not Changed: Presidential Corruption in the Orde Baru".

Nilainya, berdasar penelusuran Tempo, bukan picisan. Sebanyak 12 pesawat Sukhoi itu bernilai US$ 33 juta per pesawat. Sedangkan helikopter Mi-17 berharga US$ 4,5 juta. Saat itu bahkan negosiasi pembelian satu batalion rudal jarak sedang BUK M-1 dari Rusia sudah dimulai. Tim negosiasi dipimpin mantan Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita. Rusia tak mau turunkan harga dari US$ 150 juta. Total pembayaran US$ 600 juta. Menurut majalah Panji Masyarakat, peran Mamiek lebih sebagai agen penjualan Rusia di sini. Tapi rencana jual-beli rudal ini rontok setelah badai krisis ekonomi bertiup mulai Juli 1997.

Rudal dan Mamiek? Bagi banyak orang, pasangan itu sungguh tak cocok. Publikasi yang tersiar, ibu satu putra dari perkawinannya dengan Pratikto Prayitno Singgih itu hanya berbisnis sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebagai alumni Institut Pertanian Bogor. Saat bapaknya masih berkuasa, televisi kerap menyiarkan gambar Ibu Tien beserta para cucu diantar oleh Mamiek memetik buah di Taman Buah Mekar Sari, sebuah lokasi pengembangan riset botani sekaligus tempat rekreasi keluarga seluas 264 hektare di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

Tak banyak yang tahu bahwa perusahaan pengelola taman buah itu, PT Unggul Mekar Sari, hanyalah salah satu anak perusahaan dalam kelompok Manggala Krida Yudha, induk perusahaan Mamiek. Bisnis Manggala bukan buah, melainkan mengimpor suku cadang pesawat pengangkut militer C-130 Hercules dengan nilai US$ 15 juta. Masih belum percaya? Dengan bendera PT Dwipangga Sakti Prima, Mamiek juga mengimpor stimulator pesawat yang sama senilai US$ 30 juta. Harap diingat, semua bisnis ini terjadi sebelum 1998 ketika rupiah belum loyo seperti sekarang.

Si ragil Mamiek lahir pada 23 Agustus 1964 ketika ayahnya menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Ia lahir dalam keadaan sungsang. Pada umur 13 bulan, ketika sedang belajar berjalan, Mamiek kecil tertatih-tatih mengejar kakaknya, Tommy, saat itu 4 tahun, yang berlari mencari perlindungan pada ibunya di dapur. Kaget oleh kedatangan Tommy yang tiba-tiba, sepanci sup daging rusa yang masih panas di tangan Ibu Tien tumpah mengguyur Tommy. Insiden yang terjadi empat hari sebelum meletusnya G30S/PKI itu membuat Tommy dirawat di RSPAD.

Setelah Soeharto lengser dari jabatan pada 1998, Mamiek berurusan dengan pengadilan. Pada 18 Desember 2000, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Asep Iwan Irawan memutuskan Mamiek bersalah karena tidak melaporkan hilangnya pistol merek NAA kaliber 22 milimeter yang dimilikinya. Anak bungsu itu dijatuhi hukuman kurungan badan 10 hari dengan masa percobaan 30 hari. Ia diwajibkan membayar biaya perkara Rp 1.000. Tapi, karena selama 30 hari itu Mamiek tak melakukan tindak pidana apa pun, ia urung masuk hotel prodeo.

Juan Felix Tompubolon, pengacara keluarga Soeharto, mengatakan tak benar Manggala Krida Yudha terlibat bisnis peralatan militer. "Data yang diungkap itu keliru," ujarnya. Mengenai pistol, menurut Juan, memang saat itu ada pemeriksaan, Mamiek lupa menaruh pistolnya. Setelah minta waktu untuk mencari, senjata api tersebut ditemukan berikut surat-suratnya. "Bentuk pistolnya kecil. Ketelingsut karena waktu itu beliau sedang pindah rumah."

Tragedi 1965, Menggantung Pertanyaan

ANAK sulung Nyoto, Svetlana, mengaku ingin melihat Soeharto dituntut atas tragedi 1965. Tapi putri Wakil Ketua II CC PKI itu tak pernah ikut dalam kelompok-kelompok keluarga korban G30S yang menggugat pemerintah. "Saya tahu tuntutan-tuntutan itu penting, tapi saya pesimistis ada gunanya," katanya dua tahun lalu.

Menurut Svet, ibunya, Sutarni, juga punya keinginan sama. Tapi Nyonya Nyoto, yang kini berusia 79 tahun, itu tidak menyimpan amarah terhadap Soeharto. Padahal, katanya, "Ada teman Ibu yang marah hingga sakit jika mendengar Soeharto bebas dari tuntutan hukum."

Keluarga Nyoto adalah contoh korban G30S yang menjalani hidup tanpa luka dan trauma. Sutarni bisa menceritakan pengalamannya memboyong anak-anaknya, berpindah dari satu rumah tahanan ke rumah tahanan lain, dengan ringan, bahkan tanpa kehilangan rasa humor. Mereka tak tahu kapan dan di mana sang suami dan ayah dibunuh, apalagi tahu kuburnya.

Tentu tak semua korban G30S bersikap seperti keluarga Nyoto. Sebab, tragedi 43 tahun silam itu melibatkan jumlah manusia yang tidak sedikit. Sekitar tiga juta orang meninggal, belasan ribu dikirim ke Pulau Buru, dan jutaan lainnya menerima perlakuan diskriminatif. Orde Baru, yang dipimpin Soeharto, menciptakan perangkat hukum yang melegitimasi berbagai tindakan aniaya terhadap masyarakat dengan cap komunis pada waktu itu.

Pengiriman ribuan orang ke Pulau Buru, misalnya, sebenarnya demi mengamankan rezim yang baru lahir agar menang dalam pemilihan umum pertama di era Orde Baru, pada 1971. Seharusnya pemerintah sementara pengganti Soekarno menggelar pemilu pada 1968. Tapi, karena Soeharto-yang saat itu menjadi penanggung jawab keamanan-belum siap, hajatan nasional itu ditunda.

Mem-Buru-kan ribuan orang itu, dengan klasifikasi Golongan "B", disahkan dengan surat Panglima Komandan Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) No. KEP 009/KOPKAM/2/1969, yang ditandatangani Maraden Panggabean atas nama Soeharto. Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Pangkopkamtib melengkapi aturan hukum lain untuk "melegalkan" penahanan di Pulau Buru, 1969-1979.

Adapun Golongan "C", atau yang dianggap terpengaruh ideologi kiri, setelah ditahan mendapat "hukuman" dalam bermasyarakat, seperti dilarang menjadi pegawai negeri, menjadi anggota parlemen, bahkan ikut pemilihan umum. Pemerintah membakukan beberapa peraturan pembenaran diskriminasi itu, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32/1981, yang melarang orang yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan G30S menjadi pegawai negeri, tentara, pendeta, guru.

Pertanyaan itu memang tetap menggantung: bersalahkah Soeharto dalam tragedi 1965? Memang, terutama setelah reformasi, para korban "gempa politik" itu melakukan beberapa upaya hukum menuntut pemerintah-bukan Soeharto langsung-agar bertanggung jawab, dengan cara merehabilitasi nama dan memberikan ganti rugi. Tapi semua tuntutan itu kandas.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun membentuk tim untuk menyelidiki pengiriman paksa ribuan orang ke Pulau Buru, sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Anggota Komnas HAM, M.M. Billah, membentuk tim dan membuat proposal. Tapi, ternyata, metodologi penyelidikan yang ditawarkan Billah tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pertengahan 2004.

Menurut Billah, gugatan terhadap Soeharto untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di Pulau Buru ini bisa dihidupkan kembali jika tujuh dari 20 anggota Komnas HAM menyetujuinya. "Tapi, itu juga belum jaminan penyelidikan itu akan berlanjut, karena harus kembali minta persetujuan DPR," kata Billah. Dia mengakui, berat sekali mengangkat kasus pelanggaran berat hak asasi Pulau Buru hingga ke pengadilan. "Masing-masing kepala punya kepentingan," ia menambahkan, seperti bertamsil. Mungkin jawaban seperti itulah yang membuat orang seperti Svetlana cenderung pesimistis.

Lari dari Malari

LIMA belas Januari 1974. Mahasiswa turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi menentang kedatangan Perdana Menteri Kakuei Tanaka dari Jepang. Tanaka dianggap sebagai simbol modal asing yang mesti dienyahkan. Aksi berupa long march dari Salemba menuju Univeritas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat, itu mengusung tiga tuntutan: pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi mengenai modal asing, dan pembubaran lembaga Asisten Pribadi Presiden. Ratusan ribu orang ikut turun ke jalan. Tetapi aksi ini kemudian berujung pada kerusuhan.

Menurut Hariman, aksi mahasiswa usai pukul 14.30. "Sedangkan kerusuhan terjadi satu jam kemudian," katanya. Massa yang mengaku dari kalangan buruh itu menyerbu Pasar Senen, Blok M, dan kawasan Glodok. Mereka melakukan penjarahan serta membakar mobil buatan Jepang dan toko-toko.

Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Soemitro sempat menghadang massa di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dia berusaha membelokkan gerakan massa yang mengarah ke Istana Presiden. "Ayo, ikut saya, kita jalan sama-sama ke Kebayoran!" teriaknya. "Maksud saya, mau membuat tujuan mereka menyimpang, supaya jangan sampai ke arah Monas...."

Massa tak beranjak. Kepada Tempo beberapa tahun silam, Soemitro mengaku sudah menawarkan dialog antara Dewan Mahasiswa UI dan Tanaka. Tanaka sudah bersedia, tetapi DM-UI menjawab bahwa "dialog diganti dengan dialog jalanan...."

Tetapi Jakarta sudah telanjur menjadi karang abang. Hari itu belasan orang tewas, ratusan luka-luka, hampir seribu mobil dan motor dirusak dan dibakar, serta ratusan bangunan rusak. Ini masih ditambah 160 kilogram emas yang hilang dari sejumlah toko perhiasan. Saking rawannya, Soeharto mesti mengantar Tanaka menumpang helikopter ke Bandara Halim sebelum bertolak kembali ke negerinya.

Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia saat itu, diseret ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindakan subversi. Setelah empat bulan sidang, vonis enam tahun penjara mesti ia tanggung.

"Saya dianggap merongrong kewibawaan negara," kata Hariman ketika ditemui, Maret 2006. Harga yang harus ia bayar pun kelewat mahal. Saat menghuni hotel prodeo itulah ayahnya meninggal, istri tercintanya sakit, dan anak kembarnya meninggal.

Peristiwa yang dikenal sebagai Malari itu mengubah perjalanan Indonesia. Sebab, menurut sejarawan Asvi Warman Adam dalam sebuah artikelnya, setelah itu Soeharto melakukan represi secara sistematis. Sjahrir, yang ikut ditahan setelah peristiwa tersebut, menilai Malari adalah bentuk konsolidasi kekuatan Soeharto.

Total aparat menggaruk 750 orang-50 di antaranya pemimpin mahasiswa dan cendekiawan, seperti Hariman Siregar, Sjahrir, Yap Thiam Hien, Mohtar Lubis, Rahman Tolleng, dan Aini Chalid. "Bayangkan, tanggal 11 Januari masih dipeluk-peluk Soeharto, tanggal 17 gue ditangkap," Hariman mengenang. Pada 11 Januari, Soeharto memang menerima Hariman bersama tokoh mahasiswa lain di Bina Graha. Soeharto bermaksud meredam aksi mahasiswa.

Para tokoh itu ditahan berdasar Undang-Undang Antisubversi. Sebagian dari mereka dibebaskan setahun setelah meringkuk di penjara, karena terbukti tak terlibat. Pengadilan berdasar UU Antisubversi itu menuai kecaman.

Sampai detik ini, persoalan kerusuhan itu tak pernah terungkap. Sjahrir mengungkapkan pengadilan tak mampu membuktikan mahasiswa ada di balik aksi pembakaran mobil dan perampokan itu. Tak mengherankan jika muncul dugaan bahwa petaka Malari adalah bara yang memercik akibat rivalitas antara Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo (asisten pribadi Presiden dan Kepala Operasi Khusus waktu itu). Soemitro dituding memiliki ambisi kekuasaan seperti disebut dalam Dokumen Ramadi. Menurut Asvi Warman, Ramadi saat itu dikenal dekat dengan Ali Moertopo.

Almarhum Soemitro pernah mengaku menanyai Ali Moertopo soal isu rivalitas-jauh sebelum Malari meletus. "Li, suara di luar mengatakan kamu rival saya. Itu tidak bisa, saya ini masih militer, tak punya tujuan politik. Kamu bintang dua, saya bintang empat. Kamu Deputi Bakin, saya Pangkopkamtib dan Wapangab. Jarak kita terlalu jauh untuk jadi rival. Tapi, kalau kamu mau jadi presiden, itu hakmu." Saat itu Ali Moertopo langsung membantah. "O, tidak. Tidak ada pikiran seperti itu," kata Soemitro mengutip jawaban Ali.

Peristiwa Malari membuat kedua jenderal itu akhirnya kehilangan jabatan. Soeharto mencopot Soemitro dari kursi Panglima Kopkamtib/Wapangab. Sementara dia juga membubarkan lembaga Aspri. Namun beberapa tahun kemudian Soeharto masih memakai Ali Moertopo untuk berbagai jabatan di birokrasi.

Kini, lebih dari tiga dekade telah lewat, misteri masih menyelimuti peristiwa itu. Dalam biografinya, Soeharto tak menyinggung periode kelam tersebut. Hariman sekarang hanya bisa berharap agar pemerintah segera mengungkap kejadian itu.

Para Penembak dalam Gelap

Suatu malam, 26 Juli 1983, nun di Lubuk Pakam, 40 kilometer dari Medan. Dari remang-remang, Suwito, pemilik dua warung di desa itu, melihat lima orang yang menghampirinya. Mereka meminta Suwito mengikuti mereka karena butuh keterangan.

Tanpa curiga, Suwito naik ke mobil Landrover putih penjemput. Di dalam mobil, mereka bertanya soal Usman Bais, pemimpin perampok terkenal dari Medan saat itu yang pernah makan di warungnya. Suwito membantah punya hubungan dengan sang perampok, apalagi ketika mereka menuduh Usman Bais sebagai orang yang memberi modal untuk warungnya.

Menurut cerita Suwito, ia dibawa berputar-putar di pinggiran Medan selama dua jam. Ia sempat difoto dua kali. Di Desa Hamparan Perak yang sepi, Suwito dipaksa turun. Seorang penjemputnya ikut turun. "Orangnya sedang-sedang, tegak, tapi agak pincang," kata Suwito.

Begitu turun, lelaki pincang mencabut pistolnya. "Tiga kali dor, saya jatuh. Saya masih bisa mendengar salah seorang penjemput menyuruh supaya kepala saya ditembak. Tapi orang yang diperintah bilang saya sudah mati, setelah meraba perut saya," kata Suwito. Ia memang menahan napas berpura-pura mati. Suwito lalu dilempar ke parit di pinggir jalan.

Pada 1983, adegan seperti itu terjadi di mana-mana di segenap penjuru Indonesia yang kelak dikenal sebagai peristiwa Petrus (Penembak Misterius). Kala itu, warga Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia menjadi terbiasa dengan mayat-mayat bertebaran. Namun, mereka sama sekali tak mengetahui siapa pembunuhnya.

Pemerintah pada awalnya enggan menjelaskan penemuan mayat-mayat itu. Aparat keamanan pun menepis keterlibatan mereka. Panglima ABRI saat itu, Jenderal L.B. Moerdani, misalnya, hanya menyatakan bahwa pembunuhan terjadi akibat perkelahian antargeng. Pembunuhan yang bertubi-tubi itu, menurut Benny, bukan keputusan pemerintah. Memang, katanya, "Ada yang mati ditembak petugas, tapi itu akibat mereka melawan petugas."

Namun, dalam buku biografi Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya, Soeharto justru "mengesahkan" adanya petrus itu. Ia menyatakan, penembakan misterius itu sengaja dilakukan sebagai terapi kejut untuk meredam kejahatan.

"Kejadian itu misterius juga tidak. Masalah yang sebenarnya adalah bahwa kejadian itu didahului ketakutan oleh rakyat," kata Soeharto, yang tertulis pada Bab 69 biografinya. Orang-orang jahat itu, kata dia, sudah bertindak melebihi batas-batas perikemanusiaan. "Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas," tuturnya.

"Tindakan tegas bagaimana? Ya harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor-dor, begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, maka ditembak," demikian penuturan Soeharto melalui biografinya.

Tak ada angka resmi jumlah korban petrus itu. Hingga Juli 1983, menurut Benny Moerdani, tercatat ada 300 korban di seluruh Indonesia. Jumlah sebenarnya bisa dipastikan lebih dari itu karena banyak bandit yang mayatnya tanpa bekas.

Mulyana W. Kusumah, pakar kriminologi yang melakukan riset soal Petrus, menyebutkan bahwa yang menjadi korban mencapai angka 2.000 orang. Menteri Luar Negeri Belanda kala itu, Hans van den Broek, pada 1984 meminta pemerintah Indonesia menghormati hak asasi manusia, bahkan menyebutkan korban Petrus mencapai 3.000 orang.

Bertahun-tahun kemudian, keterlibatan pemerintah dalam pembunuhan misterius itu mulai terkuak. Menurut penelitian Mulyana, Petrus merupakan lanjutan dari Operasi Pemberantasan Kejahatan di beberapa kota besar.

Mula-mula, operasi ini dicanangkan oleh Komandan Garnisun Yogyakarta Letnan Kolonel M. Hasbi pada Maret 1983. Lalu diikuti daerah-daerah lain, termasuk Jakarta. Ribuan gali-ini sebutan bagi preman-ditembak, sebagian di antaranya buru-buru menyerah, kabur ke hutan, atau segera berubah menjadi orang baik-baik.

Bagi pemerintah, keputusan untuk "menyelenggarakan" Petrus dianggap positif. Angka kejahatan disebutkan menurun waktu itu. Di Yogyakarta, jumlah kejahatan dengan kekerasan menurun dari 57 menjadi 20 sejak Januari hingga Juni 1983. Pada periode yang sama, angka kejahatan di Semarang turun dari 78 menjadi 50 kali.

Namun, cara mengatasi kejahatan dengan Petrus tentu saja menuai kecaman. Mulyana pada kesimpulan penelitiannya menyebut aksi penembakan misterius ini "ekstralegal" yang bertentangan dengan prinsip hukum dan keadilan. Lembaga Bantuan Hukum, yang kala itu dipimpin Adnan Buyung Nasution, menganggap aksi Petrus sebagai "pembunuhan terencana".

Subuh Berdarah di Talangsari

GERIMIS merinjis Talangsari, pagi 19 tahun silam itu. Harinya Senin, 7 Februari 1989. Umat Islam baru saja membenahi salat subuh. Tiba-tiba terdengar tembakan, gencar menyiram bangsal pengikut Warsidi di dukuh yang masuk bilangan Way Jepara, Lampung Tengah itu. Pekik tangis pecah ke angkasa, bersama desing peluru.

Empat peleton pasukan Brigade Mobil dari Komando Resor Militer Garuda Hitam, Lampung Tengah, mara bagai dirasuk dendam. Mereka dipimpin Kolonel A.M. Hendropriyono. Sehari-hari, jamaah Warsidi dikenal sebagai kelompok pengajian. Tapi militer menuduh mereka mempersiapkan negara Islam.

Sebelumnya, beberapa kali polisi berselisih dengan anggota kelompok ini. Komandan Rayon Militer (Danramil) Way Jepara, Kapten Soetiman, pernah memanggil Anwar, tokoh kelompok itu. Anwar menolak, malah meminta Soetiman datang ke rumahnya. Camat Way Jepara, Zulkifli, kemudian mengirim surat panggilan. Anwar tetap menolak.

Ditemani sejumlah serdadu, Soetiman dan Zulkifli kemudian meluncur ke rumah Anwar. Menurut versi tentara, rombongan ini dihujani anak panah dan batu katapel. Soetiman tewas. Menyusullah kemudian subuh bersimbah darah itu.

Jumlah korban simpang-siur. Menurut versi tentara, korban tewas 27 orang. Tapi sejumlah lembaga swadaya masyarakat menghitung 246 korban tewas. Pemerintah memburu jaringan kelompok ini ke Jakarta dan Jawa Tengah. Beberapa pengikut tertangkap, dijebloskan ke bui.

Seperti tragedi kemanusiaan lainnya, suara korban Talangsari baru didengar setelah Soeharto jatuh, 21 Mei 1998. Korban dan aktivis kemanusiaan menuntut pemerintah segera mengadili pelaku penembakan.

Pada Juni 2001, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim ad hoc untuk menyelidiki kasus ini. Hasilnya tak jelas. Belakangan, Komnas membentuk tim penyelidikan. Tim ini terjun ke lapangan mewawancarai korban, keluarga korban, dan sejumlah pelaku. Penyelidikan itu selesai pada pertengahan Mei 2006.

Penyelesaian kasus ini berkelok. Hasil kerja tim masih harus memasuki tahap analisis hukum. Pada tahap ini akan ditilik apakah tragedi Talangsari masuk kategori pelanggaran berat atau ringan. Hasil analisis itu pun harus dirapatkan lagi di pleno Komnas HAM.

Jika pleno menilai tidak terdapat pelanggaran berat hak asasi manusia, kasus ini cukup diselesaikan lewat peradilan umum. Tapi, jika terdapat pelanggaran berat hak asasi, penyelesaiannya bisa lewat dua pintu: Undang-Undang No. 26/2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, atau justru cukup lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Jalan berliku itu diprotes sejumlah aktivis hak asasi manusia dan korban Talangsari. Ahmad Fauzi Isnan, yang divonis 20 tahun penjara, berharap Komnas HAM bisa menyelesaikan kasus ini. Tentara yang terlibat, katanya, kini sudah jadi petinggi, malah berambisi menjadi penguasa. "Dengan segala cara, mereka akan berusaha agar tidak disebut penjahat perang," katanya.

Sejumlah korban lain berharap pemerintah segera menuntaskan kasus ini. "Kami mendesak pemerintah segera membawa kasus ini ke pengadilan. Jangan berlama-lama," kata Azwir Kaili, ketua keluarga korban Talangsari.

Hendropriyono sendiri lebih memilih jalur damai. Pada Februari 2000, ketika menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), ia mengundang 80 korban dan keluarga korban ke rumahnya di Jakarta, membahas jalur islah. Jalur damai ini ditentang sejumlah korban. Belakangan, beberapa korban yang ikut islah malah menarik diri. Kini kasus ini masih di tahap analisis hukum di Komnas HAM.

Tragedi Membara di Sindang Raya

Huru-hara ini bermula dari sebuah poster. Berjudul "Agar Wanita Memakai Pakaian Jilbab", poster itu menempel di Musala As-Sa'adah, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah anjuran yang biasa-biasa saja, tapi pada 14 September 1984 poster itu bisa menciptakan malapetaka.

Situasi politik saat itu memang melaju ke titik didih. Pemerintah Soeharto getol berkampanye soal asas tunggal Pancasila, yang ditentang keras sejumlah kalangan muslim.

Syahdan, suatu pagi 7 September 1984, Sersan Satu Hermanu, anggota Babinsa Koja Selatan, Jakarta Utara, meminta warga mencopot poster di musala itu. Warga menolak. Esoknya, Hermanu datang lagi menghapus poster itu dengan koran yang dicelup ke air got.

Lalu, mengalirlah desas-desus Hermanu masuk musala tanpa melepas sepatu. Musala itu pun kotor. Warga yang marah hendak menghajar sang Babinsa. Ia selamat karena dilindungi seorang tokoh masyarakat. Gagal menghajar Hermanu, warga membakar sepeda motornya.

Tentara dari Komando Distrik Militer (Kodim) Tanjung Priok segera menyatroni kawasan itu. Empat pemuda yang diduga membakar sepeda motor diangkut ke Kodim. Warga meminta Amir Biki, seorang tokoh masyarakat Tanjung Priok, membebaskan keempat pemuda. Gagal.

Warga yang protes lalu memenuhi Jalan Sindang Raya, Tanjung Priok. Di situ sejumlah tokoh unjuk bicara, termasuk Amir Biki. Selain mengecam kebijakan asas tunggal, mereka menuntut pembebasan empat pemuda tersebut, paling lambat pukul 11 malam. Jika tidak, aksi massa jalan terus. Kodim menolak.

Massa kemudian bergerak ke kantor Kodim. Di tengah jalan, di depan kantor Polisi Resor Jakarta Utara, massa dihadang polisi. Tembakan meletus. Huru-hara pun meledak dan meluas. Sejumlah toko milik keturunan Tionghoa dijarah.

Versi resmi pemerintah, korban mati cuma 28 orang, tapi keluarga korban menghitung sekitar 700 warga tewas dalam tragedi itu. Amir Biki sendiri tewas diterjang peluru. Sejumlah tokoh, seperti Qodir Djaelani, Tony Ardi, Mawardi Noor, dan Oesmany, ditangkap.

Selama pemerintahan Soeharto, kasus ini tak pernah diproses. Tuntutan penyelidikan terhadap kasus ini baru ramai sesudah Soeharto lengser. Korban dan keluarga korban mendesak pemerintah agar Soeharto dan sejumlah tentara yang terlibat diseret ke pengadilan.

Kasus ini diadili pengadilan ad hoc hak asasi manusia. Belasan pelaku diseret ke muka hukum. Di antaranya Mayor Jenderal Sriyanto Muntasram, yang saat diadili menjabat Komandan Kopassus. Sriyanto, yang saat kejadian menjabat Kepala Seksi Operasi II Kodim 0502, Jakarta Utara, dituduh terlibat peristiwa ini. Agustus 2004, pengadilan ad hoc pertama memutus bebas Sriyanto. Putusan itu diperkuat Mahkamah Agung, September 2005.

Mayor Jenderal (Purn.) Pranowo, yang saat kejadian menjabat Kepala Polisi Militer Kodam Jaya, juga diajukan ke meja hijau. Ia dituduh membiarkan anak buahnya menyiksa peserta unjuk rasa yang ditangkap aparat saat itu. Hakim tidak menemukan keterlibatan Pranowo dalam penyiksaan itu. Ia pun bebas.

Ada yang divonis bersalah di pengadilan pertama, tapi bebas di pengadilan tinggi. Mayor Jenderal (Purn.) Rudolf Adolf Butar-Butar, yang saat kejadian menjabat Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara, divonis sepuluh tahun penjara di tingkat pertama. Juni 2005, Pengadilan Tinggi Daerah Jakarta membebaskan Butar-Butar. Belasan pelaku lapangan divonis bervariasi di pengadilan pertama, dari dua hingga tiga tahun.

Putusan itu dikecam korban dan keluarga korban Tanjung Priok. "Tidak memperhatikan rasa keadilan keluarga korban," kata Benny Biki, adik kandung Amir Biki. Ia menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Keluarga korban mendesak pemerintah juga mengadili petinggi militer saat itu, seperti Jenderal (Purn.) Try Sutrisno, bekas wakil presiden yang saat kejadian menjabat Panglima Kodam Jaya, Benny Moerdani (mantan Panglima ABRI, kini sudah almarhum), dan Soeharto selaku presiden.

Ketika Kejaksaan Agung menghentikan proses hukum atas Soeharto karena alasan sakit, korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok mengajukan protes keras. "Kami sangat terpukul dengan penghentian proses tersebut," kata Ratono, Ketua Ikatan Korban Tanjung Priok. Soeharto, katanya, telah menyebabkan mereka kehilangan keluarga dan harta benda. Harta benda mungkin bisa tergantikan. Kehilangan keluarga?

27 Juli Pada Suatu Pagi

SABTU, 27 Juli 1996, pukul enam pagi. Kantor pusat PDI Jalan Diponegoro. Suasana hening pecah oleh sebuah penggempuran. Kantor itu diserang 200 orang tak dikenal.

"Datanglah orang-orang kekar yang turun dari delapan truk pasir. Mereka biadab sekali. Anak-anak kecil juga perempuan yang berada di trotoar mereka sikat dengan rotan sepanjang 60 sentimeter," kata saksi, Albert Birhan, simpatisan PDI. Dengan brutal, aparat keamanan bercampur dengan preman dan anggota organisasi pemuda pro-rezim Orde Baru memukuli orang-orang yang berada di tempat itu.

Apakah yang sesungguhnya terjadi?

Bukalah halaman sejarah Orde Baru. Kongres PDI di Medan tahun 1993 memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Menurut bekas Wakil Bendahara PDI Soerjadi, Alex Widya Siregar, sejak Musyawarah Nasional 1994 di Jakarta yang memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI, Presiden Soeharto merasa semakin gerah. "Pak Harto tampaknya juga khawatir kalau Mega terus melaju," katanya kepada Tempo tiga tahun setelah peristiwa tersebut.

Pada 2 Juni 1996, Alex Widya Siregar diminta Kepala BIA Syamsir Siregar untuk mempertemukan ABRI dengan tokoh-tokoh PDI. Hasilnya, Kepala Staf Sosial Politik ABRI Syarwan Hamid bertemu Soetardjo Soerjogoeritno dan Panangian Siregar.

Empat hari kemudian, pertemuan itu dilanjutkan di kantor BIA. Saat itu diputuskan, figur yang paling tepat menandingi Megawati adalah Soerjadi. Syarwan Hamid dan Direktur A BIA, Zacky Anwar Makarim, menurut Alex, langsung menghubungi Soerjadi. "Saat itu Soerjadi minta syarat, mau menjadi ketua umum hanya jika diterima oleh Pak Harto," ujar Alex.

Pada 16 Juli tahun yang sama, rapat PDI Soerjadi memutuskan Alex memimpin tim yang bertugas mengambil alih kantor PDI di Jalan Diponegoro. Menurut kesaksian Letnan Jenderal (Purn) Suyono, bekas Kepala Staf Umum ABRI, penyerbuan itu mulai dimatangkan setelah diadakan pertemuan di rumah Presiden Soeharto di Jalan Cendana pada 19 Juli. Saat itu Presiden Soeharto, di hadapan beberapa petinggi militer dan Polri, mengungkapkan keresahannya terhadap Megawati dan pengikut-pengikutnya.

Rencana penyerbuan pada 23 Juli yang dipimpin Alex ternyata gagal, karena preman yang disewa Alex dianggap berkhianat dan membocorkan rencana itu. "Akhirnya saya batalkan," kata Alex. Tiga hari kemudian massa dikumpulkan di lantai 5 Gedung Artha Graha. Alex juga sowan ke Pangdam Sutiyoso, tentang rencana penyerbuan pada 27 Juli 1996. "Sutisoyo berkata, selaku Pangdam, ia wajib berada di lokasi kerusuhan untuk tahu permasalahan," ujar Alex.

Pada Kamis 25 Juli, Presiden Soeharto menerima Ketua Umum DPP PDI Soerjadi dan 10 fungsionaris partai di Bina Graha, Jakarta. Pertemuan inilah yang mengakhiri spekulasi politik seakan DPP PDI Soerjadi belum diakui pemerintah. Dalam pertemuan selama 70 menit itu, lebih lama 40 menit dari yang dijadwalkan, lahirlah istilah baru "setan gundul".

"Beliau (Soeharto-Red) menyebut orang-orang yang menunggangi masalah di PDI sehingga berlarut-larut sebagai setan gundul. Beliau menyebutnya sambil guyon, kami tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh beliau," ujar Soerjadi saat dihubungi Tempo setelah hampir 10 tahun peristiwa itu terjadi.

Pernyataan Presiden Soeharto itulah yang kemudian menjadi alasan pembenaran oleh aparat keamanan untuk menyerbu kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Sabtu pagi, 27 Juli. Menurut Soerjadi, pihaknya tidak diberi tahu akan ada "acara ambil paksa" kantor pusat PDI dari tangan pendukung PDI Megawati Soekarnoputri. "Saya sama sekali tidak tahu, bahkan sampai saat saya ditahan, saya tak tahu kenyataan yang sebenarnya terjadi pada 27 Juli 1996 itu," katanya.

Para pendukung Megawati menduga ada ratusan orang tewas akibat serbuan itu. Ketua PDI Perjuangan Jakarta Selatan Audy Tambunan menyebutkan, korban dimakamkan secara massal di pekuburan Pondok Rangon, Jakarta Timur. Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dari peristiwa itu cuma lima orang yang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang. Laporan lembaga yang dipimpin oleh bekas Menteri Agama Munawir Sjadzali itu mencurigai "keterlibatan langsung pemerintah". Jika didengar dari para saksi, diduga lebih dari 30 orang tewas.

Pemerintah menahan 124 orang pengikut Megawati yang berada di tempat saat penyerangan. Sedangkan "setan gundul" yang dimaksudkan Presiden Soeharto dicokok dan ditahan. Budiman Sudjatmiko dan anggota Partai Rakyat Demokratik, yang dideklarasikan empat hari menjelang kerusuhan 27 Juli, menjadi "kambing hitam" serta "setan gundul" yang hendak "dibersihkan" Soeharto. Budiman dan kawan-kawan diberi ampunan Presiden B.J. Habibie setelah Soeharto tak lagi berkuasa dua tahun setelah peristiwa 27 Juli 1996.

Jejak Sepatu Lars Sang Jenderal

Lelaki itu selalu melontarkan tanya yang sama. Ke mana perginya lelaki yang ia cintai. Ke mana perginya dua tangan lembut itu? Beribu-ribu pertanyaan menerjang benak Zarkani (nama disamarkan). "Sudah matikah ayahku? Bila sudah, di mana kuburnya?" Zarkani terus bertanya kepada siapa saja yang ia temui. Hingga sebelum dua tahun lalu, tanya itu masih nyaring terdengar. Kini, Zarkani entah ke mana.

Kewarasan lelaki tinggi kelahiran 1969 ini melayang sejak ia berusia 20 tahun. Kisah pilu Zarkani bermula saat ayahnya dipanggil ke markas TNI (ketika itu masih ABRI) di Krueng Pase, Aceh Utara. Pemerintah rezim Soeharto saat itu sudah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM). Sejak itulah ayah Zarkani tak pernah kembali. Dan lelaki itu terus menanti serta bertanya.

Suatu kali Zarkani menggelepar di kubangan darah hewan kurban yang disembelih di halaman masjid sambil berteriak, "Ini darah ayahku." Di lain waktu, dia membuat gundukan di halaman rumah dan berkata, "Ini makam ayahku."

Di bumi Seulawah ribuan anak terhimpit kesedihan seperti Zarkani. Mereka menanti ayah pulang. Hari, minggu, bulan, musim, tahun berlalu, sang ayah tetap saja tak ada kabar.

Operasi militer yang berlangsung pada 1989?1998. Pada masa itu sekitar 300 personel Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilatih di Libya kembali ke Aceh. Berbekal keyakinan dan senapan seadanya, tentara GAM menyerang pos-pos TNI dan Polri. Perang gerilya tak terbendung.

Itulah yang terjadi di Syantalura. Saat itu kawasan kilang minyak dan gas Arung, Aceh Utara itu masih menikmati pagi. Polisi-polisi penjaga sedang mengecap udara segar. Tiba-tiba, segerombolan orang menggeruduk dan melepaskan rentetan tembakan ke pos polisi. "Sebuah peluru menyambar seorang polisi berpangkat kopral satu," kata Ramli Ridwan, mantan Bupati Aceh Utara.

Ramli menuturkan, aksi saling bunuh antara TNI dan GAM meletus sejak Teungku Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976. ABRI menggempur mereka. Namun, Tiro dan pemimpin GAM lainnya kabur ke Swedia setelah tujuh tahun buron di Tanah Rencong. Gerakan ini kemudian diteruskan oleh tentara-tentara muda didikan Libya.

Kondisi gawat itu membuat Gubernur Aceh Ibrahim Hasan mengumpulkan bupati, tokoh masyarakat juga komandan tentara di Komando Resor Militer (Korem) 011/Lilawangsa di Lhokseumawe. Mereka lalu sepakat membawa masalah ini ke Jakarta.

Di Jakarta, Presiden Soeharto dengan cekatan segera memerintahkan 6.000 Kopassus ditambah di Aceh. Sampai Mei 1990, jumlah pasukan di sana menjadi 12 ribu orang. Operasi ini dikenal sebagai Operasi Jaring Merah. Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto, dan Syarwan Hamid pernah memimpin operasi itu.

Operasi militer adalah cara khas Soeharto dalam menyelesaikan konflik daerah. Cara itu pula yang digunakan meredam gejolak di Papua. Saat itu, sebagian warga di sana kecewa atas hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1 Desember 1969 yang berisi keputusan menyerahkan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Padahal, menurut versi mereka, pemerintah Hindia Belanda telah berjanji bakal memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua Barat, 1 Desember 1971.

Jauh sebelum Pepera, beberapa tokoh politik di sana seperti Ferry Awom memproklamasikan Papua merdeka di Manokwari, 28 Juli 1965. Mereka juga merekrut pemuda-pemuda Biak untuk perang gerilya. Salah satu kelompok gerilya Operasi Papua Merdeka (OPM) yang punya gigi adalah kelompok Mandacan.

"Bisul" di Indonesia bagian timur itu "diobati" Soeharto dengan terus menambah pasukan. Mantan Kepala Staf Komando Daerah Militer Cenderawasih Mayjen (Purn.) Samsuddin mengisahkan, "Menjelang Pemilu 1977 Papua mencekam. Pasukan mengamankan keadaan selama pemilu," kata lelaki yang bertugas di sana sejak 1975 itu.

Sejarah kemudian mencatat, senapan, meriam, dan darah ternyata tidak sepenuhnya memulihkan Papua dan juga Aceh. Di Aceh, ribuan anak dan wanita terhimpit kepedihan perang. Tim Pencari Fakta Komisi Nasional HAM melaporkan, selama DOM sekitar 3.000 wanita jadi janda dan 20 ribu anak menjadi yatim. Sebagian dari jumlah itu akhirnya kehilangan kewarasan seperti Zarkani, sebagian lagi malah diperkosa.

Di Papua sama saja. Aktivis penolak Pepera, Arnold Clemens A.P., ditembak mati. Sebanyak 10 ribu warga Papua sampai mengungsi ke Papua Nugini. Dalam diam, Papua terus bergejolak.

Sejarah telah mencatat jejak kelam sepatu lars di dua daerah tersebut.

Orang Hilang Dibawa Sampai Mati

Adili Soeharto..., gantung Soeharto.... Adili." Yel-yel seperti itu diteriakkan ibu-ibu dan puluhan aktivis dari Ikatan Orang Hilang Indonesia (Ikohi), sambil menyeret patung mantan presiden Soeharto dalam kerangkeng besi. Mereka berjalan dua kilometer dari Tugu Proklamasi sampai kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Prosesi serupa kerap dilakukan para aktivis hingga kini.

Walaupun sudah sepuluh tahun Soeharto tak berkuasa, para keluarga korban penculikan masih menuntut pengadilan terhadap penguasa Orde Baru itu. Mereka adalah orang tua dan keluarga korban penculikan yang tak pernah kembali dan tak ketahuan di mana kuburnya. Menurut Ketua Ikohi, Mugiyanto, mereka yakin Soeharto terlibat dalam kasus penghilangan paksa para aktivis itu.

"Dalam sebuah wawancara di majalah Panjimas, bekas Pangkostrad Prabowo Subianto mengaku diberi 28 nama aktivis yang harus diawasi. Daftar nama itu juga diberikan Soeharto kepada perwira militer lainnya, dan mereka itu yang termasuk hilang sampai kini," ujar Mugiyanto.

Menurut Mugi, ada tiga periode penting penghilangan paksa menjelang masa akhir Soeharto berkuasa. Periode pertama adalah "periode pengamanan" Pemilihan Umum 1997. Saat itu, koalisi PDI dan PPP, yang menyebut dirinya "Mega Bintang", tengah menguat. Pada periode ini aktivis yang hilang adalah mereka yang dikenal dekat dengan kedua partai musuh Golkar, kendaraan politik Soeharto waktu itu. Para korban adalah Yani Afri dan Soni, aktivis dari PDI, dari PPP, Dedi Hamdun dan Noval Al-Katiri.

Periode kedua, menjelang Sidang Umum MPR. Pius Lustrilanang, Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, dan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) seperti Nezar Patria, Rahardjo Waluyo Jati, Andi Arif, Feisol Reza, Wiji Tukul, termasuk Mugiyanto, merasakan penghilangan "paksa" itu (baca Kuil Penyiksaan Orde Baru).

Tak lama kemudian sembilan orang dikembalikan, setelah diteror dan disiksa. "Saya disekap tiga hari, disetrum, disiksa, lalu diantar ke Polda dan ditahan selama tiga bulan," ujar Mugiyanto, 35 tahun. Saat itu Mugi adalah mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rahardjo Waluyo Jati merasakan hal yang sama. "Selama tiga hari pertama sejak diculik, tangan saya diborgol, kaki diikat, disetrum, dipukuli. Bahkan saya ditelanjangi dan ditidurkan di atas balok es," ujarnya saat memberikan kesaksianya di Komnas HAM. Jati disekap mulai 12 Maret sampai 28 April 1998.

Setelah tiga hari, Jati dipindahkan ke ruang bawah tanah. Di tempat itu ia bertemu aktivis asal Bandung, Pius Lustrilanang. Menurut Pius, kamar nomor lima pernah dihuni Soni

dan Yani Afri, pendukung PDI pro-Megawati, Dedi Hamdun dan Lukas, dosen asal Timor Timur. Selama dalam penjara bawah tanah, Jati pernah dikunjungi dua orang. "Mungkin atasan penculik, dari baunya ia memakai parfum mahal. Dua orang itu diantar lima orang lainnya. Semua orang itu memakai topeng," katanya.

Periode ketiga, mereka yang hilang pada saat kerusuhan Mei 1998. "Yang hilang adalah para saksi yang melihat langsung sekelompok orang terkoordinasi membakar pasar atau mal saat penjarah masih banyak di dalamnya," ujar Mugi. Para korban yang hilang itu tak semuanya terdiri dari aktivis. Ada korban yang bekerja sebagai pengamen atau karyawan, di antaranya bernama Ucok Munandar, Yadi, Abdul Nasser. "Sampai kini mereka tak ketahuan kabarnya, tapi ada yang melihat mereka diambil paksa," katanya.

Menurut Mugi, lembaga Ikohi sudah mengajukan permintaan agar tim ad hoc Komnas HAM menyelidiki peran bekas presiden Soeharto untuk mengungkap kasus penghilangan paksa 1997-1998. Tim ini bisa bergerak dengan memanggil paksa pihak TNI dan Polri yang diduga terlibat. "Dulu janji Komnas HAM begitu. Kami juga menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia yang mencintai keadilan agar bersama-sama menolak memaafkan Soeharto sebelum ada pengadilan yang jujur dan adil," ujar Mugi.

Di Kuil Penyiksaan Orde Baru

PERISTIWA itu terjadi sepuluh tahun lalu, tapi semuanya masih tetap basah dalam ingatan. Kami berempat: Aan Rusdianto, Mugiyanto, Petrus Bima Anugerah, dan saya adalah anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Baru sepuluh hari kami bertempat tinggal di rumah susun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur itu. Tak seorang tetangga pun tahu bahwa kami anggota gerakan antikediktatoran.

Saat itu, Maret 1998, politik Indonesia sedang panas. Di tengah aksi protes mahasiswa, Sidang Umum MPR kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Di kampus, gerakan menentang rezim Orde Baru kian marak. Setiap hari, kemarahan membara di sekujur negeri. Kota-kota dibungkus selebaran, spanduk, dan poster. Indonesia pun terbelah: pro atau anti-Soeharto.

Sejak dituding sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996 (tapi tak pernah terbukti di pengadilan), SMID dan semua organisasi yang berafiliasi ke Partai Rakyat Demokratik (PRD) dinyatakan oleh pemerinah sebagai organisasi terlarang. Sejak itu, hidup kami terpaksa berubah. Kami diburu aparat keamanan Orde Baru. Maka, tak ada jalan lain kecuali bergerak gaya bawah tanah. Nama asli berganti alias. Setiap kali berpindah rumah, harus menyaru sebagai pedagang buku atau lainnya.

Tapi petualangan bawah tanah itu berhenti pada 13 Maret 1998. Malam itu, sekitar pukul tujuh, saya baru saja pulang dari Universitas Indonesia, Depok. Ada rapat mahasiswa sore itu di sana. Aan, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang sudah berada di rumah. Setelah mandi, saya menjerang air. Mugiyanto berjanji pulang satu jam lagi, dan dia akan membeli makan malam. Sementara, Bima Petrus berpesan pulang agak larut.

Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Begitu Aan membuka pintu, empat lelaki kekar merangsek masuk. Mereka menyergap dan memiting tangan Aan. Saya kaget. Sekelebat saya melongok ke arah jendela. Kami berada di lantai dua, dan di bawah sana sejumlah "tamu tak diundang" sudah menunggu. Mereka memakai seibo (penutup wajah dari wol), tapi digulung sebatas tempurung kepala. Wajah mereka masih terlihat jelas. "Mau mencari siapa?" tanya saya. "Tak usah tanya, ikut saja," bentak seorang lelaki. Setelah mencengkeram Aan, dua lainnya mengapit saya. Kami digiring menuruni tangga. Saya agak meronta, tapi dengan cepat seseorang mencabut pistol. Sekejap, kesadaran saya bicara: saya diculik! Dan dua mobil Kijang sudah menunggu di bawah.

Di dalam mobil, mata saya ditutup kain hitam. Lalu mereka menyelubungi kepala saya dengan seibo itu. Saya juga merasa mereka melakukan hal yang sama pada Aan. Dompet saya diperiksa. Sial, mereka mendapat KTP saya dengan nama asli. "Wah, benar, dia Nezar, Sekjen SMID!" teriak salah satu dari mereka.

Di mobil, mereka semua bungkam. Kaca tertutup rapat. Lagu house music diputar berdebam-debam. Lalu kendaraan itu melesat kencang, dan berhenti sejam kemudian. Tak jelas di daerah mana. Terdengar suara handy talkie mencicit, "Merpati, merpati." Agaknya itu semacam kode mereka. Rupanya, mereka meminta pintu pagar dibuka.

Mata kami masih tertutup rapat saat digiring masuk ke ruangan itu. Pendingin udara terasa menusuk tulang. Terdengar suara-suara orang, mungkin lebih dari 10 orang. Saya didudukkan di kursi. Lalu, mendadak satu pukulan melesak di perut. Setelah itu, menyusul bertubi-tubi tendangan. Satu terjangan keras mendarat di badan, sampai kursi lipat itu patah. Bibir terasa hangat dan asin. Darah mengucur.

Setelah itu, saya dibaringkan ke velbed. Tangan kiri diborgol dan kaki diikat kabel. Mereka bertanya di mana Andi Arief, Ketua Umum SMID. Karena tak puas dengan jawaban, alat setrum mulai beraksi. Dengan garang, listrik pun merontokkan tulang dan sendi. "Kalian bikin rapat dengan Megawati dan Amien Rais, kan? Mau menggulingkan Soeharto kan?" tanya suara itu dengan garang.

Absurd. Saat itu, kami mendukung Mega-Amien melawan kediktatoran. Tapi belum pernah ada rapat bersama dua tokoh itu. Saya tak banyak menjawab. Mereka mengamuk. Satu mesin setrum diseret mendekati saya. Lalu, kepala saya dijungkirkan. Listrik pun menyengat dari paha sampai dada.

"Allahu akbar!" saya berteriak. Tapi mulut saya diinjak. Darah mengucur lagi. Satu setruman di dada membuat napas saya putus. Tersengal-sengal. Saya sudah setengah tak sadar, tapi masih bisa mendengar suara teguran dari seorang kepada para penyiksa itu, agar jangan menyetrum wilayah dada. Saya merasa sangat lelah. Lalu terlelap.

III

ENTAH pukul berapa, tiba-tiba saya mendengar suara alarm memekakkan telinga. Saya tersentak. Terdengar suara Aan meraung-raung. Ini mungkin kuil penyiksaan sejati, tempat ritus kekerasan berlaku tiap menit. Alarm dibunyikan tiap kali, bersama tongkat listrik yang suara setrumannya seperti lecutan cambuk. Saya juga mendengar jeritan Mugiyanto. Rupanya, dia "dijemput" sejam setelah kami ditangkap. Hati saya berdebar mendengar dia dihajar bertubi-tubi. Sekali lagi, mereka ingin tahu apa betul kami terlibat konspirasi rencana penggulingan Soeharto.

Selama dua hari tiga malam, kami disekap di tempat itu. Penyiksaan berlangsung dengan sangat metodis. Dari suara alarm yang mengganggu, pukulan, dan teror mental. Pernah, setelah beberapa jam tenang, mendadak kami dikejutkan tongkat listrik. Mungkin itu tengah malam atau pagi hari. Tak jelas, karena mata tertutup, dan orientasi waktu hilang. Selintas saya berpikir bahwa penculik ini dari satuan profesional. Mereka bilang, pernah bertugas di Aceh dan Papua segala.

III

Klik. Suara pistol yang dikokang yang ditempekan ke pelipis saya.

"Sudah siap mati?" bisik si penculik. Saat itu mungkin matahari sudah terbenam. Saya diam.

"Sana, berdoa!"

Kerongkongan saya tercekat. Ajal terasa begitu dekat. Tak seorang keluarga pun tahu bahwa hidup saya berakhir di sini. Saya pasrah. Saya berdoa agar jalan kematian ini tak begitu menyakitkan. Tapi "eksekusi" itu batal. Hanya ada ancaman bahwa mereka akan memantau kami di mana saja.

Akhirnya kami dibawa ke suatu tempat. Terjadi serah-terima antara si penculik dan lembaga lain. Belakangan, diketahui lembaga itu Polda Metro Jaya. Di sana kami bertiga dimasukkan ke sel isolasi. Satu sel untuk tiap orang dengan lampu lima belas watt, tanpa matahari dan senam pagi.

Hari pertama di sel, trauma itu begitu membekas. Saya takut melihat pintu angin di sel itu. Saya cemas, kalau si penculik masih berada di luar, dan bisa menembak dari lubang angin itu. Ternyata semua kawan merasakan hal sama. Sepekan kemudian, Andi Arief (kini Komisaris PT Pos Indonesia) diculik di Lampung. Setelah disekap di tempat "X", dia terdampar juga di Polda Metro Jaya.

Sampai hari ini, peritiwa itu menjadi mimpi buruk bagi kami, terutama mengenang sejumlah kawan yang hilang dan tak pernah pulang. Mereka adalah Herman Hendrawan, Bima Petrus, Suyat, dan Wiji Thukul.

Setelah reformasi pada 1998, satu regu Kopassus yang disebut Tim Mawar sudah dihukum untuk kejahatan penculikan ini. Adapun Dewan Kehormatan Perwira memberhentikan bekas Danjen Kopassus Letnan Jenderal Prabowo sebagai perwira tinggi TNI. Prabowo mengaku hanya mengambil sembilan orang. Semuanya hidup, dan sudah dibebaskan.

Pada 1999, majalah ini mewawancarai Sumitro Djojohadikusumo, ekonom dan ayah kandung Prabowo. Dia mengatakan penculikan dilakukan Prabowo atas perintah para atasannya. Siapa? "Ada tiga: Hartono, Feisal Tanjung, dan Pak Harto," ujar Sumitro. Lalu kini apakah kami, rakyat Indonesia, harus memaafkan Soeharto?

Doa saya untuk kawan-kawan yang belum (atau tidak) kembali.

Catatan Hitam Kedungombo

KEDUNGOMBO, 19 tahun silam. Usai meresmikan penggunaan waduk di Jawa Tengah itu, seperti biasanya, Presiden Soeharto menggelar temu wicara. Puluhan warga desa duduk ketakzim-takziman, mendengarkan petuah Soeharto. Setelah menjelaskan panjang-lebar ihwal pentingnya waduk itu, Soeharto melemparkan kecamannya kepada penduduk yang tak mau pindah dari lokasi waduk. Ia menyebut mereka mbeguguk ngutho waton (berkepala batu), seraya mengimbau jangan sampai menjadi kelompok mbalelo.

Waduk Kedungombo menyimpan cerita duka bagi ribuan penduduk yang sebelumnya berdiam di sana. Ketika waduk yang mampu menampung 723 juta meter kubik air itu diresmikan, masih ada 600 kepala keluarga yang bertahan di daerah genangan. Mereka tak mau pindah karena ganti rugi yang diberikan pemerintah terlalu kecil dan diputuskan tanpa musyawarah.

Pembangunan Kedungombo dimulai pada 1985. Ketika itu, selain untuk menciptakan pembangkit listrik berkekuatan 22,5 megawatt, air waduk ini juga diniatkan memenuhi kebutuhan sekitar 70 hektare lahan pertanian. Untuk membangun bendungan ini pemerintah mendapat kucuran dana US$ 156 juta dari Bank Dunia, dan US$ 25,2 juta dari Bank Exim Jepang-antara lain.

Untuk mewujudkan waduk seluas 6.000 hektare itu, pemerintah harus memindahkan sekitar 5.000 kepala keluarga yang tersebar di 37 desa di tiga kabupaten-Boyolali, Grobogan, dan Sragen. Selain menelan lahan puluhan desa yang terserak di tiga kecamatan, waduk itu juga "memakan" 304 hektare tanah negara dan 1.500 hektare lahan Perhutani.

Pada 1983, Gubernur Jawa Tengah, Ismail, mengeluarkan surat keputusan ganti rugi pembangunan Kedungombo. Ganti rugi tanah tertinggi ditetapkan Rp 700 per meter persegi. Ada warga yang menerima, ada yang menampik. Mereka yang menerima ganti rugi diberi pilihan pindah ke tempat yang disediakan pemerintah: Kayen (Purwodadi), Kedungmulyo, Kedungrejo (Boyolali), atau bertransmigrasi ke luar Jawa.

Yang tak menerima memilih bertahan. Pemerintah pun berang. Ketika itulah kekerasan, teror, dan intimidasi dilancarkan. Tak hanya dipaksa memberi cap jempol sebagai tanda setuju ganti rugi, penduduk yang tak mau pindah juga diberi stempel "PKI". Penduduk kemudian mengadukan teror dan intimidasi ini ke DPRD Jawa Tengah, Lembaga Bantuan Hukum, hingga Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam. Teror dan kekerasan memang mereda. Tapi perundingan penggantian lahan tetap buntu.

Pada 14 Januari 1989, kendati masih ada sekitar 1.000 kepala keluarga yang belum pindah, Menteri Pekerjaan Umum Radinal Mochtar meresmikan Waduk Kedungombo. Sejak itu, setiap hari permukaan air naik setinggi 20 hingga 50 sentimeter. Air yang terus meninggi

ini membuat sebagian warga menyerah, pindah dari kampung halaman mereka. Sejumlah warga terus melawan.

Pada 1990, 34 warga yang tak mau beranjak dari lokasi waduk, lewat Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menggugat Gubernur Jawa Tengah. Mereka menilai ganti rugi yang ditetapkan gubernur menyalahi ketentuan. Walau di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kalah, Mahkamah Agung pada 1994 memenangkan gugatan ini. Pemerintah diwajibkan membayar ganti rugi Rp 50 ribu per meter persegi untuk tanah dan bangunan, dan Rp 30 ribu per meter persegi untuk tanaman. Harga ini lebih tinggi dibanding permintaan warga yang Rp 10 ribu per meter persegi.

Gubernur Ismail mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan ini -dan menang. Mahkamah menyatakan gugatan warga tidak dapat diterima, dan majelis hakim kasasi keliru karena membuat putusan melebihi yang dituntut penggugat. Sejak itu, jalur hukum yang ditempuh warga buntet. Menurut Ketua Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Hendardi, pembangunan Waduk Kedungombo memang sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. "Ini merupakan catatan hitam dalam sejarah republik ini," katanya.

Trisakti Jadi Saksi

12 Mei 1998....

Halaman parkir Universitas Trisakti padat oleh khalayak pada pukul 11 pagi. Ada guru besar, dosen, mahasiswa, kar- yawan, alumni. Mereka meriung sembari menantikan orasi mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution.

Beranjak siang, aliran manusia kian deras. Hawa mulai menghangat tatkala 5.000-an mahasiswa bergantian memekikkan yel-yel. "Turunkan harga sembako! Reformasi politik! Mundurlah Soeharto!"

Abdul Haris, jenderal tua itu, batal datang. Tapi anak-anak muda yang menantikannya tidak membatalkan pergelaran akbar mereka: berjalan kaki ke gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat-sepuluh kilometer lebih dari kampus Trisakti di Grogol, Jakarta Barat.

Saat itu tengah hari, sekitar pukul 12.00 WIB. Baru 100-an meter keluar dari kampus, pasukan Pengendali Massa Polres Jakarta Barat, Korps Brimob Polda Metro Jaya, dan Pasukan Anti-Huru-Hara Resimen Induk Kodam Jaya menghadang barisan mahasiswa Trisakti.

Wakil mahasiswa, Dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andojo, dan Komandan Kodim Jakarta Barat, Letkol (Inf.) Amril Amin, berunding. Hasilnya? Aksi damai hanya sampai di depan kantor lama Wali Kota Jakarta Barat. Kurang-lebih 300 meter dari kampus.

Adi menemui mahasiswa seusai berembuk. "Saya minta kalian berjanji tidak ada aksi kekerasan di tempat ini," ujarnya, disambut tepuk tangan mahasiswa. Aksi berjalan tertib. Sesekali mahasiswa bercanda dengan aparat keamanan, membagikan minuman kemasan, permen, dan bunga mawar

Sekitar pukul 16.30 WIB, aparat meminta aksi dibubarkan dan mahasiswa diminta mundur ke kampus. Sempat terjadi ketegangan. Menurut saksi dari mahasiswa, ketika mereka bergerak ke kampus, ada yang melontarkan kata-kata kotor dan makian. "Sepertinya polisi sengaja memancing kemarahan mahasiswa," kata seorang saksi.

Tiba-tiba dentuman senapan mengoyak udara petang hari. Mahasiswa kocar-kacir, apalagi belum semuanya masuk ke kampus. Walau kemudian terbukti kampus bukan lagi "inner sanctum" alias "wilayah suci"-yang bebas dari senjata dan kekerasan.

Berondongan senjata tak berkeputusan ke arah kampus berlangsung hampir tiga jam. Ratusan orang terluka. Empat mahasiswa gugur: Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, Hendriawan Sie.

Oditur militer kemudian mendakwa Komandan Unit II Patroli Motor Gegana Brimob, Iptu Erick Kadir Sully. Dia bersama 10 anggota Brimob ditugasi ke Polres Jakarta Barat pada hari itu. Sekitar pukul 13.30 WIB-seperti yang tercantum dalam dakwaan oditur-datang panggilan dari Wakil Kepala Polres Jakarta Barat, Mayor Herman Hamid, meminta mereka segera ke depan kantor wali kota untuk menghadang mahasiswa yang bergerak ke DPR/MPR.

Saat itulah Erick, lagi-lagi menurut dakwaan oditur, memerintahkan anak buahnya yang bersenjata Styer kaliber 5,56 menembak ke arah massa.

Jenis peluru itulah yang bersarang di tubuh empat mahasiswa yang tewas-setelah diperiksa melalui uji balistik di Montreal, Kanada, dan Belfast, Irlandia Utara.

Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II punya catatan sendiri soal tragedi ini. Menurut Komisi, pasukan gabungan telah menyerang, memukul, menendang, dan menembak dengan peluru serta gas air mata ke para mahasiswa Trisakti yang berlindung di kantor lama Wali Kota Jakarta Barat maupun yang telah kembali ke kampus.

Peristiwa Trisakti kemudian memicu kerusuhan di berbagai tempat di Jakarta. Demo mahasiswa marak di mana-mana, dan berujung pada pendudukan gedung DPR/MPR, Jakarta, oleh mahasiswa selama empat hari sampai Soeharto lengser pada 21 Mei 1998.

Kita tahu, proses hukum kasus ini hanya berhenti pada sejumlah pelaku lapangan. Inilah rinciannya:

12 Mei 1998

Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak.

12 Agustus 1998

Dua anggota Brimob dihukum 34 bulan penjara.

31 Maret 1999

Empat anggota Brimob lainnya diganjar vonis serupa.

Lantas, ke mana jenderal-jenderal yang menjadi atasan para serdadu terpidana itu? Mereka masih bebas merdeka, tak tersentuh sampai kini.

Rencananya, mereka akan diadili di pengadilan hak asasi manusia pada tahap berikutnya.

Faktanya, mereka hanya "dikenang" dalam ritual tahunan 12 Mei, tatkala mahasiswa menagih utang keadilan bagi nyawa empat anak muda yang mati terlalu dini.

Matinya Masyarakat Madani

Arief Budiman
Pengamat politik

Pada 1965, kedatangan Soeharto sebenarnya diharapkan untuk memulihkan demokrasi dan membebaskan masyarakat madani atau civil society dari cengkeraman negara. Pada zaman Soekarno, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Tahun 1959, masyarakat madani praktis dibungkam. Maka, ketika Jenderal Soeharto muncul dan mengambil alih kekuasaan pada 1965, banyak orang berharap masyarakat madani akan kembali hidup.

Memang ada beberapa orang yang menyatakan pada waktu itu, betapa tidak realistis mengharapkan demokrasi bisa pulih di bawah pimpinan seorang anggota militer. Tapi suara ini tenggelam di antara harapan terhadap demokrasi yang semarak.

Setelah mendapatkan Surat Perintah 11 Maret Tahun 1966, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia dan menangkapi lawan politiknya. Oleh banyak orang, tindakan ini tidak dianggap sebagai hal yang tidak demokratis, karena Partai Komunis Indonesia dianggap sebagai partai yang anti-demokrasi. Begitu juga dengan tindakan pemerintah yang menangkap para pemimpin politik.

Para pendukung gerakan demokrasi mulai terkejut ketika pada akhir tahun 1960-an pemerintah menolak permintaan rehabilitasi dua partai yang dulu dilarang, Masyumi dan PSI.

Untunglah, para anggota partai tersebut masih dipersilakan membentuk partai baru. Tapi kemudian pemerintah juga menolak mantan pimpinan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia untuk duduk di partai-partai baru yang didirikan. Muncul pertanyaan, apa makna dari tindakan-tindakan ini.

Soeharto memberikan jawaban dengan memperkenalkan konsep Trilogi Pembangunan. Konsep ini menyatakan ada tiga tugas pemerintah: pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan pendapatan. Soeharto menugaskan militer untuk menciptakan stabilitas politik, tugas melaksanakan pertumbuhan ekonomi diberikan kepada para teknokrat ekonomi. Setelah itu, pemerataan pendapatan dapat diselenggarakan. Biarlah Soeharto memusatkan perhatian kepada tugas-tugas ini dulu, tidak direpotkan oleh konflik-konflik masa lalu, begitu kira-kira yang mau dikatakan. Biarlah Soeharto diberi kesempatan dulu untuk bekerja.

Jawaban ini tampaknya diterima oleh masyarakat waktu itu, termasuk oleh para mahasiswa dan kaum cendekiawan. Yang paling penting pada waktu itu adalah memulihkan kehidupan ekonomi. Bukankah dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, masyarakat madani juga tidak akan bisa berfungsi?

Tapi ada sedikit yang mengganggu. Korupsi mulai muncul, meski saat itu masih kecil-kecilan. Korupsi yang saat itu mulai merebak adalah Pertamina. Sementara itu, para wakil mahasiswa yang menjadi anggota parlemen mulai ikut-ikutan membeli mobil Holden fasilitas pemerintah dengan harga murah. Ini dianggap korupsi karena pada waktu rakyat masih miskin, para tokoh mahasiswa ini sudah mau memasuki hidup yang mewah. Para asisten pribadi Presiden juga mulai terlibat bisnis, dan Ibu Tien Soeharto menggusur tanah rakyat untuk mendirikan Taman Miniatur Indonesia Indah atau TMII.

Kaum cendekiawan dan para mahasiswa, yang merupakan corong bagi masyarakat madani, mulai bereaksi terhadap gejala ini. Protes oleh para cendekiawan dan demonstrasi oleh para mahasiswa mulai bermunculan. Tahun 1970 sampai 1972 merupakan tahun-tahun yang marak dengan protes dan demonstrasi. Tapi protes-protes ini pada umumnya berkisar pada masalah korupsi, bukan masalah demokrasi. Protes dan demonstrasi terhadap larangan dihidupkannya kembali Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, serta larangan para pemimpin kedua partai itu untuk aktif dalam partai-partai yang ada, relatif sangat sedikit. Korupsi tampaknya masih dianggap sebagai masalah yang lebih serius pada waktu itu. Kepercayaan bahwa Soeharto masih punya komitmen terhadap demokrasi masih besar.

Karena itulah, dari empat demonstrasi besar yang terjadi pada waktu itu, tiga mempersoalkan korupsi, dan hanya satu yang mempersoalkan demokrasi.

Demonstrasi Mahasiswa Menggugat (1970), Komite Anti-Korupsi (1970), dan gerakan anti-TMII adalah gerakan anti-korupsi. Hanya demonstrasi Golongan Putih (1971), yang menentang UU Pemilu yang baru, yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.

Pada mulanya Soeharto melayani protes-protes ini dengan baik. Demonstrasi Mahasiswa Menggugat ditanggapi dengan memerintahkan para menteri kabinet untuk menerima para mahasiswa dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya.

Sedangkan demonstrasi Komite Anti-Korupsi dilayani langsung oleh dirinya, dengan menerima sendiri empat wakil mahasiswa untuk berdialog di rumahnya di Jalan Cendana. Memang demonstrasi Golongan Putih dihadapi dengan penangkapan mahasiswa untuk diinterogasi, tapi hanya untuk beberapa jam. Tidak ada penahanan. Ini memperkuat anggapan bahwa Soeharto tidak melihat mereka sebagai lawan politiknya. Saat itu, masyarakat menganggap komitmen Soeharto terhadap demokrasi masih ada.

Kemudian, dalam demonstrasi TMII, Soeharto bertindak lebih keras. Dia memerintahkan penahanan terhadap empat orang pimpinan demonstrasi dan menahannya sampai sekitar satu bulan. Tapi hal ini masih dimaklumi, karena demonstrasi tersebut menyinggung pribadi Ibu Tien, dan ini membuat Soeharto marah. Soeharto memang dikenal sensitif bila keluarganya diusik.

Tapi, memang benar juga, para cendekiawan/mahasiswa mulai merasa bimbang. Kalaupun Soeharto masih memiliki komitmen terhadap demokrasi, dia tampaknya lemah

dalam tindakannya terhadap korupsi. Apalagi kalau korupsi ini menyangkut anggota keluarganya. Masihkah Soeharto perlu didukung?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut segera muncul. Pada saat kerusuhan-yang kemudian dikenal sebagai-Peristiwa Malari (1974), tatkala para mahasiswa memprotes dominasi Jepang atas perekonomian Indonesia, dan menuduh beberapa asisten pribadi Presiden sebagai "antek" para pengusaha Jepang, Soeharto mengambil tindakan tegas dengan menangkapi mahasiswa dan cendekiawan yang dianggap punya kaitan dengan demonstrasi ini. Mereka kemudian dipenjarakan sampai beberapa tahun. Beberapa media besar dicabut izin terbitnya, karena dianggap memanaskan suasana dan mengganggu stabilitas.

Dengan Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari), Soeharto tampaknya mengambil sikap tegas: "Go to hell with civil society." Dia sepertinya mengingatkan para cendekiawan/mahasiswa "who is the boss". Pada titik ini tampaknya "perkawinan" antara Soeharto dan masyarakat madani bubar jalan.

Setelah "perceraian" ini, apa yang terjadi bisa diramalkan. Protes dan demonstrasi, yang tadinya merupakan gerakan koreksi, sekarang menjadi gerakan konfrontasi. Demonstrasi berikutnya, pada 1978, yang dilakukan oleh para mahasiswa ITB di Bandung, tidak lagi menuntut supaya Soeharto mau memberantas korupsi, tapi menuntut Soeharto tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Ini bahasa halus dari teriakan: "Minggir!" Soeharto pun menjawab dengan tegas pula: Kampus ITB diserbu dan diduduki militer, para pimpinan mahasiswanya dijebloskan ke penjara selama beberapa tahun.

Tindakan-tindakan Soeharto selanjutnya setelah tahun 1974 merupakan seruan: "Masyarakat madani minggir, pemerintah mau lewat". Partai-partai disederhanakan menjadi tiga, para pemimpin partai dikenai penelitian khusus (litsus) militer untuk membuktikan kesetiaannya kepada negara. Media massa semakin ketat diawasi.

Sejak saat ini, meskipun masyarakat madani memang tidak mati total, dia hanya hidup di bawah tanah, bergerilya. Kekuatan politiknya praktis nol. Masyarakat madani hidup dalam dunia bisik-bisik dan humor-humor politik yang menyindir pemerintah, dalam diskusi-diskusi terbatas para mahasiswa dan cendekiawan, dalam pembacaan puisi-puisi kritis Rendra, atau dalam drama sindiran yang dipentaskan Teater Koma dan monolog Butet Kertaredjasa. Salah satu humor politik yang menjadi favorit saya adalah yang menyatakan bahwa orang-orang Indonesia pada zaman Soeharto punya tiga sifat dasar: pintar, jujur, dan pro-pemerintah. Tapi tiap orang Indonesia hanya bisa memiliki dua saja. Kalau dia pintar dan pro-pemerintah, dia tidak jujur; kalau dia jujur dan pro-pemerintah, dia tidak pintar; dan kalau dia pintar dan jujur, dia pasti anti-pemerintah.

Memandang ke Barat, Terperosok di Timur

Harold Crouch
Pengamat Politik Indonesia

Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah seorang jenderal yang tidak biasa memberikan perhatian banyak terhadap masalah politik luar negeri. Sebagai presiden, politik luar negerinya tidak dijiwai oleh visi hebat tentang peran Indonesia dalam politik dunia. Dibandingkan dengan Presiden Soekarno yang melaksanakan "politik mercusuar" dan bercita-cita menjadi seorang "Pemimpin Besar" di panggung dunia, pendekatan Soeharto hanya bertujuan memperoleh manfaat konkret bagi negaranya.

Politik luar negeri Indonesia pada zaman Soeharto sangat berkait dengan kepentingan dalam negeri. Pendekatan ini sangat jelas pada awal pemerintahannya. Pada akhir zaman Orde Lama ekonomi Indonesia sudah rusak sama sekali. Presiden Soekarno lebih suka berkonfrontasi dengan negara-negara Barat yang disebut "nekolim", sedangkan masalah ekonomi dalam negeri dibiarkan saja. Sebaliknya Soeharto mendekati negara-negara Barat dan Jepang untuk mencari bantuan ekonomi dan menarik penanam modal asing.

Dengan demikian politik luar negeri memberikan sumbangan yang sangat besar kepada proses pembangunan ekonomi yang membawa manfaat yang mendalam bagi bangsa Indonesia-walaupun bukan semua golongan dalam masyarakat dapat menikmatinya. Pembangunan ekonomi juga menopang stabilitas politik, sehingga Orde Baru dapat bertahan selama 30 tahun lebih. Soeharto, sebagai presiden, juga memanfaatkan pembangunan ekonomi untuk "membeli" dukungan para elite politik. Sudah tentu yang mendapat keuntungan yang paling besar adalah anggota keluarganya, para kroninya dan perwira-perwira militer yang dekat dengannya.

Walaupun Indonesia tetap menjunjung tinggi "politik bebas aktif" yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Hatta pada zaman revolusi, pada prakteknya negara ini tidak lagi berdiri di tengah antara kubu Barat dan kubu Timur, tetapi sangat condong ke arah Barat. Hubungan erat dengan negara kapitalis Barat dan Jepang paling jelas dapat dilihat dalam bidang ekonomi di mana konsorsium negara IGGI menjadi sumber bantuan ekonomi dan perusahaan asing menguasai sektor modern.

Tetapi hubungan erat dengan negara Barat tidak terbatas pada bidang ekonomi saja. Sebagai "sekutu tidak resmi", Indonesia juga mendapat bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara Barat yang lain. Peralatan militer banyak yang berasal dari negara Barat dan para perwira ABRI (nama TNI pada waktu itu) mendapat pendidikan dan latihan di negara-negara tersebut.

Pada awal Orde Baru, musuh bersama negara Barat dan Indonesia adalah negara komunis. Indonesia di bawah Soeharto dianggap sebagai benteng anti-komunisme di Asia Tenggara. Pada waktu itu pemerintah AS dan negara Barat lain kurang memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia, asalkan pelanggaran itu dilakukan oleh pemerintah anti-komunis. Walaupun setengah juta rakyat komunis atau pro-komunis dihabisi pada 1965 dan ratusan ribu lagi ditahan, tidak ada protes apa-apa dari pemerintah negara-negara Barat.

Meskipun demikian, Soeharto tetap menjaga jarak dari AS dan negara-negara Barat. Misalnya Indonesia tidak ikut negara Asia lain yang mengirim pasukan untuk membantu AS di Vietnam pada tahun 1970-an. Sesuai dengan konsep bebas-aktif, Presiden Soeharto tidak mau bergabung dalam persekutuan pertahanan dengan negara lain. Sebaliknya Indonesia lebih suka meningkatkan kerja sama non-militer dalam ASEAN, yang dibentuk pada 1967. Pengaruh Soeharto dalam ASEAN menjadi semakin besar karena pemimpin negara-negara lain (kecuali Singapura) sering diganti tetapi beliau tetap berkuasa hingga 1998. Sulit sekali bagi ASEAN untuk mengambil tindakan yang tidak dibenarkan oleh Indonesia.

Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Gerakan Non-Blok, yang terdiri dari negara-negara yang tidak mau bersekutu dengan AS ataupun blok komunis. Semula, anggota gerakan itu menganggap Indonesia terlalu dekat dengan negara Barat, tetapi akhirnya Presiden Soeharto terpilih sebagai ketua gerakan itu di Konferensi Non-Blok yang digelar di Jakarta pada 1992. Ironisnya, Soeharto baru terpilih sebagai pemimpin gerakan itu justru pada waktu Perang Dingin sudah berhenti dan gerakan itu tidak banyak diperhatikan lagi.

Sebagai adikuasa regional, Indonesia sering mengambil prakarsa untuk menyelesaikan konflik di wilayah Asia Tenggara. Misalnya Indonesia berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan perang saudara di Kamboja; Indonesia menyediakan bantuannya kepada Filipina dalam usahanya untuk menyelesaikan pemberontakan bangsa Moro; dan Indonesia menyediakan fasilitas untuk mengadakan serangkaian diskusi di antara negara yang mempunyai klaim-klaim yang bertumpang tindih di Laut Cina Selatan.

Usaha Indonesia untuk mendukung perdamaian tidak terbatas pada wilayah Asia Tenggara saja. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering bersedia menyumbang pasukan kepada misi-misi pemelihara perdamaian PBB. Tentara Indonesia mendapat nama baik dari kegiatan ini.

Walaupun Soeharto tetap menentang komunisme, beliau juga bersikap pragmatis dalam melangsungkan hubungan dengan negara-negara komunis. Hubungan diplomatis tidak pernah diputuskan dengan Uni Soviet dan Vietnam, sedangkan pada 1967, atas nasihat Menteri Luar Negeri Adam Malik, hubungan diplomatik dengan RRC tidak "diputuskan" tetapi hanya "dibekukan". Ini memudahkan pembukaan kembali hubungan diplomatik dengan RRC pada tahun 1980-an sesuai dengan kepentingan Indonesia pada waktu itu. Soeharto selalu mementingkan perhitungan pragmatis di atas ideologi.

Dapat dikatakan prestasi politik luar negeri Indonesia di bawah pimpinan Soeharto cukup baik tetapi sayangnya tidak begitu dihargai oleh dunia internasional. Mengapa tidak? Ganjalannya adalah Timor Timur.

Pada 1975, ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik sedang berusaha meyakinkan pemimpin Timor Timur bahwa Indonesia tidak bermaksud merebut daerah itu, ada jenderal-jenderal yang mempersiapkan intervensi militer. Konon, Soeharto sendiri belum yakin bahwa invasi merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan proses dekolonisasi tetapi akhirnya jalan itu diambil. Soeharto barangkali berharap bahwa masalah itu akan cepat selesai-seperti invasi India terhadap koloni Portugis di Goa pada 1962.

Selama hampir seperempat abad tentara Indonesia menghadapi perlawanan yang terus-menerus. Indonesia memang membangun banyak sekolah, rumah sakit, dan jalan raya di Timor Timur, namun banyak sekali rakyat yang menjadi korban dan pelanggaran hak asasi menjadi perkara biasa. Bagi rakyat Timor Timur, seribu sekolah atau rumah sakit atau jalan raya tidak dapat mengganti seorang ayah atau kakak atau anak yang dibunuh oleh tentara Indonesia. Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyebut kasus Timor Timur sebagai "kerikil tajam", tetapi kerikil itu ternyata berbisa dan menyebabkan luka yang tidak dapat disembuhkan selagi Soeharto menjadi presiden.

Salah satu tujuan politik luar negeri adalah untuk mempertahankan negara itu dari ancaman luar dengan menggunakan cara-cara non-militer. Dalam hal itu, pada umumnya politik luar negeri Presiden Soeharto cukup berhasil. Tetapi akhirnya politik luar negeri ternyata tidak mampu menangkis sebuah ancaman yang tidak dijangka dan berwujud dalam bentuk baru. Pada Juli 1997 keguncangan dalam nilai baht di Thailand menjadi sumber keguncangan yang melanda bukan saja Indonesia tetapi hampir semua negara Asia. Di antara korban krisis moneter itu adalah negara Indonesia dan Presiden Soeharto sendiri.

Pada zaman globalisasi ini, ancaman luar tidak lagi terbatas pada ancaman militer atau politik dari negara-negara tertentu. Pengalaman Presiden Soeharto menunjukkan bahwa proses globalisasi mempunyai dinamika sendiri yang kadang-kadang membawa manfaat yang sangat penting tetapi juga dapat merupakan ancaman yang paling dahsyat. Agaknya, Presiden Soeharto tidak mengerti bagaimana ancaman itu dapat dihadapi.

Kadang-kadang ekspresi ini muncul lagi dalam bentuk protes dan demonstrasi, seperti ketika demonstrasi untuk membela para petani Kedung Ombo yang digusur (1988). Demonstrasi ini diprakrasai oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, para mahasiswa, dan Romo Mangun. Tapi gerakan ini segera ditumpas secara militer.

Semua "perlawanan" ini terus bermunculan sampai jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Setelah militer dan partainya sendiri, Golkar, menarik dukungannya, Soeharto, dengan hati pahit tapi dengan wajah tenang, membacakan surat pengunduran dirinya sebagai Presiden RI, setelah lebih dari 30 tahun berkuasa.

Masyarakat madani pun tiba-tiba muncul dan bangkit kembali. Tapi yang kita dapatkan adalah masyarakat madani yang sakit, yang tidak tahu batas-batas kebebasannya, yang menggunakan kebebasannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Ibarat orang sakit yang tadinya dilarang makan, maka ketika "sembuh" dia segera melahap apa saja yang ada di sekitarnya, sambil menyikut teman-temannya yang ada di kiri dan kanannya. Korupsi pun tiba-tiba muncul kembali, bahkan mungkin lebih dahsyat dari keadaan sebelumnya.

Memang, masyarakat madani sudah bisa hidup kembali. Tapi kita masih belum menyadari bahwa masyarakat madani ini masih perlu belajar berjalan lagi, karena setelah lebih dari 30 tahun dipasung, kesanggupan dasar ini sudah lama terlupakan.

Soedjono dan 'Orde Dhawuh'

Pohon beringin, pohon pamrih, pohon sambi. Dinaungi tiga pohon itu, sendang di pebukitan kapur itu tampak teduh. Air sendang sangat jernih hingga endapan lumpur di dasar terlihat dengan jelas.

Kalangan kebatinan Jawa mengenal mata air dalam cekungan batu kapur itu dulu adalah tempat almarhum Rama Martapangarsa, seorang spiritualis Yogyakarta, menempa diri. Syahdan, pada 1940-an, Martapangarsa mendapat wisik agar menyusuri Gunung Sempu. Dia menemukan sebuah mata air yang dirasanya cocok untuk tempat berendam, mengasah kepekaan. Ia menamakannya Sendang Titis, artinya kolam untuk berlatih menajamkan hati. Dibangunnya sebuah padepokan alit, lalu ia tinggal di situ, meninggalkan rumahnya di bilangan Nataprajan, Yogya.

Untuk menuju sendang yang terletak di Dusun Semanggi, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, itu kini tidak terlalu sulit. Ada jalan aspal, meski agak sempit, yang membelah pebukitan kapur tersebut. Sampai di sana, di pendapa bercat kuning yang lusuh, kita masih dapat melihat lukisan wajah almarhum Martapangarsa tergantung di dinding balai. Lukisan itu diapit potret dua almarhum guru lain: Rama Dijat dan Rama Budi Utomo.

Kalangan kebatinan Jawa tahu, sendang itu pernah melintas dalam kehidupan kebatinan Soeharto. Di situlah, pada 1957, lama sebelum Soeharto menjadi presiden, ia oleh Rama Marta dibaptis menjalani "ikatan persaudaraan mistikal" dengan Soedjono Hoemardhani. Dr Budyapradipta, pakar sastra Jawa Universitas Indonesia yang menjadi sekretaris pribadi Soedjono Hoemardani pada 1983?1986, pernah mendengar kisah ini langsung dari Soedjono.

"Pak Djono bercerita di Sendang Titis itulah Rama Marta membaptis Pak Harto menjadi Rama, Pak Djono menjadi Lesmana, Bu Tien menjadi Sinta, Bu Jono menjadi Kunti."

Yang datang pertama kali ke sendang, menurut cerita Soedjono itu, adalah Soedjono dan istrinya. Rama Marta telah menunggu. Baru kemudian datang Soeharto dan Tien. Begitu Soeharto datang, Rama Marta seperti seolah membaca tanda-tanda, kemudian berkata: "Lha iki jago wirig kuningku (lha ini jago aduanku datang)." Wirig kuning dalam budaya Jawa adalah ayam jago yang kaki dan paruhnya berwarna kuning dan dikenal tangguh dalam bertarung.

Pertemuan pertama Soeharto dengan Soedjono terjadi pada Juni 1956 saat bertugas di Semarang. Letnan kolonel Soeharto menjadi kepala staf dan kemudian Panglima Divisi Diponegoro. Pada waktu itu Soedjono adalah kapten. Soedjono dikenal menyukai dunia kebatinan Jawa. Keduanya menemukan kecocokan.

Akhir 1957, Soedjono memainkan peran penting membentuk beberapa perusahaan swasta atas nama Divisi Diponegoro. Saat menjadi presiden, "utang budi" Soeharto kepada Soedjono terus meningkat. Soedjono pada awal Orde Baru ditunjuk Soeharto menjadi staf pribadi (spri) dan kemudian asisten pribadi di bidang ekonomi pada 1966?1974. Setelah kerusuhan anti-Jepang (Malari), Soeharto membubarkan posisi aspri.

Soedjono tidak memiliki jabatan penting. Tapi banyak yang menyebut justru pada saat itulah Soedjono aktif mendukung Soeharto secara spiritual. Soedjono melakukan ritual-ritual. Saat itu kesibukan Soeharto meningkat sehingga tak sempat melakukannya. Soedjono juga memantau terus perkembangan sosial-politik secara gaib. Menurut Budyapradipta, itu dilakukan melalui bantuan guru-guru laku Jawa yang dikenalnya selama bergaul dengan Soeharto.

Setelah kembali ke Jakarta, sejak menjadi Panglima Diponegoro, Soeharto, misalnya, sering berdiskusi dengan Mesran Hadi Prayitno, seorang perwira menengah Angkatan Darat yang sama-sama menyukai spiritualitas Jawa. Kepada Soeharto, Mesran menyarankan, jika benar-benar ingin memperdalam spiritualitas Jawa, Soeharto harus bertemu dengan seorang guru bernama Raden Panji Soedijat Prawirokoesoemo atau yang lebih dikenal sebagai Rama Dijat.

Pada 1963, Mesran dan Soeharto bertemu Rama Dijat di rumah orang tua Romo Dijat yang bernama Prawiro Dinomo di Dukuh Gopetan, Desa Gemblegan Kalipotes, Klaten. Soeharto kaget, ternyata Rama Dijat adalah lelaki misterius yang pernah ditemuinya pada 1961 saat ia melakukan ziarah di makam leluhur raja-raja Majapahit di situs Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

Waktu itu Soeharto melihat seorang lelaki yang tengah melakukan meditasi dan berhasil melakukan komunikasi dengan alam gaib. Usai meditasi, lelaki tersebut meninggalkan Trowulan. Soeharto terkesan, kagum dan penasaran terhadap lelaki itu. Ia ingin tahu lebih banyak tentang laki-laki itu, tapi laki-laki itu telah menghilang. Dan kini ternyata sosok penuh teka-teki itu ada di hadapannya.

Pada pertemuan Klaten itu, Soeharto langsung menyatakan diri menjadi murid Rama Dijat. Rama Dijat sendiri saat itu tinggal di Semarang. Soeharto kemudian hampir tidak pernah absen mengikuti sarasehan antara Rama Dijat dan murid-muridnya setiap selapan (35 hari) pada Selasa Pahing malam yang dilakukan di rumah Rama Dijat, Jalan Sriwijaya 70 Semarang. Tak hanya acara selapan, setiap membutuhkan konsultasi, Soeharto datang ke Semarang. Saat menjadi presiden, di luar jadwal kepresidenan, Soeharto masih menyempatkan diri ke Semarang. Tak jarang Rama Dijat via Soedjono diundang ke istana atau diutus mencari sesuatu.

"Pak Djono pernah bercerita bagaimana ia bersama Romo Dijat mencari pohon wijayakusuma di dekat Nusakambangan yang lautnya ganas," tutur Budyapradipta. Bunga

wijayakusuma dalam kisah pewayangan adalah senjata Kresna. Di Jawa, banyak tumbuh bunga wijayakusuma. Bunga ini mengeluarkan bau harum pada waktu dini hari.

Namun, ternyata Rama Dijat bukan hanya mencari bunga ini.

Bunga wijayakusuma yang diinginkan, menurut mereka, hanya tumbuh di sebuah pulau kecil dekat Nusakambangan. Dengan bentuk kecil-kecil, bunga Wijayakusuma dipercaya memberi tanda negara bakal baik. Setelah Soedjono dan Rama Dijat mendapatkannya, pohon ini ditanam di Cendana, Keraton Solo, dan rumah Soedjono.

III

Rama Marta, Rama Budi Utama, Rama Dijat, dan Rama Mesran boleh dianggap sebagai "ring satu" dunia kebatinan Soeharto pada masa lalu. Mereka dianggap memiliki daya linuwih, terutama karena kemampuan berdialog dengan roh leluhur melalui teknik meditasi yang dalam bahasa Jawa disebut njarwa.

Kebudayaan Jawa memiliki cara tua yang telah teruji ratusan tahun untuk mampu berkomunikasi dengan leluhur. Leluhur ini dianggap utusan Tuhan yang pernah terlahirkan sebagai manusia. Leluhur ini akan memberikan pesan-pesan (dhawuh). Ketika masuk dalam diri seorang medium, kata-kata leluhur ini hadir di anak lidah (kerongkongan) medium, hingga leluhur itu bisa diajak berdialog secara sadar.

Hal ini berbeda dengan trance, karena roh yang hadir dalam trance menempel di ujung lidah. Dalam trance medium yang bersangkutan tidak sadar sehingga tidak bisa berdialog. Ucapan yang keluar dari mulutnya hanya disampaikan satu arah. Maka dari itu, seseorang yang dapat melakukan njarwa bukan disebut kesurupan, melainkan kalenggahan (dari kata lenggah, duduk).

Soedjono sangat percaya pada dhawuh-dhawuh yang disampaikan Rama Marta, Rama Budi Utomo, Rama Dijat, dan Rama Mesran. Dhawuh-dhawuh tersebut dianggapnya lebih akurat ketimbang prediksi dan analisis para doktor atau pakar mana pun. "Intelektual nggak patut didengar, tidak ada unsur ketuhanannya," begitu Soedjono suatu kali mengatakan kepada Budyapradipta. Soedjono aktif mengundang para pinisepuh di atas untuk melakukan njarwa demi mengetahui situasi politik mutakhir. Informasi dari "dunia atas" itu secara rutin dilaporkan kepada Soeharto.

Selama menjadi sekretaris, Budyapradipta selalu mendampingi dan mencatat dhawuh-dhawuh yang keluar dari para guru di atas.

Para rama itu, menurut dia, memiliki spesialisasi sendiri-sendiri. Rama Dijat diminta untuk menjarwa soal-soal kenegaraan. Romo Marta untuk soal kemasyarakatan dan kerumahtanggaan. Rama Budi untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Bila roh datang, karakter suara yang muncul antara rama satu dan rama lain berbeda intonasinya. Bila Romo Marta kalenggahan, misalnya, didahului ketawa ngakak.

Tapi menurut Budya, secara umum, ada tanda-tanda yang sama. "Waktu roh datang, para guru itu seperti keselek (tersedak)," katanya. "Lalu ada suara masuk yang lebih berat, meninggi, dan berbahasa ngoko, menandakan posisinya lebih tinggi dari orang yang diajak bicara." Menurut Budya, ciri-ciri kalimat leluhur itu rapi. Sebagai ahli bahasa Jawa kuno sendiri, ia takjub mendengar kosakata yang keluar sangat kaya. Menurut dia, banyak ungkapan-ungkapan metafor yang bahkan tidak ada dalam kamus Jawa susunan Zoetmulder maupun Ki Padmo. "Misalnya ada ungkapan lobok ora coplok, sesak ora nggebok...."

Banyak kebijakan politik Soeharto, sebelum dikeluarkan, dikomunikasikan dulu dengan para leluhur. "Menurut Pak Djono, saat GBHN dibuat dan saat Indonesia mau merebut Timor Timur, Soeharto terus-menerus meminta pertimbangan dhawuh ini." Soeharto merasa kebijakannya akan lebih sah, mantap, bila leluhur mendukungnya.

Ada sebuah kejadian menarik. Pada waktu Soeharto hendak melakukan kunjungan ke Filipina dan Australia, Rama Dijat diundang Soedjono ke rumahnya. Roh yang masuk dalam diri Rama Dijat mengatakan bahwa yang harus diawasi benar adalah perjalanan Soeharto ke Australia. "Pesan" itu disampaikan Soedjono kepada Yoga Soegama sebagai pemimpin Bakin saat itu. Tapi Yoga mengatakan bahwa analisis intelijennya menganggap mereka harus waspada dengan keamanan di Filipina lantaran Marcos baru saja digulingkan.

Kenyataannya, saat Presiden Soeharto ke Filipina, kondisi aman saja. Sementara di Australia, Soeharto disambut demonstran dengan lemparan tomat dan telur busuk yang mengenai dahinya. Ketika pulang ke Jakarta, Yoga Soegama langsung didamprat oleh Soedjono. "Yoga, mangkane ojo nyepeleake intel spiritualku (Yoga, maka dari itu jangan menyepelekan intel spiritualku)."

Saat peristiwa Tanjung Priok, Budya juga ingat, pada pukul 11 malam, Soedjono memanggil Rama Mesran ke rumahnya untuk meminta dhawuh leluhur bagaimana cara memadamkan kerusuhan itu. Esoknya, Soedjono menelepon Benny Moerdani. Menurut Budya, "Saya melihat sendiri Benny datang, lalu Pak Djono memberikan tongkat dari pohon bodhi kepada Benny; tongkat itu telah dijopa-japu." Tongkat itu, menurut Soedjono, akan memberikan rasa wibawa pada diri Benny hingga kerusuhan itu bisa diatasi.

Syahdan, pada 1985, terjadi demonstrasi dari Himpunan Mahasiswa Islam. Peristiwa ini membangkitkan kegusaran Soeharto. Soedjono berinisiatif memanggil Romo Mesran. Roh yang masuk ke dalam diri Romo Mesran menyuruh: golek penthil pelem ijo neng Mojokerto (carilah mangga muda di Mojokerto). Sore itu juga, Soedjono mengutus Budyapradipta ke Mojokerto. "Saya naik pesawat Garuda ke Surabaya, terus naik mobil ke Mojokerto," kata Budya.

Begitu mendapat mangga muda-padahal, kala itu sedang tidak musim mangga-Budya langsung terbang lagi ke Jakarta menuju kediaman Soedjono. Menjelang dini hari, Budya lalu mendampingi Soedjono dan Rama Mesran membawa mangga muda itu menuju istana.

Di istana, bak cerita sinetron, Paswalpres mencegat mobil mereka. Begitu Soedjono melongok dari kaca jendela, mobil dibiarkan masuk. "Kami mengendarai VW Combi ke istana," kenang Budya. Romo Mesran kemudian menitahkan agar mangga muda itu dipendam di bawah tiang bendera. "Malam-malam saya menggali tanah istana dan menanam mangga," kata Budya.

Berkat mangga muda itu, menurut Soedjono, esoknya demonstrasi itu mereda.

Kegiatan rutin batiniah untuk Soeharto?

Setiap malam Jumat, Soedjono secara rutin menggelar kegiatan njarwa di rumahnya, Jalan Diponegoro. Mereka yang hadir berjumlah sekitar 40 sampai 100 orang. Budya ingat, bila leluhur "masuk" ke dalam tubuh Romo Misran, kalimat awalnya adalah "Iyo Ngger...(ya Nak)." Langsung semua yang hadir secara koor sembari sungkem mengatakan: "Sugeng rawuh... (selamat datang), Eyang." Setelah dhawuh itu didengar, biasanya lalu "geng" itu mendiskusikannya dengan situasi politik mutakhir.

Setiap Suro (tahun baru Jawa), menurut Budyapradipta, Soedjono Hoemardhani bersama Romo Dijat juga pergi ke Padepokan Jambe Pitu di Gunung Selok, Cilacap. Ini adalah padepokan yang lokasinya ditemukan Romo Dijat dan kemudian dibangun oleh Soedjono. Antara kawasan Gunung Srandhil dan Gunung Selok di Cilacap memang terkenal banyak bertebaran petilasan.

Soeharto tak asing dengan petilasan-petilasan di Cilacap. Adi Suwarto, seorang juru kunci di sana, pernah mengantarkan Soeharto berziarah ke petilasan Kiai Semar Bodronoyo atau Kaki Tunggul Sabdodadi Doyo Amongrogo yang letaknya di sisi selatan Bukit Srandil. "Dua hari sebelum kedatangan Pak Harto, lokasi kami kosongkan. Soeharto datang malam hari hanya sekitar dua jam," kata Adi Suwarto.

Menurut Romo Dijat, dibanding petilasan-petilasan lain, letak geografis Jambe memiliki energi paling kuat dan sangat cocok sebagai tempat menerima dhawuh yang berperan besar dalam hidup. Petilasan Jambe Pitu yang letaknya di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, sekitar 20 kilometer dari pusat kota Cilacap itu tempatnya memang asri.

Tempo menyaksikan bagaimana lokasi petilasan diteduhi pohon-pohon akasia. Puluhan kera masih dapat kita lihat bergelantungan. Debur ombak Pantai Selatan dari bawah kaki bukit terdengar lembut. Dari puncak pebukitan memandang ke bawah dapat terlihat tepi laut. Pintu gerbang petilasan Jambe Pitu dibangun dari batu hitam candi. Untuk mencapai bangunan petilasan, pengunjung harus melewati jalan berlantai batu hitam sepanjang kira-kira 300 meter. Kompleksnya megah, luasnya sekitar 50 x 30 meter. Tembok setinggi dua meter mengeliling kompleks bangunan.

Bangunan utama berupa rumah kecil. Di atas pintu masuk kita bisa melihat foto Raden Panji Soedijat Prawirokoesoema alias Romo Dijat. Di sebelahnya terdapat bangunan

seperti balai-balai berlantai keramik putih. Inilah tempat Romo Dijat memberi petuah-petuah bagi para murid. "Setiap Suro, Rama Dijat akan mencandra tahun yang akan datang," kata Toto Raharjo. Ia adalah cucu Mbah Tomo, juru kunci yang meninggal pada 1997.

Bangunan lainnya berbentuk rumah dengan empat kamar besar berlantai keramik warna hijau tua. Ini adalah kamar-kamar bagi Soedjono dan lingkarannya. Dulu, kenang Budya, Soedjono dan teman-temannya sering berdialog dengan dhawuh dan berdiskusi sampai pagi. Semua dhawuh direkam dan dicatat, bahkan diterbitkan sebagai buku kumpulan dhawuh yang diedarkan di kalangan terbatas. Budya masih menyimpannya sampai sekarang.

III

Soedjono Hoemardani meninggal dunia pada 1986. Soeharto menghadiri pemakamannya. "Saya melihat mata Pak Harto mbrebes mili (berkaca-kaca)," kata Budyapradipta. Ia jarang melihat Soeharto menangis di depan umum. Itu tandanya ia sangat kehilangan sahabat seperguruannya itu. Apalagi, sebelumnya para rama, guru-guru utamanya, juga meninggal.

Banyak kalangan dari dunia kebatinan Jawa melihat, setelah kematian Soedjono Hoemardani, Soeharto seperti kehilangan arah. "The Smiling General" itu seperti jalan sendiri tanpa sahabat dekat. Dari kejawen ia lalu tiba-tiba terlihat mendekati Islam. Bagi sebagian orang Jawa, tindakan Soeharto itu seperti keluar dari rel yang telah digariskan.

Budi Kusumo Putro, putra Rama Dijat, berkisah, sebelum Soeharto berniat menjabat presiden untuk periode ketiga, pada 1982, Rama Dijat sudah mengingatkan agar Soeharto mengurungkan ambisinya. Namun, Soeharto ngotot agar diizinkan menjadi presiden dan memohon agar Romo Dijat memintakan "restu" kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Atas permintaan tersebut, akhirnya Romo Dijat melakukan laku (tirakat) melakukan perjalanan ke segenap penjuru Nusantara selama kurang lebih satu tahun. Di berbagai tempat ia melakukan meditasi. "Ayah mendapat wisik, Soeharto bisa menjadi presiden, namun hanya untuk satu periode lagi," tuturnya. Hasilnya itu disampaikan kepada Soeharto. Tempat yang dipilih untuk menyatakan persoalan penting itu adalah di rumah ayah Romo Dijat di Dukuh Gopetan, Desa Gemblegan Kalipotes, Klaten. Sebuah pilihan simbolis, karena itulah tempat untuk pertama kali Soeharto bersedia menjadi murid Rama Dijat.

Pada 1984, Romo Dijat meninggal. Toto Iriyanto, putranya yang lain, menceritakan, pada pertengahan 1987 saat proses pemilihan umum berlangsung, saat melaksanakan tahajud, dia merasa mendapat wisik dari almarhum ayahnya. "Tulung kandanono kadangmu Soeharto (tolong kasih tahu saudaramu Soeharto)."

Inti wisik itu memperingatkan agar Soeharto lengser. Toto diperintahkan agar menemui Soeharto dengan membawa jantung pisang raja, jeruk Bali, serta kelapa gading

(kelapa kuning). Jantung pisang raja adalah simbol kekuasaan, jeruk bali simbol agar kekuasaan itu dikembalikan, kelapa gading adalah simbol masa keemasan. "Intinya, Soeharto harus menanggalkan kekuasaannya di saat masa keemasannya," tutur Toto.

Toto mulanya ragu menyampaikan pesan itu, namun akhirnya Toto berkeyakinan harus datang ke istana. Selang beberapa hari, berangkatlah Toto menemui Soeharto di istana seorang diri. Toto hampir tak lolos dari pemeriksaan Pasukan Pengaman Presiden. Beruntung saat itu Soeharto sedang keluar dari pintu utama istana hendak masuk ke dalam mobil. Sambil mengisap cerutu, Soeharto langsung melambaikan tangannya kepada Toto. Rupanya Soeharto masih mengenali wajah putra gurunya.

Keduanya terlibat dalam percakapan singkat dalam bahasa Jawa. Toto langsung menceritakan dirinya mendapat wangsit agar menyerahkan tiga simbol tersebut kepada Soeharto. Soeharto pun menerima baki berisi jantung pisang raja, jeruk bali, dan kelapa gading. "Wis tak tampa (saya terima)," kata Soeharto. Toto segera pamit pulang tanpa masuk istana. Soeharto pun bergegas melaju dengan mobil.

Ternyata Soeharto tidak mengindahkan "pesan" tersebut. Ia terus menginginkan tampuk kekuasaan. Kita tidak tahu sejauh mana relevansi kebenaran wisik itu. Tapi tahun-tahun itu sepak terjang bisnis putra-putrinya mendapat sorotan yang kian tajam. Soeharto seperti lupa daratan. Sampai terjadilah krisis moneter dan pada 1998 ia lengser. Tapi itu sudah terlambat. Banyak yang menganggap, apabila ia menaati pesan para gurunya itu, di saat tahun-tahun terakhir hidupnya Soeharto akan lebih selamat.

Dari Gua Semar, Wangsit itu Berasal

SOEHARTO nama yang sangat akrab bagi penduduk kawasan Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Soeharto pernah bersemadi di Gua Semar-salah satu gua yang terletak di Dieng-sebelum menjadi presiden. Di gua itulah ia memperoleh wangsit menjadi pemimpin.

Gua Semar atau Gua Mandala Sari, yaitu istana Begawan Sampoerna Djati (Semar), berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Letaknya di antara kawasan pariwisata. Gampang dijangkau-satu jam perjalanan dari alun-alun Wonosobo-tapi tak mudah memasukinya. Dengan kata lain, harus menempuh rantai izin yang panjang. Pertama-tama, Tempo minta izin ke sang juru kunci. Sang guru kunci itu harus minta izin ke beberapa sesepuh sakti di perkampungan itu. Setelah semua terpenuhi, barulah keluar cerita dari mulut Rusmanto, juru kunci Gua Semar.

Sebelum sampai ke Gua Semar, tutur Rusmanto, Soeharto telah melakukan serangkaian pertapaan: di Gua Jambe Lima dan Gua Jambe Pitu, lalu Gua Suci Rahayu di kawasan Gunung Selok, Cilacap, Jawa Tengah. "Di Suci Rahayu itulah Soeharto melakukan penyucian awal," kata Rusmanto.

Langkah selanjutnya, bertapa ke Gunung Srandil, masih di Cilacap. Gunung di tepi pantai itu dikenal sebagai tempat khusus untuk ziarah. Di sanalah dimakamkan para leluhur tanah Jawa: Eyang Agung Heru Cokro, Eyang Sukmo Sejati, Eyang Kaki Tunggul Sabdo Jaati Doyo Amongrogo, Nini Dewi Tanjung Sekar Sari, dan Eyang Lalangbuono atau yang lebih terkenal disebut Ismoyo Ratu.

Dari sana, Soeharto melanjutkan tapa di Gunung Lawu, tempat menghilangnya raga Raja Brawijaya. Empat tahap pertapaan, di Argo Dalam, Argo Tumila, Argo Piruso, dan Argo Tiling. Setelah itu, ia bertapa lagi di sebuah gunung kecil di Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Selain bertapa, di gunung tersebut juga ada acara nyekar di makam Syekh Jamu Karang. "Barulah setelah itu, lokasi terakhir pertapaan dilakukan di kawasan Dieng," ucap Rusmanto.

Ketika Soeharto datang, kondisi Dieng belum sebagus sekarang. Jalannya berbatu-batu, menanjak dan berlubang. Menurut Rusmanto, Gua Semar istana terakhir Mandala Sari alias Semar. Di gua itulah Semar bersemadi abadi setelah pertapaan di berbagai tempat. Menurut kepercayaan, urut-urutan pertapaan di tanah Jawa selalu berakhir di kawasan Dieng.

Rusmanto tak langsung mengantar Soeharto bertapa. Ia mendapat cerita yang lengkap-tentang perjalanan tapa Soeharto-dari pamannya, Darmaji, yang ketika itu menjadi juru kunci. Ketika bertapa, Soeharto hanya ditemani oleh juru kunci Darmaji. Para

pengawalnya menunggu pada jarak yang agak jauh. Sebelum bertapa, Soeharto harus melakukan bimolukar, atau mandi lulur untuk menghilangkan nafsu angkara murka.

Dari Gua Semar, Soeharto mandi di Telaga Warna, telaga yang melambangkan empat nafsu yang harus dikendalikan: lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Dan pengendalian nafsu itu dilakukan di Gua Jaran, gua yang terletak di sebelah utara Gua Semar. Disebut jaran (kuda) karena gua itu, menurut cerita leluhur di Dieng, awalnya adalah jaran milik Resi Kendali Seto yang bertujuan mengendalikan nafsu manusia yang ada di aliran hitam dan putih.

Gua selanjutnya adalah Gua Sumur. Sedikit lebih lebar dari Gua Semar, dan memiliki sumber air yang tingginya stabil. Musim hujan atau kemarau, volume airnya tetap. Sumber air di gua tersebut juga disebut air kehidupan. Dari penghuni Gua Sumur Soeharto mendapat petunjuk: jangan ragu untuk pasrah kepada Sang Kuwasa (Yang Kuasa), agar selalu dilindungi atau disembuhkan dari berbagai penyakit.

Soeharto menutup perjalanan tapanya di Kawah Si Kijang, simbol hewan yang bisa dijadikan contoh bagi manusia atas kepintaran dan rasa rendah hatinya. Dilanjutkan ke Kawah Sileri, kawah yang mengajarkan agar orang hidup untuk tidak melanggar empat wewaler (aturan), yakni aturan keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan. Dan dua tahap selanjutnya adalah menuju Sumur Jolotundo dan Kawah Condrodimuko.

Setelah Mencapai Gondelan Kayon

RABU, 30 April 1997. Dengan rasa tak percaya, KRH Soehadi Darmodipuro menyaksikan tayangan langsung di televisi. Hari itu semua stasiun meliput acara pernikahan Hutomo "Tommy" Mandala Putra dengan Ardhia Pramesti Regita "Tata" Cahyani. Hanya sejenak, budayawan Keraton Surakarta, Jawa Tengah, itu buru-buru mematikan televisi.

Soehadi, 60 tahun, rupanya gamang menyaksikan keris yang dikenakan Tommy pada upacara pernikahan itu. Dia menganggap ganjil keris yang terselip di bagian punggung putra Soeharto itu. Itulah keris gayaman-khusus untuk perkabungan. "Saya nggak percaya," kata Mbah Hadi, begitu Soehadi biasa disapa. "Ini bisa berakibat celaka."

Menurut Mbah Hadi, Tommy seharusnya memakai keris ladrangan-khusus untuk upacara pernikahan. Ia percaya, salah pakai, salah tempat, dan salah waktu ageman bisa membawa petaka. Tommy, kita tahu, kemudian memang masuk bui. Dan inilah yang dianggap Mbah Hadi sebagai "celaka".

Toh, Mbah Hadi mencoba tak percaya. Dibukanya kitab primbon Jawa, mereka-reka hitungan pawukon. Tommy lahir Ahad Pahing, 15 Juli 1962, dan Tata Rebo Legi, 2 April 1975. Di situ tertulis, pasangan ini tidak jodoh. Keduanya bisa melahirkan satria wiring-sesuatu yang harus dihindari dengan menjalani ruwatan, atawa tolak bala.

Perkara itung-itungan Jawa, Cendana juga tentu punya. Menurut Mas'ud Thoyib, Ketua Penghayat Kepercayaan, jika ketemu hitungan kurang baik, harus dibuatkan penangkalnya. "Dalam pernikahan Mas Tommy, penangkal itu dimasukkan dalam urut-urutan ritual adat," kata Mas'ud, yang terlibat persiapan pernikahan.

Ada satu permintaan Soeharto dalam menolak bala Tommy. Pemimpin Orde Baru itu minta digelar Bedaya Sanga-yang dibawakan sembilan anak dara. Maksudnya: agar rumah tangga Tommy dan Tata langgeng sejahtera. Masih banyak tetek-bengek tolak bala lain, seperti pemasangan bleketepe (sesaji buah-buahan di pintu), siraman, sampai midodareni.

Mas'ud melihat Soeharto mengistimewakan Tommy. Ingatlah pada September 1965, ketika Tommy kecil tersiram sup panas dan sang ayah menungguinya di RSPAD Gatot Subroto. "Dari garis wajahnya juga Mas Tommy paling mirip Pak Harto," kata Mas'ud. Menyongsong pernikahan Tommy-Tata, Mas'ud yakin Soeharto menjalani ritual khusus nglakoni, antara lain meditasi dan puasa.

Olah kebatinan memang hobi Soeharto. Mas'ud tahu betul, Soeharto sering nglakoni bareng paranormal Soedjono Hoemardhani, Mesran, Romo Marto, dan Romo Lukman-keempatnya sudah mendahului ke alam baka. Mereka ini generasi pertama lingkaran kebatinan Soeharto.

Putra Mesran, Pungky, membenarkan ayahnya sering menemani Soeharto nglakoni. Suatu ketika, misalnya, Soeharto menapak tilas jejak spiritual Panembahan Senopati. Sebelum meditasi, Soeharto juga menjalani tirakat 40 hari.

Sejak para sesepuh itu meninggal, Soeharto nglakoni sendiri. Ia, konon, sudah mencapai ilmu tertinggi, Gondelan Kayon-pasrah kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Soeharto nglakoni suaraning asepi-bisikan terhening-untuk mendapat dhawuh atau petunjuk. "Pak Harto punya ruangan meditasi di rumah Cendana," kata Mas'ud, yang mengaku pernah melihat ruangan itu.

Paranormal Buanergis Muryono, yang juga terlibat dalam persiapan spiritual pernikahan Tommy, lain pula komentarnya. Sebelum pernikahan, katanya, Cendana sudah tahu pasangan Tommy dan Tata tidak cocok. "Berdasarkan perhitungan nama dalam aksara Jawa, bukan penanggalan," kata Muryono, yang berambut gondrong dan berpakaian serba hitam.

Dua nama tadi bakal dipenuhi malapetaka: pegatan (cerai), apes (susah), bahkan mati. Penolak bala apa pun tak bisa menyatukan mereka.

Misteri Anak Desa Kemusuk

"Saya ini benar-benar kelahiran Desa Kemusuk dan memang anak petani dari Desa Kemusuk...."

Suara bariton Soeharto menguasai ruang kerja kepresidenan di Bina Graha, Jakarta, Senin siang pada pengujung Oktober 1974. Di dalam gedung di samping Istana Negara itu, Soeharto mengundang sekitar seratus wartawan dalam dan luar negeri. Acaranya, Soeharto menceritakan tentang silsilah riwayat hidupnya.

Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah pejabat teras saat itu memang langka. Boleh dibilang, hampir tak pernah terjadi Kepala Negara, yang pada dasarnya pendiam itu, membentangkan satu bagian dari sejarah hidupnya secara khusus kepada publik selama sekitar dua jam. Mengapa?

Semua bermula dari artikel majalah POP yang terbit di Jakarta. Dalam edisi No. 17, Oktober 1974, POP-singkatan Peragaan, Olahraga, Perfilman-terbit dengan tulisan bertajuk Teka-teki Sekitar Garis Keturunan Soeharto. "Tulisan itu tidak saja merugikan saya pribadi, tapi juga keluarga dan leluhur saya," kata Soeharto di hadapan wartawan waktu itu.

Tulisan lima halaman itu bercerita tentang silsilah riwayat hidup Soeharto. Kisahnya berbeda dengan silsilah yang ditulis dalam buku The Smiling General karya O.G. Roeder terbitan Gunung Agung, Jakarta, 1969. Menurut artikel itu, Soeharto sebenarnya anak seorang priayi keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono II. Priayi itu bernama R.L. Prawirowiyono, yang bergelar R. Rio Padmodipuro.

Suatu hari, Rio terpaksa menitipkan istri dan anaknya kepada orang desa yang bernama Kertorejo, sebab ia harus menikah lagi dengan putri seorang wedana yang berpengaruh. Kala itu si anak, katanya bernama R. Soeharto, telah berusia 6-7 tahun. Ini sebuah tragedi yang sungguh menyedihkan, kata majalah itu mengutip ucapan seseorang.

Sejak itu ayah, ibu, dan anak tak pernah mencoba saling berhubungan lagi. Hingga sang ayah meninggal pada 1962, ia tak sempat melihat wajah putranya yang telah dibuangnya, yang tak lain-menurut majalah POP dengan nada pasti-adalah Soeharto, Presiden RI kedua dan penguasa Orde Baru.

Sebenarnya, sekitar dua tahun sebelum artikel POP itu terbit, bisik-bisik tentang "silsilah" tersebut mulai santer di Yogyakarta. Dan hasilnya tampaknya telah dikirimkan kepada Soeharto langsung. Seperti diungkapkan Soeharto di depan wartawan di Bina Graha pada 28 Oktober 1974, soal silsilah itu telah lama didengarnya. "Bahkan ada yang tulis surat kepada saya dalam bentuk cerita," katanya.

Menurut Soeharto, isi ceritanya tentang seseorang yang kehilangan anaknya sejak kecil dan selalu dicari, sekarang ini bisa diketemukan. Bahkan anak itu telah memperoleh kedudukan tertinggi, menjadi presiden. Si orang tua yang mencari kini mengharapkan kedatangan anak itu untuk menerima warisan.

Saat itu, Soeharto segera mafhum apa yang dimaksud. Karena ia tahu siapa yang menulis surat itu (Soeharto tak menyebut nama), maka dijawabnya: gambaran bahwa dia si anak yang dicari dan kemudian ditemukan itu tak benar. "Saya adalah anak yang dilahirkan di Desa Kemusuk," katanya menegaskan.

Soeharto lalu menceritakan kisah hidupnya. Katanya, ia dilahirkan pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, sebuah desa terpencil di wilayah Argomulyo, Godean, sebelah barat Kota Yogyakarta. Ibunya bernama Sukirah. Sedangkan ayahnya, Kertosudiro, adalah ulu-ulu atau petugas desa pengatur air yang bertani di atas tanah lungguh, tanah jabatan selama memikul tugasnya itu. "Beliau yang memberi nama Soeharto kepada saya."

Kertosudiro, menurut keterangan Soeharto, seorang duda beranak dua. Jadi, ia anak ketiga dari Kertosudiro dengan ibu Sukirah. Hanya, hubungan Kertosudiro-Sukirah ternyata kurang serasi sehingga, begitu Soeharto lahir, orang tuanya bercerai. Soeharto kemudian diasuh Mbah Kromodiryo, dukun yang biasa menolong orang melahirkan, termasuk menolong kelahiran Soeharto. "Nama panggilannya adalah Mbah Kromo, adik kakek saya, Mbah Kertoirono," kata Soeharto.

Beberapa tahun kemudian Ibu Sukirah menikah lagi dengan seseorang bernama Atmopawiro. Pernikahannya itu melahirkan tujuh orang anak: Sukiyem, Sucipto, Nyonya Haryowiyatmo, Probosutejo, Suminah, Suwito, dan Nyonya Suharjo. Sedangkan ayah Soeharto juga menikah lagi. Dan dari pernikahan yang ketiganya itu ia mendapat empat anak lagi: Nyonya Harsono, Santoso, Nyonya Juhron, dan Nyonya Tubagus Sulaeman.

Begitulah Soeharto mengisahkan sejarah hidupnya. Waktu itu, silsilah versi resmi Soeharto itu dibagi-bagikan kepada para wartawan. Yang jelas, dalam pandangan Soeharto, tuduhan yang dimuat POP itu bisa menimbulkan perdebatan dan perbedaan serius dalam masyarakat. Sebab, tuduhan itu memberikan kesempatan yang baik untuk subversi, mengganggu stabilitas nasional, dan akan mempermalukan bangsa. "Juga akan menciptakan ketidakpercayaan kepada pemimpinnya," Soeharto menandaskan.

Tapi, benarkah artikel dalam majalah POP itu gosip belaka? Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, awal Januari 1975, Rey Hanityo, Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab POP, menyodorkan pembelaan. Katanya, artikel tentang silsilah riwayat hidup Soeharto itu merupakan hasil penelitian wartawan POP dari sumber berita yang dapat dipercaya. Dan tulisan itu sedikit pun tak bermaksud menghina presiden. Itu sekadar menyumbangkan tulisan untuk bahan perbandingan antara versi majalah POP dan buku The

Smiling General karya O.G. Roeder. Harapannya, "Pak Harto sudi menerimanya untuk jadi bahan baru," ujar Rey kepada Tempo saat itu.

Tapi Soeharto malah berang. Ia membantah semua yang ditulis POP. Dan majalah itu pun dibredel: Surat Izin Cetak dan Surat Izin Terbit dicabut. Rey Hanityo-yang asal Tegal, Jawa Tengah-dijebloskan ke penjara. Tamatlah riwayat majalah dwi-mingguan itu. Padahal, tulisan itu seharusnya bersambung pada edisi berikutnya.

Tempo mencoba menyibak misteri di sekitar silsilah Kemusuk itu. Romo Satroatmojo, abdi dalem juru serat keraton, sekaligus ipar R. Rio Padmodipuro, mengungkapkan bahwa ia menyaksikan langsung kelahiran Soeharto. Menurut dia, Soeharto merupakan anak bekel (abdi dalem) Prawirowiyono, yang kemudian bergelar R. Rio Padmodipuro, dari istri pertamanya: Sukirah.

Pada usia 0-7 tahun, Soeharto tinggal di belakang Jayeng Prakosan di Suronatan, Yogyakarta. Setelah itu, Soeharto kecil kemudian diboyong ke Desa Kemusuk. Tapi sayang, ayahnya melupakannya dan tak pernah mengirimkan nafkah karena takut kepada mertuanya, Jayeng Prakosa, yang saat itu mempunyai kekuasaan besar dan punya kedekatan dengan Sultan Hamengku Buwono VII, sebagai raja saat itu.

Setelah Soeharto diungsikan ke Kemusuk, beberapa kali kakak Rio, RA Martopuro, menengoknya. Bahkan ia ingin memboyong Soeharto ke rumahnya, di Ndalem Notoprajan, namun ditentang adiknya, Jayeng Turangga. Upaya RA Martopuro itu sesungguhnya juga atas keinginan Rio, agar ayah-anak itu tak kehilangan jejak. "Rio, yang pendiam dan takut pada istri kedua dan mertuanya, akhirnya mengalah diam," ujar Romo Sas, panggilan akrabnya, kepada Tempo yang menemuinya dua tahun sebelum ia meninggal pada 2004.

Kisah serupa dituturkan Romo Gayeng. Menurut dia, ayahnya, Raden Mas Purbowaseso (dulu juga dipanggil Romo Gayeng), pernah menceritakan riwayat Soeharto. "Kesaksian itu dimuat majalah POP edisi Oktober 1974," katanya saat ditemui di rumahnya di Kampung Jambu, Yogyakarta, Agustus 2001 lalu.

Ayah Romo Gayeng, RM Purbowaseso, adalah kakak kandung R. Rio Padmodipuro. Ketika Soeharto lahir, R. Rio Padmodipuro masih berpangkat bekel (abdi dalem) dan bernama R.B. Prawirowiyono. Setelah menikah, ia tinggal di Kampung Suronatan sampai lahirnya Soeharto.

Kelahiran Soeharto ternyata tak membawa kebahagiaan bagi Sukirah, karena Prawirowiyono diambil menantu oleh Mas Wedono Jayeng Prakosa, seorang wedana keraton yang dekat dan disayang Sri Sultan Hamengku Buwono VII. "Pengaruh Jayeng Prakosa yang sangat kuat membuat Prawirowiyono tak berani menolak."

Takut akan mempengaruhi kedudukannya, ia mengungsikan istri dan anaknya (Soeharto) yang masih kecil ke sebuah rumah di belakang Jayeng Prakosan. Walau telah

disembunyikan, akhirnya tetap tercium oleh istri keduanya. Karena bingung, ia mengungsikan istri pertama dan anaknya ke luar kota, di rumah seorang kenalannya yang mempunyai jabatan ulu-ulu di Desa Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, bernama Kertorejo. "Pada waktu itu umur Soeharto baru sekitar 6-7 tahun," ia menjelaskan.

Begitulah. Mungkin yang cukup menarik adalah pernyataan Sumitro Djojohadikusumo dalam otobiografinya, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang. Menurut Sumitro, dalam acara lamaran Prabowo-Titiek, Soeharto pernah berkisah tentang masa kecilnya. Katanya, sewaktu berusia sepuluh tahun, "Soeharto menjadi rebutan antara orang tua angkatnya dan ayah kandungnya yang berasal dari lingkungan keraton."

Bila pernyataan Sumitro itu benar, jelaslah bahwa Soeharto memang pernah keceplosan bicara tentang dirinya yang memang keturunan seorang priayi keraton. Jadi, ia bukan anak petani dari Kemusuk seperti selama ini dikemukakannya. Soalnya: mengapa ia keberatan mengaku sebagai keturunan keraton dan memilih menyebut diri anak petani? Adakah hubungannya dengan jabatannya sebagai presiden, yang tentu lebih "dramatis" jika presiden datang dari rakyat kebanyakan?

Setelah Sang Ibu Berpulang...

NDALEM Kalitan tiba-tiba berubah jadi beku. Rumah joglo kuno yang terletak hanya sekitar 100 meter dari jalan protokol Slamet Riyadi yang membelah Solo itu seperti tercekat. Beberapa orang menangis. Tak terkecuali Soeharto, Presiden Indonesia kala itu. Lelaki yang dijuluki sebagai orang terkuat di Asia menurut versi majalah Asiaweek itu tampak kuyu. Berulang kali pria berbaju hitam-hitam itu mengusap air mata yang membasahi pipi. Apalagi, saat peti mati dari kayu jati berpelitur cokelat itu mulai berangkat menuju pemakaman, Pak Harto makin terpekur.

"Selamat jalan, Ibu. Kami selalu bersamamu dalam doa," ucap Siti Hardijanti Rukmana, putri sulung Soeharto, setengah berbisik, sembari terisak.

Senin, 29 April 1996, adalah Senin kelabu buat keluarga Soeharto. Raden Ajeng Siti Hartinah, istri Soeharto, dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, di kaki Gunung Lawu, sekitar 30 kilometer dari Ndalem Kalitan. Ibu Tien-begitu ia biasa dipanggil-meninggal sehari sebelumnya pukul 05.10 pagi di Rumah Sakit Pusat Pertamina-rumah sakit yang menjadi proyek mercusuar di masanya. Penyebabnya? Pernyataan resmi Istana menyebutkan, wanita berlesung pipit itu meninggal setelah terkena serangan jantung pada subuh di Hari Raya Idul Adha itu.

Kepergian Hartinah adalah pukulan godam terberat bagi Soeharto. Banyak intrik, juga musuh-musuh politik yang telah dihadapi lelaki ini. Tapi, saat itu, tiada cobaan seberat meninggalnya Hartinah. Pernikahan mereka sudah berumur 49 tahun. Di antara lelaki dan perempuan tua selalu ada sesuatu yang tersambung, saling menguatkan.

Wafatnya Ibu Tien, menurut R.E. Nelson dalam bukunya, Suharto, Sebuah Biografi Politik, tidak hanya membuat Soeharto kehilangan pendamping hidup. Ia juga kehilangan sang "penjalin jaringan, penyusun strategi, pengawas Soeharto sekaligus pendisiplin anak-anaknya."

Hartinah bukanlah first lady yang cuma sibuk gunting pita atau berpidato sana-sini. Banyak ide besar yang lahir dari Hartinah yang mengukuhkan posisi Soeharto. Pertemuan Soeharto dengan para konglomerat di Istana Bogor di penghujung Maret 1996 adalah salah satu buktinya. Hartinahlah penggagasnya. Waktu itu langit Bogor biru cerah. Ratusan pengusaha papan atas memadati Istana Bogor yang putih bersih. Setelah gamelan Sunda dan pertunjukan tari Jaipongan dari Siti Hardijanti Rukmana menghibur orang-orang terkaya di Nusantara itu, Hartinah mengajak para pengusaha top menyumbang. Hasilnya, hanya dalam hitungan jam, Ibu Negara itu berhasil menjala dana Rp 9,7 miliar dari 246 pengusaha. Dana itu akan disalurkan Panitia Dana Gotong Royong Kemanusiaan, yang jabatan ketuanya dipegang oleh dirinya, sementara Soeharto adalah pelindungnya, untuk korban banjir di Bandung Selatan.

Jauh sebelum itu, wanita berdarah ningrat-ayahnya adalah buyut dari Mangkunegara III, bangsawan Keraton Solo-itu juga menggagas pendirian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, menciptakan senam kesegaran jasmani yang diwajibkan di sekolah dan kantor pemerintah, mendesakkan larangan berpoligami untuk pegawai negeri bersama para nyonya pejabat tinggi, sampai munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, serta melahirkan Taman Mini Indonesia Indah yang kontroversial.

Taman Mini salah satu proyek kontroversial yang lahir dari gagasan Hartinah. Pada akhir Desember 1971 itu penduduk Ceger, Jakarta Timur, bergolak. Mereka protes karena 100 hektare tanah penduduk yang tergusur untuk proyek mercusuar itu hanya dihargai Rp 60 sampai Rp 100. Padahal, saat itu harga tanah di kawasan tersebut Rp 350.

Mahasiswa juga meradang karena proyek itu bertentangan dengan Gerakan Penghematan yang dicanangkan sendiri oleh Soeharto. "Biayanya Rp 10,5 miliar sama dengan pembangunan tujuh kampus universitas sebesar Universitas Gadjah Mada," kata Todung Mulya Lubis, yang waktu itu masih menjadi mahasiswa tingkat II Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Namun, Hartinah santai saja menanggapi protes itu. Ia tak datang memenuhi panggilan DPR dengan alasan "capek baru datang dari luar negeri". Ia hanya berujar, "Mumpung saya masih hidup." Ibu ini mendapat ide tersebut setelah mengunjungi Disneyland (Amerika Serikat) dan Timland (taman mini di Thailand). Soal biaya dia juga tak pusing. Rumah-rumah adat di Taman Mini itu dibangun atas "sumbangan" pemerintah daerah. Besarnya Rp 100 sampai 200 juta per anjungan. Namun, banyak provinsi yang mengeluh tak punya bujet.

Protes-protes itu diserang balik oleh Soeharto. Pada saat berpidato tanpa teks saat meresmikan Rumah Sakit Pertamina, ia menuduh para pengkritik itu mengganggu stabilitas nasional. "Saya akan menghantam siapa saja yang melanggar konstitusi," katanya. Setelah itu, beberapa tokoh seperti Arief Budiman, redaktur Sinar Harapan Aristides Katoppo, dan Haji Johanes Princen masuk bui.

Soal antipoligami juga bukan rahasia. Dari pejabat tingkat tinggi sampai rendahan semua tak berani beristri dua (secara resmi) karena peraturan keras dari istri presiden ini. Tak mengherankan bahkan Soeharto sendiri dalam biografinya menyatakan, "Hanya ada satu Nyonya Soeharto dan tidak ada lagi yang lainnya. Jika ada, akan timbul pemberontakan yang terbuka di dalam rumah tangga Soeharto."

Campur tangan Hartinah pada urusan Soeharto bukan semata-mata urusan proyek mercusuar. Ia juga mengurusi menteri-menteri. Mantan Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie pernah bercerita pada Tempo. Katanya, Nyonya Tien Soeharto pernah mengkritik kantornya. "Habibie itu tak benar, masak kamarnya kayak gudang. Mbok diatur dengan baik," ujar Hartinah. Untung, Soeharto tak terlalu menanggapi soal itu. "Ah, nggak usah,

yang penting Habibie kerasan duduk di situ, dan terus mendapat ilham. Jadi, jangan diganggu," kata Soeharto, seperti diungkapkan Habibie.

Hartinah dan Soeharto adalah sejoli yang kompak walaupun mereka pernah bertengkar beberapa kali, salah satunya karena urusan anggrek dan bayi. Bagi perempuan yang lahir 23 Agustus 1923 di Jaten, dusun di pinggir jalan Solo-Tawamangu, Jawa Tengah, itu Soeharto adalah pria impian. Itu terjadi sejak 1947. Sebelum dia dilamar, Hartinah tak pernah kenal Soeharto. Namun, dalam mimpi ia pernah bertemu sesosok pemuda ganteng memakai jaket tentara. Dalam mimpinya itu, pemuda itu merangkul mesra dan memakaikan jaketnya ke badan Hartinah. "Aneh tapi benar, wajah tentara yang gagah itu mirip dengan foto kecil yang diperlihatkan Ibu (sebelum lamaran)," tulis Abdul Gafur dalam bukunya, Siti Hartinah Soeharto-Ibu Utama Indonesia, mengutip pernyataan wanita yang dulu harus berjualan batik karena kecilnya gaji Soeharto itu.

Sejak itulah anak pasangan Raden Mas Soemoharjomo dan Raden Ajeng Hatmanti itu selalu menemani Soeharto. "Siti Hartinah Soeharto adalah sahabat Presiden (Pak Harto) yang paling sangat dipercaya," kata Dr. O.G. Roeder dalam buku Presiden Soeharto Anak Desa keluaran 1969. Hampir semua penampilan Presiden Soeharto di depan umum selalu didampingi wanita yang bercita-cita menjadi dokter itu.

Kegiatan Hartinah makin hari makin bertumpuk. Sejumlah jabatan ketua di berbagai yayasan, dari yang mengurusi jantung, pariwisata, sampai yang mengurusi buah-buahan dan empon-empon, disandangnya. Hingga, akhirnya, pada April 1996 dia mengeluh capek. Istri yang sering mengkritik Soeharto ini, menurut Nelson dalam buku Soeharto, Sebuah Biografi Politik, sebenarnya sudah ingin pensiun sejak 1980-an dan tak senang Soeharto mencalonkan diri lagi.

"Wah sudahlah, sekarang ini saya sudah tua, sudah mau menikmati sisa-sisa hidup saja," kata wanita yang saat itu berusia 73 tahun saat ia diminta menjadi penasihat sebuah yayasan, dua pekan sebelum ia meninggal.

Rupanya, itu harapan yang tak sampai. Pada 28 April 1996, Hartinah, wanita multiperan-Ibu Negara, istri, ibu, nenek, buyut, dan pengelola aneka yayasan-itu mengembuskan napas terakhir. Tim dokter kepresidenan menemukan gumpalan darah di pembuluh kakinya, yang kemungkinan juga telah menyumbat jantungnya.

Ia akhirnya kembali ke rumah tetirahnya, Ndalem Kalitan yang bisu, sebelum akhirnya dimakamkan di kaki Gunung Lawu. Sang Tukang Kritik telah pergi. "Kematian Ibu Tien itu membawa dampak musnahnya pengawasan atas kecenderungan abadi Soeharto untuk menjagokan kepentingan bisnis anak-anaknya," kata Nelson. Sejak kejadian itu, "Tidak banyak yang ingin ia perjuangkan selain mempertahankan cengkeraman kekuasaannya."

Warisan Politik Jenderal itu

R. William Liddle
Profesor ilmu politik, Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

Presiden Soeharto adalah seorang diktator yang tanpa sengaja tetapi dalam banyak hal memuluskan proses demokratisasi di negerinya. Saya tidak tahu bagaimana kenyataan ini akan dinilai kelak oleh para sejarawan, yang biasanya lebih mementingkan intention (maksud) ketimbang outcome (hasil). Tetapi sebagai pengamat lama yang dulu tidak pernah percaya bahwa pemerintahan Orde Baru yang otoriter akan disusul langsung oleh pemerintahan yang demokratis serta stabil, saya merasa perlu menguraikan peran Soeharto dalam proses ini.

Pertama dan mungkin terutama, para pemimpin TNI telah dikebiri selaku aktor politik sejak Benny Moerdani dipecat sebagai Panglima ABRI pada 1987. Setelah itu Soeharto tidak pernah membiarkan satu perwira tinggi menjadi terlalu kuat. Soeharto menyeleksi langsung perwira muda untuk menjadi ajudannya, lalu ia menjamin kesetiaan mereka dengan kebijakan promosi dan kenaikan pangkat yang cepat. Lagi pula, Soeharto mempertentangkan para perwira tinggi, seperti menantunya Prabowo Subianto dan bekas ajudannya Wiranto, agar salah satu tidak bisa bertindak sendiri atas nama ABRI.

Hasilnya adalah sebuah tentara yang tidak berdwifungsi lagi, yang tidak bisa bergerak sebagai kekuatan utuh di bawah kepemimpinan tepercaya. Maka, ramalan saya dulu bahwa Soeharto akan disusul oleh orang kuat lain, seperti Park Chung Hee di Korea disusul oleh Chun Doo Hwan, tak terwujud. Vakum politik yang diwariskan oleh kebijakan militer Soeharto justru diisi dengan orang sipil yang lemah tetapi prodemokrasi: B.J. Habibie (yang langsung menawarkan pemilu demokratis sebagai taktik politik untuk menyelamatkan jabatannya), Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri.

Kedua, seraya mencari pengabsahan bagi kekuasaannya, Soeharto menciptakan sebuah dunia fantasi yang kini menjadi realitas. Dunia itu terdiri dari lembaga-lembaga sok demokratis, asli tapi palsu, yang ketika beliau lengser keprabon bisa bertiwikrama menjadi lembaga demokratis sejati. Mulai 1971 sampai dengan 1997 pemilihan umum diadakan setiap lima tahun di tiga tingkat pemerintahan (bandingkan dengan periode Demokrasi Terpimpin, ketika tak ada pemilu sama sekali).

Dua partai politik, masing-masing dengan akar sosio-budaya (Islam dan nasionalisme) yang kuat, diperbolehkan bersaing dengan Golkar, partai negara yang diciptakan Soeharto. Di antara masa-masa pemilu, wakil rakyat bersidang secara teratur di MPR, DPR, dan DPRD-DPRD. Tentu saja, di belakang layar, Soeharto atau agennya menyelewengkan semua lembaga ini. Setelah Soeharto turun, dalam suasana politik yang serba kacau dan menakutkan (mengingat apa yang terjadi pada 1965?1966) lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan kaum reformis sebagai jembatan yang mampu membawa

mereka ke dunia yang dicita-citakan. Pemilu 1999 adalah pemilu demokratis pertama sejak 1955, tetapi secara teknis tidak banyak berbeda dengan pemilu-pemilu Orde Baru yang sama sekali tidak demokratis.

Ketiga, sistem pemerintahan Soeharto adalah sistem otoriter, bukan totaliter seperti di Uni Soviet. Hal itu berarti bahwa masih ada ruang untuk bergerak, meskipun sering dibatasi, buat organisasi masyarakat madani dan juga pers swasta, dua jenis lembaga sosial yang melatari setiap negara demokratis modern. Organisasi agama, misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, betul-betul memanfaatkan kesempatan itu dan bertambah besar, terorganisir, berakar, dan berpengaruh selama Orde Baru. Organisasi yang sering menantang pemerintah, seperti LBH atau Walhi merupakan sekolah perjuangan yang berharga bagi anggotanya tatkala posisi Soeharto digoyang krisis moneter 1997?1998. Pers swasta, terutama Tempo dan Kompas, merupakan alat pendidikan yang tak ternilai harganya tentang segala segi kehidupan modern, termasuk demokrasi, selama puluhan tahun.

Warisan terakhir adalah tawaran rekonsiliasi yang disampaikan Soeharto kepada beberapa kelompok masyarakat yang pernah dikucilkan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (seperti India atau Amerika), yang berarti bahwa setiap kelompok besar perlu diberi tempat yang layak. Pada pertengahan 1980-an Soeharto merangkul kaum Islam tradisional di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Kaum modernis menyusul beberapa tahun kemudian, ketika kelahiran ICMI dibidani oleh Habibie, salah satu menteri favorit Soeharto waktu itu.

Namun, rekonsiliasi tidak pernah ditawarkan kepada pendukung Partai Komunis Indonesia, yang dizalimi terus oleh Soeharto. Pada masa jayanya, pemimpin PKI berusaha mengusung aspirasi rakyat kecil. Mereka berhasil: PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Setengah abad kemudian, komunisme sudah mampus tetapi tuntutannya demi terciptanya kehidupan sosial yang lebih merata masih bergema. Dalam hal ini warisan Soeharto yang terpenting bagi rakyat kecil (ironinya saya akui) adalah keyakinannya pada kekuatan pasar selaku pencipta utama lapangan kerja. Sayangnya, banyak politisi masih terpukau oleh teori populisme, warisan zaman Pergerakan yang tak mungkin memecahkan masalah ekonomi dan politik masa kini.

Setia sampai Akhir

Ismail Saleh

Pasang badan

Kesetiaan Ismail Saleh pada Soeharto ditunjukkannya tanpa tedeng aling-aling. Dialah yang susah-payah berusaha menemui Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh ketika Soeharto tergolek di RS Pertamina pada Mei 2006. Misi mantan Jaksa Agung ini hanya satu: meminta yuniornya itu mencabut pencekalan atas Soeharto.

Dia juga ingin mempertanyakan alasan hukum kejaksaan menghidupkan kembali perkara korupsi penguasa Orde Baru itu. Dia gagal bertemu Abdul Rahman Saleh, tetapi misinya tak sepenuhnya gagal. Pencekalan Soeharto dicabut, dan penuntutan perkaranya dihentikan.

Mas Is-demikian ia akrab disapa-menjadi orang kepercayaan Soeharto di bidang penegakan hukum selama berkuasa. Ismail pernah menjabat Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman. Namun, namanya sudah mulai dikenal sejak bertugas di Sekretariat Negara pada tahun-tahun awal Orde Baru.

Bukan sekali saja pria kelahiran Pati, 7 September 1926, ini menunjukkan pembelaannya kepada sang bos. Ketika badai hujatan menghantam Soeharto, Ismail "pasang badan". Ia aktif menulis di berbagai media melakukan pembelaan. Kesetiaan itu juga ditunjukaan Ismail dengan sakit persis saat Soeharto jatuh sakit tahun 2006. Ceritanya, sepulang dari Kejaksaan Agung itu dia langsung menuju RSPP, menengok Soeharto. Tetapi, karena tergesa-gesa, ia tersandung dan jatuh. Akibatnya, kaki kirinya patah dan ia mesti dirawat di sana.

Ketika Soeharto kritis dua pekan lalu, Ismail memohon kepada Presiden Yudhoyono mengembalikan nama baik Soeharto dan mengubur dalam-dalam kesalahan yang pernah ia lakukan ter- hadap rakyat. "Mikul dhuwur men dhem jero," katanya.

Haryono Suyono

Tak Menghindar

Bagi Haryono Suyono, tak pernah ada keraguan sedikit pun untuk tetap menjaga hubungan dengan Soeharto setelah lengser dari kekuasaannya.

"Saya tak menghindar dari Pak Harto. Saya merasa tak pernah melakukan kesalahan selama menjadi menteri. Saat itu saya bekerja untuk rakyat," ujar pria kelahiran Pacitan, 6 Mei 1938, itu kepada Tempo.

Maka, ia selalu rajin datang ke pengajian yang digelar di Cendana, kediaman pribadi Soeharto. Ia juga datang untuk kepentingan lain. Salah satunya adalah melaporkan perkembangan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri), yang ia dirikan bersama Soeharto, Sudono Salim, dan Sudwikatmono.

Menurut Haryono, kedekatannya dengan penguasa Orde Baru itu merupakan keniscayaan belaka. "Selama 13 tahun menjabat Kepala BKKBN, di antaranya merangkap sebagai menteri, bagaimana mungkin saya tidak dekat dengan Pak Harto?" kata dia.

Kedekatan itu memang memiliki kisah panjang. Sepuluh tahun menjabat Deputi BKKBN, ia lalu diangkat menjadi Kepala BKKBN pada 1983. Hingga 13 tahun kemudian Haryono berada di pos itu, ditambah dengan dua kali merangkap sebagai menteri.

Pada 1997, ketika ia tengah berkampanye di Malang, mendadak ajudan Presiden menghubunginya minta ia segera menghadap Soeharto. Dengan perasaan kebat-kebit ia segera terbang ke Jakarta. "Saya sengaja memanggilmu untuk menemani aku ngobrol sambil makan singkong goreng ini," kata bosnya sembari tersenyum begitu bertemu. Mereka pun mengobrol ngalor-ngidul.

Belakangan, Haryono merasa obrolan santai itu adalah bagian dari cara Soeharto mengujinya. Pada kabinet berikutnya, Haryono memang diangkat menjadi Menteri Koordinator Kesra Taskin. Ia kian menjadi andalan Soeharto ketika sukses memperjuangkan agar Indonesia memperoleh penghargaan kependudukan PBB pada 1988.

Untuk semua itulah Haryono merasa layak tetap menjaga hubungan dengan Soeharto.

Bustanil Arifin

Menangisi tugas

Bagi Bustanil Arifin, Soeharto memang tokoh yang mengesankan. Mantan Menteri Muda Urusan Koperasi/Kepala Bulog ini tak pernah lupa pada pertemuan mereka pada awal 1950. "Kesan saya, Pak Harto adalah perwira yang baik dan rendah hati," tulis Bustanil dalam buku Di Antara Para Sahabat, Pak Harto 70 Tahun. Kesan itulah yang ia kenang sampai kini.

Hubungannya kian dekat ketika Indonesia mengalami krisis beras pada 1965. Sebagai Pangkostrad, Soeharto memerintahkannya meyakinkan pemerintah Thailand agar memberikan pinjaman 20 ribu ton beras. Misinya sukses. Lalu Bustanil dipercaya menjadi deputi di Badan Urusan Logistik (Bulog) pada 1969.

Ketika diangkat sebagai Kepala Bulog pada 1973, pria kelahiran Padangpanjang, Sumatera Barat, 10 Oktober 1925, ini sempat menangis di hadapan Soeharto. Terbayang di

matanya krisis beras yang belum juga usai. Tetapi sejak itu pulalah berbagai tugas yang lebih berat ia emban, yakni sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi selama tiga periode.

Ketika rezim Orde Baru makzul, Bustanil tak kehilangan kesetiaan pada Soeharto. Sekurangnya, ia selalu hadir dalam setiap acara halal-bihalal di Cendana.

Bustanil bersama Haryono termasuk orang-orang dekat yang berada di Lantai V Rumah Sakit Pusat Pertamina saat Soeharto menghembuskan nafas terakhirnya, Minggu (27/1) lalu.

Sudharmono

(1927-2006) Tak Menonjolkan Diri

Kedekatan almarhum Sudharmono SH dengan Soeharto sudah teruji oleh waktu. Tak banyak yang tahu bahwa Pak Dhar-demikian ia biasa disapa-mengambil peran cukup penting dalam menutup lembar kejayaan Orde Lama.

Pada 12 Maret 1966, sehari setelah keluarnya Supersemar, adalah Sudharmono yang memerintahkan pengetikan sebuah naskah bersejarah. Itulah surat yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang. Ketika itu Pak Dhar mengetuai Tim Operasionil Pusat Gabungan-V Komando Operasi Tertinggi (Koti).

Lalu, empat dekade kemudian dia menjadi salah satu pilar kejayaan Orde Baru. Di pemerintahan, ia menjabat Sekretaris Negara hingga tiga periode. Karier birokratnya mencapai puncak saat menjabat wakil presiden (1988-1993). Sudharmono juga pernah menjadi Ketua Umum Golkar, mesin politik Orde Baru. Semua itu menunjukkan kepercayaan besar Soeharto pada pria kelahiran Gresik 12 Maret 1927 tersebut.

Dengan serenceng jabatan penting itu, sebenarnya Pak Dhar berpeluang tampil lebih ke depan. Namun, ia mampu menahan diri. ''Seorang yang bekerja dalam staf tidak boleh menonjolkan diri,'' ujarnya.

Ketika Orde Baru tutup buku pada 1998, letnan jenderal purnawirawan ini tak lari ke mana-mana. Dia tetap bekerja bersama dengan mantan bosnya. Ia dipercaya mengkoordinasikan tujuh yayasan yang didirikan Soeharto, yakni Dharmais, Supersemar, Dakap, Damandiri, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Gotong Royong, dan Trikora.

Pada 23 Januari 2006, Dharmono meninggal setelah dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Soeharto sempat membesuknya.

Saadillah Mursyid

(1937-2005) Setia sampai Akhir

Mudah-mudahan saya terhindar dari orang-orang yang semasa Pak Harto memegang jabatan presiden selalu mendekat-dekat, menjilat, dan mencari muka. Pada waktu Pak Harto tidak lagi menjadi presiden, orang-orang itu pula yang bersuara lantang menghujat, mencaci, melempar segala kesalahan kepada Pak Harto."

Pernyataan itu diucapkan (alm) Sa-adillah Mursyid ketika hari-hari Soeharto dipenuhi hujatan dan cacian para musuhnya. Pria kelahiran Kalimantan Selatan, 7 September 1937, ini memang dikenal loyal dalam berteman. Maka, ia tak meninggalkan Soeharto, meski kekuasaan tak lagi dalam genggaman pendiri Orde Baru itu. Ia tetap setia berkunjung ke Cendana.

Tetapi Saadillah tak memiliki waktu lebih banyak menunjukkan kesetiaannya. Mantan Menteri Sekretaris Negara ini meninggal dunia pada 28 Juli 2005 akibat stroke. Pada saat itu Soeharto menyempatkan diri melayat ke rumah duka. Dia merasa wajib memberi penghormatan terakhir pada mantan anak buahnya yang setia itu.

Meniti karier di jaringan birokrasi sebagai kurir kantor Sekretariat Negara di awal pemerintahan Orde Baru, Saadillah akhirnya mengisi pos terpenting di sana. Selanjutnya ia seperti ditakdirkan berada di samping Soeharto pada masa-masa sulitnya.

Saadillah yang menulis konsep pengunduran diri Soeharto. Ia juga yang terus melaporkan detik-detik perkembangan genting pada Mei 1998 itu. Ketika Soeharto sakit keras pada 1999, ia setia membesuknya.

Di Mata Para Seteru

Pramoedya Ananta Toer (1925-2006)

Pada 1973, Presiden Soeharto mengirim surat ke Pramoedya Ananta Toer yang tengah diasingkan di Pulau Buru. Soeharto menyatakan kekhilafan adalah wajar. Maka kewajaran itu mesti dilanjutkan dengan kewajaran berikutnya, yakni kejujuran, keberanian, dan kemampuan menemukan jalan yang benar.

Pram mesti menjalani pembuangan setelah Orde Baru muncul sebagai pemenang dalam prahara politik 1965. Sebagai anggota Lekra yang berafiliasi ke PKI-pihak yang kalah-Pram akhirnya disurukkan ke penjara selama 14 tahun. Tetapi kesalahannya tak pernah dibuktikan di pengadilan.

Begitu keluar pada 1979, tak berarti Pram leluasa melakukan aktivitas. Untuk beberapa lama ia menjadi tahanan rumah. Kediamannya juga diawasi intel. Dan, yang mengenaskan, buku-bukunya diberangus.

Pada 30 April 2006, Pram meninggal dunia. Sampai akhir hayatnya Pram teguh pada sikapnya. Hal itu sesuai dengan surat balasan yang ia kirim kepada Soeharto, November 1973. Pram menegaskan, "Orang tua mendidik saya untuk mencintai kebenaran, keadilan dan keindahan, ilmu pengetahuan, dan nusa bangsa...."

Amien Rais

Situasi matang yang menyebabkan Soeharto makzul dari kekuasaan pada 1998, salah satunya, berkat sepak terjang Amien Rais. Situasi sosial-ekonomi yang terus memburuk selama setahun terakhir menjelang Mei 1998 membuat Amien menegaskan sikap. "Saya siap memimpin people power jika dibutuhkan, dengan syarat tanpa pertumpahan darah," katanya pada Mei 1998.

Sosok Amien tidak begitu saja mencuat ke panggung politik. Sejak diangkat sebagai Ketua PP Muhammadiyah (1995), ia banyak melancarkan kritik tajam. Amien termasuk figur yang pertama kali menggulirkan isu suksesi-wacana sensitif ketika itu (1993). "Saya didikte hati nurani saya," kata dia menanggapi keberaniannya.

Setelah itu kritiknya mengalir kencang, termasuk dalam kasus Busang. Pada 1996 Amien ikut menelurkan wacana perlunya reformasi di Tanah Air. Semua sepak terjangnya itu berujung pada lengsernya Amien dari Dewan Pakar ICMI (1997).

Ketika Indonesia diempas krisis ekonomi pada 1997, Amien bersama eksponen anak bangsa lain kian gencar menggulirkan isu reformasi. Bersama 50 tokoh nasional Amien membentuk Majelis Amanat Rakyat (MAR). Dalam jupa pers pada 14 Mei 1998, MAR menyerukan Presiden Soeharto segera mengundurkan diri.

Perubahan lalu terjadi dengan cepat. Republik hamil tua. Dan pada 21 Mei Soeharto terjungkal karena kekuatan massa. Amien kemudian mendapat gelar Tokoh Reformasi.

Budiman Sudjatmiko

Perlawanan terbesar Budiman Sudjatmiko terhadap Orde Baru dan Soeharto adalah mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Berdiri pada Juli 1996, partai ini mengusung asas sosialis demokratik. Budiman menjadi ketuanya. Sepekan setelah PRD lahir, bentrokan berdarah pecah di kantor PDI, Jalan Diponegoro. Bentrokan ini memicu kerusuhan di beberapa sudut Ibu Kota. Akibatnya, seperti dicatat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 5 orang tewas dan 23 orang hilang.

Pemerintah menuding PRD ada di balik kerusuhan tersebut. Maka aktivis PRD diburu, sehingga Budiman dan teman-temanya ditangkap. Budiman divonis pengadilan 13 tahun penjara karena dianggap bertindak subversif. Dari balik jeruji, Budiman terus melawan. Aksi mogok makan hingga menolak grasi ia lakukan. Dari penjara jugalah ia menjalankan partai.

Ketika Soeharto terjungkal dan penguasa baru lahir, Budiman tidak pernah melihat pemerintah serius mengadili kejahatan penguasa Orde Baru itu. Dan ketika Jaksa Agung mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) atas kasus hukum Soeharto, dia meradang. "Pertimbangan kesehatan atau alasan kemanusiaan terhadap Soeharto itu tidak bermoral," ujar Budiman, yang kini menjabat Sekjen Relawan Perjuangan Demokrasi-organisasi sayap PDI Perjuangan.

Sjahrir

Sebuah hari, tahun 1970. Sekelompok mahasiswa menemui Presiden Soeharto untuk mendesakkan tuntutan pemberantasan korupsi. Sjahrir dan Akbar Tandjung, mahasiswa Universitas Indonesia, ada di antara sejumlah mahasiswa itu. Di sela dialog, Akbar rupanya haus dan meraih gelas minuman yang dihidangkan. Cepat Sjahrir mencegah Akbar. Soeharto melihat adegan itu. Ia marah. "Ya sudah kalau tidak mau minum," hardiknya.

Sjahrir merasa adegan itulah asal muasal ketidaksukaan Soeharto padanya. Yang pasti juga tidak disukai Soeharto, Sjahrir bersama yang lain membentuk komite anti-korupsi. Ketika pecah Peristiwa Malari 1974, Sjahrir termasuk satu dari banyak mahasiswa dan akademisi yang dikirim ke penjara.

Di dalam hotel prodeo, Sjahrir tetap bersikap kritis. Ia menulis artikel-artikel yang dimuat di penerbitan kondang seperti Prisma. Tentu saja ia tak memakai namanya sendiri. "Tulisan saya dimuat dengan nama Daniel Dakhidae atau Aini Chalid," ujar dia.

Keluar dari penjara, Sjahrir melanjutkan studi S3 di Harvard. Sekembali dari sana, kiprah Sjahrir tak surut. Ia merintis berdirinya Sekolah Ilmu Sosial (SIS), yang hanya bertahan tiga tahun, sebelum dilarang pemerintah. Ia kemudian mendirikan Yayasan Padi Kapas dan menulis artikel-artikel tajam di media. Temanya jelas, yakni penentangan praktek monopoli

dan oligopoli pemerintah sepanjang 1980-an. "Tidak seharusnya kebijakan pemerintah digunakan untuk memperkaya keluarga Presiden," ia menandaskan.

Benny Biki

Benny Biki, 46 tahun, punya satu doa buat mantan presiden Soeharto ketika dirawat di RSP Pertamina, pada Mei 2006. "Mudah-mudahan Pak Harto cepat sembuh, sehingga proses hukum bisa berjalan dan dia segera diadili," tuturnya kepada Tempo.

Benny punya alasan berdoa demikian. Kakak kandungnya, Amir Biki, tewas saat terjadi bentrok antara massa dan pasukan Yon Arhanudse VI di Tanjung Priok, 22 tahun silam.

Tragedi Tanjung Priok itu adalah puncak penentangan Biki bersaudara terhadap rezim Orde Baru. Hari-hari sebelumnya, keduanya telah menggerakkan massa untuk berunjuk rasa menentang undang-undang keormasan, yang menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Mereka menilai undang-undang itu bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945.

Sejak tragedi yang menewaskan puluhan orang itu, Benny Biki memimpin keluarga korban menuntut keadilan.

Ali Sadikin

Ali Sadikin tak akan pernah lupa ketika anaknya gagal memperoleh kredit bank pada 1980-an. Ketika ia tanyakan kepada Rahmat Saleh, Gubernur BI saat itu, ia memperoleh jawaban memang ada larangan dari pemerintah. "Larangan itu sebenarnya untuk Pak Ali," jawab Rahmat Saleh.

Hambatan ekonomi hanyalah satu tekanan yang dilancarkan penguasa Orde Baru terhadap Ali Sadikin. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga dibatasi pergaulan sosialnya, dicegah ke luar negeri, dan suaranya diberangus. Itu semua karena aktivitasnya dalam "gerakan" Petisi 50.

Petisi 50, yakni surat keprihatinan yang diteken 50 tokoh masyarakat, dikeluarkan pada 5 Mei 1980. Surat itu merupakan reaksi atas pidato tanpa teks Presiden Soeharto di depan pimpinan ABRI pada 27 Maret 1980, dan dalam acara HUT Kopassandha di Cijantung, Jakarta.

Dalam kedua pidato itu Presiden mengingatkan adanya kelompok yang ingin mengganti Pancasila. Soeharto mengatakan, kalau terpaksa lebih baik menculik seorang dari dua pertiga anggota MPR yang hendak mengubah UUD 1945 dan Pancasila, agar kuorum tak tercapai. Inilah yang ditanggapi kritis Ali Sadikin dan kawan-kawan. Sejak itu pula kelompok Petisi 50 kerap mengeluarkan pandangan kritis.

Ali menegaskan, Petisi 50 lahir untuk mengajarkan demokrasi dan memperbaiki nasib bangsa. "Jadi bukan untuk mencari kekuasaan," kata dia.

Soebandrio (1914-2004)

Mendiang Soebandrio pernah melepaskan harapan bakal menghirup udara kebebasan setelah hampir 30 tahun mendekam dalam tahanan Orde Baru. Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri era Orde Lama ini masuk penjara karena dituding membiarkan tergulingnya pemerintah yang sah. Tetapi pada 15 Agustus 1995 ia dibebaskan setelah grasi keduanya diterima.

Setelah itu ia berada dalam kebimbangan untuk mengungkap kebenaran sejarah menurut versinya. Ada keikhlasan untuk melupakan masa lalu, namun di sisi lain banyak harapan agar ia menuliskan apa yang ia ketahui. Akhirnya, sebelum ia meninggal dunia pada 3 Juli 2004 akibat stroke, sebuah buku berjudul Kesaksianku Tentang G30S sudah ia tuntaskan.

Buku itu menyebutkan sejarah versi Soeharto adalah dusta. Menurut Soebandrio, Soeharto terlibat dalam aksi berdarah G30S. "Soeharto secara matang merencanakan dan melakukan kudeta merangkak," tulisnya. Soebandrio menegaskan, bukunya itu tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam.

Dewi Soekarno

Pada Juni 1970, Ratna Sari Dewi yang hendak menuju Indonesia dari bandara Singapura dihadang seorang pria. "Anda tidak boleh masuk ke Indonesia," ujar lelaki itu sambil memperkenalkan diri sebagai staf atase militer Indonesia.

Dewi tak menyurutkan langkah. Ia mesti menemui suaminya, Soekarno, yang tengah tergeletak sakit di Tanah Air. Maka, dengan segala cara akhirnya ia berhasil masuk Indonesia. Setelah Soekarno dijatuhkan, Dewi memang terbuang ke Prancis bersama anak semata wayangnya, Karina. Ketika berhasil menemui suaminya yang tengah sekarat, kondisi Soekarno saat itu mengerikan. Tubuhnya menggelepar sambil mengeluarkan suara ngorok yang keras. Esoknya, Soekarno mangkat.

Dewi mencium keganjilan. Ia mengontak sejumlah dokter kenalannya di luar negeri. Kesimpulannya, kondisi meninggal seperti itu adalah akibat konsumsi obat tidur berlebihan. "Padahal Bung Karno tak biasa menggunakan obat tidur," katanya. Lantaran inilah Dewi ditangkal masuk Indonesia hingga sepuluh tahun (1970-1980) kemudian. Di pengasingannya Dewi kerap berkampanye mempersoalkan keterlibatan Soeharto dalam Gerakan 30 September.

Ketika mendengar Soeharto meninggal, ia masih tidak bisa memaafkannya. "Ia adalah Pol Pot-nya Indonesia," kata Dewi kepada kantor berita AFP merujuk pada tewasnya 500 ribu orang, yang dituduh komunis seusai Peristiwa G30S.

Pustaka Setelah Lengser

Tiba-tiba saja semua menjadi ahli Soeharto. Dan tiba-tiba saja semua menjadi penulis dahsyat. Mereka mencurahkan segala pengalaman dan pengetahuan tentang Soeharto melalui buku-buku yang terlihat di toko-toko buku sejak Soeharto turun takhta. Mereka adalah sejarawan, wartawan, dan politisi, orang asing atau orang Indonesia. Ada yang menulis berdasarkan persentuhan pribadi. Ada pula yang menulis dengan penuh gugatan dan kesumat.

George Junus Aditjondro melempar buku Dari Soeharto ke Habibie, Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari, lima bulan setelah Soeharto melepaskan jabatannya. Buku ini membeberkan bukti-bukti kekayaan Soeharto, keluarga, dan kroninya dari hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ketika baru diluncurkan, buku ini segera menjadi best-seller dan most-wanted. Bahkan PIJAR Indonesia dan Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan-penerbit buku ini-kala itu sampai kewalahan melayani permintaan yang terus mengalir. Buku itu bisa sedemikian laris lantaran selama ini informasi yang ditulis dosen sosiologi korupsi Newcastle University of Australia ini hanya bisa dinikmati secara gerilya atau melalui Internet.

Setelah Aditjondro, tak terhitung buku-buku yang mengobrak-abrik dosa politik Soeharto. Baik yang berdasarkan data maupun yang "asal njeplak" memanfaatkan kebebasan di orde reformasi ini. Penerbitnya ada yang bermutu, ada pula yang asal-asalan. Bahkan sekadar fotokopian pun bisa laris manis dibeli orang.

Beberapa judul yang bertebaran yang mengusung tema anti-Soeharto antara lain Pengusutan Harta Soeharto & Trik Pencucian Uang Haram karangan Indara Ismawan (Media Pressindo, 1998). Ada pula Mendobrak Penjara Rezim Soeharto karangan Adam Soepardjan, yang diluncurkan Penerbit Ombak pada 2001. Adili Soeharto. Jerat dengan Kasus Pembunuhan Massal karya Mike Wangge, yang diterbitkan Permata Media Komunika pada 1999. Masih banyak buku yang menuangkan gerundelan, kebencian, hingga tuntutan terhadap sang mantan presiden, yang tak mungkin terjadi di masa kekuasaannya dulu.

Meski begitu, yang memuja Soeharto tentu tak kurang pula. "Saya begitu terpukul menyaksikan pengunduran diri Bapak melalui layar kaca. Saya sempat menangis, saya mengerti perasaan Bapak. Tapi saya percaya, Pak, rakyat Indonesia masih mencintai, menghormati, dan mengenang jasa Bapak selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kita cintai."

Itulah satu kutipan surat yang dimuat dalam buku Anton Tabah, Empati di Tengah Badai. Buku yang memuat kumpulan surat kepada Soeharto pada 21 Mei hingga 31 Desember 1998 ini dilanjutkan dengan Simpati dan Doa untuk Pak Harto yang berisi surat-

surat periode 1 Januari sampai 30 Juni 1999. Dari awal sampai akhir, buku ini menggemakan kecintaan, kebanggaan, dan ketidakrelaan Soeharto mundur dari kursi presiden.

Pembelaan soal keterlibatan jenderal bintang lima ini dalam Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dibeberkan dalam Dua Jenderal Bicara tentang Gestapu/PKI. Buku terbitan CV Sahabat Klaten pada 2001 ini disunting oleh Anton Tabah dengan kata pengantar oleh sejarawan Taufik Abdullah.

Buku ini mengutip pernyataan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution: "Kepada generasi muda perlu diingatkan, bahwa pemutarbalikan fakta di masa sekarang, tujuan utamanya adalah untuk memorak-porandakan posisi TNI di mata rakyat. Kemudian tujuan akhirnya adalah menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sistematis yang gejalanya semakin nyata dimulai dari ujung barat Indonesia (Aceh) dan ujung timur (Irian Jaya)."

Tak sedikit buku pembelaan yang ditulis para pendukung Soeharto berkaitan dengan masalah hukum yang menimpanya. Salah satunya Perkara H.M. Soeharto Politisasi Hukum: Dalam Kajian Perspektif Hukum (Acara) Pidana buatan anggota tim pengacaranya, Indriyanto Seno Adji dan Juan Felix Tampubolon. Buku yang diluncurkan pada 2001 ini memuat tinjauan hukum atas kasus Soeharto yang tentu saja ujung-ujungnya menyatakan penguasa Orde Baru ini tak layak diadili.

Dalam nada yang serupa, Ismail Saleh, mantan Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung di era Orde Baru, menerbitkan buku Proses Peradilan Soeharto, Penegakan Hukum atau Komoditi Politik. Diterbitkan oleh Yayasan Dharmais-salah satu yayasan Soeharto-pada Juni 2001, buku ini antara lain memuat sambutan Sudharmono dan Saadilah Mursjid. Dua pendukung setia Soeharto ini justru telah lebih dulu berpulang mendahului junjungan mereka.

Dari begitu banyak buku benci dan cinta itu, syukurlah, masih banyak buku yang diangkat berdasarkan riset ilmiah, yang membeberkan fakta berdasarkan data.

Dari dalam negeri, ada Zaim Saidi yang meluncurkan buku Soeharto Menjaring Matahari pada 2001. Dilengkapi data yang aktual, buku terbitan Mizan Pustaka ini awalnya adalah tesis S-2 Zaim di bidang kebijakan publik, Universitas Sydney, Australia. Buku ini menjelaskan tarik-ulur kebijakan reformasi ekonomi selama 15 tahun terakhir masa kekuasaan Soeharto. Dengan membeberkan sejumlah data, Zaim menelanjangi sejumlah paket kebijakan dan deregulasi di berbagai bidang ekonomi yang diluncurkan mantan presiden itu. Dengan berimbang ia menganalisis, benarkah semua itu semata-mata "ulah" Soeharto ataukah ada faktor-faktor ekonomi dunia yang mempengaruhi.

Sejarawan Asvi Warman Adam juga meluncurkan Soeharto dan Sisi Gelap Sejarah Indonesia pada Maret 2004. Tulisan-tulisannya diliputi tema besar pembengkokan sejarah selama rezim Soeharto berjaya, termasuk upaya penyeragaman versi sejarah peristiwa

Gerakan 30 September dan berbagai gerakan dan kebijakan Soeharto. Asvi juga menekankan sejumlah alasan mengapa Soeharto mesti diadili.

Retnowati Abdulgani-Knapp, putri Roeslan Abdulgani, menulis buku dalam bahasa Inggris yang diterbitkan di Singapura: The Life And Legacy of Indonesia's Second President. Ia menulis plus-minus Indonesia saat dipimpin Soeharto dan membandingkannya dengan Soekarno. Ia juga menceritakan tujuh yayasan yang didirikan Soeharto dan menulis keseharian sahabat ayahnya itu setelah lengser.

Ada pula buku yang disusun dengan serius dengan serangkaian foto yang diseleksi secara saksama dengan judul Indonesia in the Soeharto Years: Issues, Incidents and Images (The Lontar Foundation, 2005). Buku setebal 493 halaman ini dengan desain coffee-table book ini disunting antara lain oleh John H. McGlynn, Oscar Motuloh, Suzanne Charle, dan Bambang Bujono. Diberi tiga buah kata pengantar oleh Jimmy Carter, Goenawan Mohamad, dan Taufik Abdullah serta puluhan esai dari para penulis terkemuka, buku ini mungkin sebuah karya yang digarap dengan sikap yang berjarak, dingin, dan penuh perhitungan. "Its approach is episodic; it is against the epic," demikian tulis Goenawan Mohamad dalam pengantarnya. Mungkin ini satu dari sedikit buku yang layak dimiliki sebagai koleksi.

Penulis-penulis asing negeri tak kalah bersemangat meluncurkan hasil penelitian mereka tentang Soeharto. Beberapa buku terkenal, antara lain Geoff Forrester, Post-Soeharto Indonesia Renewal or Chaos? terbitan ISEAS & KITLV Press pada 1999. Ada pula Suharto, a Political Biography, yang ditulis oleh R.E. Nelson dan diluncurkan oleh Cambridge University Press, Inggris, pada 2001. Lalu, Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia karya Kevin O'Rourke terbitan Allen & Unwin pada 2003.

Meriahnya penulis asing yang menerbitkan buku-buku bertema Soeharto sebenarnya bukan sebuah kecenderungan yang terjadi pascareformasi saja. Sejak masa-masa awal kepemimpinannya, telah banyak buku beredar seputar dirinya. Yang paling terkenal tentulah The Smiling General dan Anak Desa, Biografi Presiden Soeharto terbitan Gunung Agung, Jakarta, 1976. Keduanya tulisan O.G. Roeder yang isinya tentang silsilah, biografi, dan aneka kejayaan Soeharto di masa itu.

Pada tahun-tahun akhir kepresidenan Soeharto, mulai bertaburan sejumlah buku yang menggugat kepemimpinannya. Satu yang mencuat adalah A Nation in Waiting: Soeharto's Indonesia in the 1990s karangan Adam Schwartz yang diterbitkan Westview Press Inc., Amerika Serikat, pada 1994. Seperti "tradisi" terhadap buku-buku yang menentang Soeharto pada masa itu, Kejaksaan Agung waktu itu buru-buru mengeluarkan keputusan pelarangan buku wartawan Far Eastern Economic Review ini. Bahkan sejumlah kiai di Nahdlatul Ulama "menegur" Gus Dur mengenai ucapannya tentang Presiden Soeharto yang dimuat buku itu yang dianggap menghina Soeharto.

Ada pula buku-buku yang mengail tema Soeharto dengan tema yang "ringan", misalnya Pandangan Perempuan tentang Soeharto oleh La Rose dan Upi Tuti Sundari, yang diluncurkan Penerbit La Rose pada 1999. Atau, Soeharto dalam Cerpen Indonesia. Buku produksi Bentang Budaya pada 2001 ini merupakan kumpulan cerpen Indonesia yang berpijak pada tokoh Soeharto selama Orde Baru. Y.B. Mangunwijaya adalah salah satu penulisnya.

Di luar semua buku pro dan kontra tadi, kita tak boleh melupakan sejumlah buku yang terbit dengan sepengetahuan atau boleh jadi "pesanan" sang patriark sendiri pada masa kekuasaannya. Di urutan pertama, tentu saja otobiografi Soeharto: Ucapan, Pikiran, dan Tindakan yang ditulis Ramadhan K.H. dan diterbitkan pada 1988.

Buku itu ditulis dalam bentuk "as told to": menuliskan kembali apa yang dikemukakan Soeharto dalam bahasa yang lebih enak dibaca. "Isi adalah tanggung jawab yang bercerita (Soeharto)," kata Ramadhan dua tahun sebelum ia wafat pada 2006. Itu sebabnya buku ini disebut otobiografi, bukan biografi. Baginya, pekerjaan selesai begitu ia mendapat imbalan dari si pemesan.

Setelah Soeharto mangkat, sudah pasti berbagai buku akan lahir lagi. Yang mengenang dan yang mengecam. Yang memuja dan yang menggugat.

Lelaki dan Kancah Itu

DIA hidup dalam sebuah kancah yang keras: perang, operasi militer, pemberontakan, penaklukan lawan politik. Ia tahu medan yang keras selalu memberi kesempatan. "Pemberontakan" 1965 yang ditumpasnya membuatnya menjadi orang nomor satu di sebuah negeri selama lebih dari tiga dasawarsa. Soekarno yang selama bertahun-tahun menjadi Pemimpin Besar Revolusi, pasca-1965 "dikuncinya" hingga akhirnya wafat pada 1970. Di usia senja ia dianugerahi gelar Jenderal Besar. Ia meraih semuanya: kekuasaan, pengaruh, kesenangan, tawa lebar.

Ia mangkat pekan lalu dan kenangan itu masih rapi tersimpan. Saat ia panen ikan bersama para "punggawa". Ketika ia betelekan tongkat kayu berbincang dengan para petani.

Ia hidup dalam sebuah kancah yang keras. Ia tahu itu bisa memberinya banyak kesempatan....

Jenderal Besar Terakhir?

Bambang Harymurti
Wartawan Tempo

Gelar upacara militer lengkap telah mengantar Soeharto ke tempat peristirahatan terakhirnya, Senin pekan lalu. Bendera Merah Putih yang dipegang empat perwira memayungi jenazah saat diturunkan ke liang lahat. Tembakan salvo menggelegar memberikan penghormatan dan semua pucuk pimpinan angkatan bersenjata, bahkan panglima tertinggi TNI, hadir dengan pakaian kebesaran masing-masing. Lagu Gugur Bunga pun mengalun dari barisan musik militer.

Semua kegiatan itu, dilihat dari sudut protokol kemiliteran, adalah hal yang wajar saja bahkan sebuah keharusan. Terlepas dari berbagai kontroversi yang beredar di masyarakat, bagi kalangan tentara upacara ini sebuah keniscayaan: yang dimakamkan adalah seorang jenderal berbintang lima, seorang jenderal besar.

Di Indonesia, pangkat kehormatan militer tertinggi ini hanya disandang oleh empat orang dan kini semuanya telah berstatus almarhum: Jenderal Besar Sudirman, Soekarno, Abdul Haris Nasution, dan Soeharto. Tak jelas benar apakah secara resmi TNI masih mengakui keabsahan bintang lima yang disandang Presiden Soekarno ketika mengangkat dirinya menjadi panglima besar. Yang pasti, status resmi jenderal besar yang lain diberikan secara bersamaan pada 1 Oktober 1997, sewaktu Presiden Soeharto berada di akhir masa kekuasaannya.

Melalui PP No. 32 Tahun 1997, dinyatakan bahwa tiga tokoh TNI layak mendapat anugerah jenderal besar karena jasa-jasa mereka. Peraturan pemerintah ini tak menyebut secara terperinci alasan pemberian itu, sehingga sempat memicu berbagai interpretasi. Utamanya, di negeri lain bintang lima umumnya diberikan kepada seorang perwira tinggi yang berhasil menang dalam sebuah perang besar. Misalnya Jenderal Mc Arthur untuk kemenangan dalam Perang Pasifik, Marsekal G.K. Zukov yang mengalahkan Jepang di Manchuria dan Jerman di Leningrad, Jenderal B.L. Montgomery yang menekuk pasukan Jerman di Afrika, dan Jenderal Vo Nguyen Giap yang mengalahkan Prancis dalam pertempuran Dien Bien Phu.

Dilihat dari konvensi ini, kendati Jenderal Sudirman memang punya reputasi sebagai panglima yang berhasil menang dalam pertempuran Ambarawa, sulit untuk mengkategorikan konflik bersenjata itu sebagai sebuah perang besar. Jenderal Nasution bahkan tak dikenal sebagai komandan pemenang pertempuran, tapi lebih sebagai pemikir strategi perang, terutama setelah menerbitkan buku Pokok-Pokok Gerilya. Sedangkan kancah pertempuran Jenderal Soeharto adalah sebagai komandan Serangan Umum 1 Maret 1948 di Yogyakarta dan operasi Mandala dalam pembebasan Irian Jaya pada 1962. Kedua

operasi militer ini tak berbuah kemenangan militer tapi menunjang tercapainya kemenangan politis dan diplomatis.

Dengan mempertimbangkan argumen tersebut, agaknya pandangan Salim Said tentang latar belakang anugerah jenderal besar oleh TNI sebelas tahun silam itu lebih realistis. Pakar militer yang dekat dengan para petinggi TNI ini lebih melihat peran Jenderal Sudirman, Nasution, dan Soeharto dalam perkembangan peran politik militer di Indonesia. Ia melihat Jenderal Sudirman sebagai peletak dasar pemikiran bahwa militer adalah alat negara, bukan alat pemerintah. Ini dibuktikannya dengan tetap meneruskan perlawanan bersenjata kendati para pucuk pimpinan pemerintah telah ditangkap Belanda dan pusat pemerintahan telah diduduki musuh.

Jenderal Nasution dianggap berjasa mengembangkan doktrin dwifungsi sebagai konsep peran politik TNI. Gagasan ini pertama kali dilontarkan Jenderal Nasution ketika berpidato di depan Akademi Militer di Magelang, 11 November 1958. Dalam pidato tanpa teks itu Jenderal Nasution mengatakan bahwa TNI bukanlah sekadar alat pemerintah seperti di negara Barat dan juga bukan pemegang monopoli kekuasaan seperti di negara-negara Amerika Latin. TNI, menurut Nasution, memilih jalan tengah dan para perwira militer berhak untuk turut serta-bersama unsur masyarakat yang lain-mengambil peran nonmiliter dalam membangun negara.

Jenderal Soeharto, menurut Salim Said, dianggap pihak militer berjasa dalam menerapkan konsep dwifungsi itu. Hal ini dilakukan setelah berhasil memberantas kelompok komunis, yang dikenal sebagai lawan politik utama militer di era Orde Lama pada 1965. Ia kemudian mengkonsolidasi peran politik TNI dengan cara melemahkan partai-partai politik melalui upaya depolitisasi, yaitu dengan menggulirkan gagasan "massa mengambang". Belakangan konsolidasi ini semakin kukuh melalui kebijakan penyederhanaan partai dan penerapan asas tunggal dan pemihakan TNI pada Golkar.

Penerapan dwifungsi TNI versi Jenderal Soeharto itu tak selalu didukung penuh oleh kalangan militer. Pada akhir 1970-an, setelah terjadi kerusuhan dalam pemilihan umum 1977, sekelompok perwira senior Angkatan Darat meluncurkan "Makalah Seskoad", yang pada intinya berpendapat bahwa peran politik militer terlalu berlebihan. Kelompok yang kemudian disebut Fosko itu menyerukan agar TNI kembali ke jalan yang murni dengan menjadikan dirinya di atas semua golongan.

Kelompok ini lebih memilih TNI berperan seperti militer Turki, yang tak terlibat kegiatan politik sehari-hari dan hanya bergerak bila konstitusi sekuler progresif peninggalan Kemal Ataturk dianggap terancam. Penglima ABRI saat itu, Jenderal Yusuf, bahkan telah menyiapkan rencana menarik sekitar 16 ribu personel TNI yang mendapat tugas kekaryaan di berbagai institusi sipil kembali ke tugas militer. Namun pandangan yang kemudian didukung Jenderal Widodo, Kepala Staf TNI-AD saat itu, ditepis oleh Jenderal Soeharto.

Tepisan itu dilakukan amat nyaring ketika Presiden Soeharto berpidato di Pekanbaru pada Maret 1980. Jenderal Widodo diganti dan para jenderal purnawirawan yang memprotes pidato di Pekanbaru dengan menandatangani Petisi 50 pun dicekal, termasuk Jenderal Nasution. Para pendukung Jenderal Soeharto, yang oleh pakar wartawan Australia David Jenkins disebut kelompok pragmatis, kemudian membuat konsep tandingan yang dikenal sebagai "Makalah Hankam".

Sejarah mencatat, konsep kelompok pragmatis ini yang kemudian dijalankan Presiden Soeharto. Bagi kalangan yang sinis, pelaksanaan konsep ini di lapangan sebenarnya amat mirip dengan konsep pendudukan militer. Tentara menjadi alat pemerintahan Soeharto. Mitra sipil peran politik TNI adalah Golkar, yang oleh salah seorang tokohnya, Rahman Tolleng, disebut bukan partai yang berkuasa (ruling party) tapi partainya penguasa (ruler's party). Dengan dukungan kuat TNI melalui jaringan teritorial, temasuk kekaryaan, Golkar pun terus-menerus menang dalam pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun.

Jenderal Soeharto semakin ringan tangan dalam memanfaatkan militer untuk menjalankan tugas nonmiliter. Operasi pembersihan para preman yang dianggap mengganggu ketenteraman diberikan kepada tentara. Ribuan preman bertato pun tewas ditembak secara misterius.

Kesibukan aparat militer di berbagai bidang nonmiliter ini pada akhirnya bermuara pada menurunnya kemampuan profesional militer TNI. Kecenderungan ini semakin buruk setelah pengaruh keluarga dan kroni Cendana mulai merasuk ke sistem promosi di jajaran militer. Jenderal L.B. Moerdani, seorang pendukung setia dari kelompok pragmatis yang mencoba mengingatkan Jenderal Soeharto tentang bahaya pengaruh nepotisme, malah terpental dari posisinya sebagai Panglima ABRI.

Militer pun seolah menjadi lembaga kebal hukum dan ringan tangan dalam menggunakan kekerasan. Peningkatan keterlibatan aparat militer dalam berbagai kegiatan bisnis dan politik menyebabkan maraknya antipati masyarakat terhadap tentara. Perangkat perang TNI memang makin modern dan canggih tapi pertautan hati dengan rakyat justru merenggang.

Kerenggangan ini amat dirasakan oleh para perwira muda, terutama yang terlibat dalam berbagai operasi militer di Timor Timur, Aceh, dan Papua. Posisi mereka seolah terbalik dengan generasi 45. Para senior pendiri TNI melakukan perang gerilya bersama rakyat melawan musuh dari luar yang lebih profesional secara militer. Para perwira muda penerus justru memiliki perangkat militer yang lengkap dan dilatih secara profesional dan harus berhadapan dengan pemberontakan bersenjata yang setidaknya didukung oleh sebagian rakyat setempat. Di lapangan mereka mulai paham bahwa pemberontakan-pemberontakan itu terjadi karena penyelesaian politik tak berjalan, bukan karena kegiatan musuh dari luar. Politik tak jalan karena dominasi militer terlalu kuat.

Pandangan ini setidaknya diutarakan almarhum Jenderal Agus Wirahadikumah, yang mengatakan "ABRI mampu menjalankan apa pun kecuali di bidangnya sendiri". Alumni Akabri angkatan 1973 ini tak sendirian. Itu sebabnya berbagai diskusi dilakukan para perwira muda yang risau, bahkan angkatan 1973 pun akhirnya memutuskan menerbitkan pendapat mereka dalam sebuah buku. Salah satu anggotanya, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan kemudian berperan aktif menyiapkan konsep paradigma baru TNI yang membawa militer aktif keluar dari kancah politik praktis.

Pemberian gelar jenderal besar kepada Soeharto boleh jadi merupakan cara canggih para perwira muda ini menyampaikan pesan mereka. Pangkat kehormatan tertinggi TNI ini diberikan sekaligus kepada Jenderal Sudirman dan Jenderal Nasution, peletak dasar dan penggagas konsep peran militer yang, menurut mereka, telah dilanggar oleh Soeharto.

Dan Jenderal Besar Soeharto kelihatannya menangkap pesan itu. Terbukti, dalam acara hari ulang tahun TNI pada 1997, ketika Soeharto pertama kali mengenakan bintang lima di acara publik, ia mengatakan perlunya TNI bersikap "tut wuri handayani" alias mengurangi dominasinya di masyarakat.

Upaya ini ternyata terlambat. Krisis ekonomi menerpa dan gelombang tsunami reformasi pun datang. Kali ini para pimpinan TNI membujuknya turun agar pihak militer tak harus berhadapan dengan rakyat dan tenggelam bersama rezim Orde Baru. Soeharto akhirnya sepakat setelah panglima TNI berjanji melindungi keamanan dan harkatnya.

Janji itu terbukti dipegang TNI. Sampai sang Jenderal Besar diturunkan ke liang lahat, Senin pekan lalu.